



unicef 
for every child

PROFIL SANITASI SEKOLAH TAHUN 2017



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
10000 Jakarta, Indonesia

Tel.
(021) 5725635

Email
pdsp@kemdikbud.go.id

Website
pdsp.kemdikbud.go.id

UNICEF

World Trade Center 6, 10th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920, Indonesia

Tel.
(021) 2996 8000

Fax.
(021) 571 1326

Email
jakarta@unicef.org

Website
www.unicef.or.id

 unicefindonesia

 @unicefindonesia

 unicefindonesia

 Unicef Indonesia

ISBN 978-602-8449-13-7



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 2017

ISBN 978-602-8449-13-7

Ukuran Buku: 18,4 cm x 26,7 cm

Jumlah Halaman: xx + 76 Halaman

Tim Penyusun:
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK)

Pengarah:
Dr. Ir. Bastari, MA
Drs. L. Manik Mustikohendro, M.Si

Penulis:
Ir. Siti Sofiah, M.Sc
Sudarwati, S.Si, M.Si

Dukungan Teknis:
Reza Hendrawan
Aline Ardiani
Putri Sortaria
Aidan Cronin

Pengolah Data:
Wahono

Foto oleh:
UNICEF Indonesia

Diterbitkan oleh:
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Telepon:
(021) 573 1177

Email:
pdsp@kemdikbud.go.id

Website:
pdsp.kemdikbud.go.id

Dokumen ini bebas untuk dikaji, diabstraksikan, diperbanyak dan diterjemahkan baik sebagian maupun keseluruhannya, namun tidak dapat diperjualbelikan maupun digunakan untuk tujuan komersil.

Untuk kutipan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan United Nations Children’s Fund (2017). Profil Sanitasi Sekolah 2017: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan UNICEF.



unicef 
for every child

PROFIL SANITASI SEKOLAH TAHUN 2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 2017

KATA PENGANTAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Profil Sanitasi Sekolah Tahun 2017 ini disusun oleh Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai rujukan data awal Sanitasi Sekolah dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Beberapa indikator utama tujuan 4a terkait dengan ketersediaan sarana sanitasi di sekolah, yaitu akses pada sumber air yang layak, fasilitas jamban yang berfungsi dan terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta akses pada sarana cuci tangan dengan ketersediaan sabun dan air mengalir. Sesuai yang diamanatkan dalam TPB, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memenuhi semua indikator itu pada semua sekolah di Indonesia pada Tahun 2030.

Dengan terbitnya publikasi ini, maka diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi para pemangku kepentingan terkait untuk dapat mengalokasikan sumber daya dalam rangka mempercepat tercapainya kondisi Sanitasi Sekolah yang layak pada Tahun 2030.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, termasuk United Nations Children's Fund (UNICEF) yang telah memberikan dukungan teknis, sehingga Profil Sanitasi Sekolah ini dapat diterbitkan.

Jakarta, Desember 2017
Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Didik Suhardi, Ph.D
NIP 196312031983031004

UNICEF INDONESIA FOREWORD

Sustainable development begins with children. Crucial to children's healthy development and growth is the provision of safe water and sanitation for everyone, in all settings, including schools. Children require proper water, sanitation and hygiene (WASH) facilities to learn and grow. Evidence shows that such facilities and services can help to reduce risks of diarrhea, improve school participation and promote gender equality. It also gives children the opportunity for children to become agents of children in their families and communities to promote better hygiene practices.

Recognising the importance of school water, sanitation and hygiene, Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) - the Center for Statistics of the Ministry of Education and Culture - has collected and analysed data on the current WASH conditions in all schools in Indonesia. This publication, the 2017 WASH in Schools Profile, provides the results of this analysis and highlights progress that has been achieved, but also the outstanding gaps in service provision.

Indonesia is one of just a few countries in the world to publish WASH in schools data and to systematically monitor trends in service access and quality for children. These efforts are critical to the country's achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) for all children in Indonesia and help to promote every child's right to health.

It has been a pleasure to partner with the Ministry of Education and Culture on this initiative. I am confident this important publication will be an invaluable resource for policy makers, researchers and practitioners.

Jakarta, December 2017

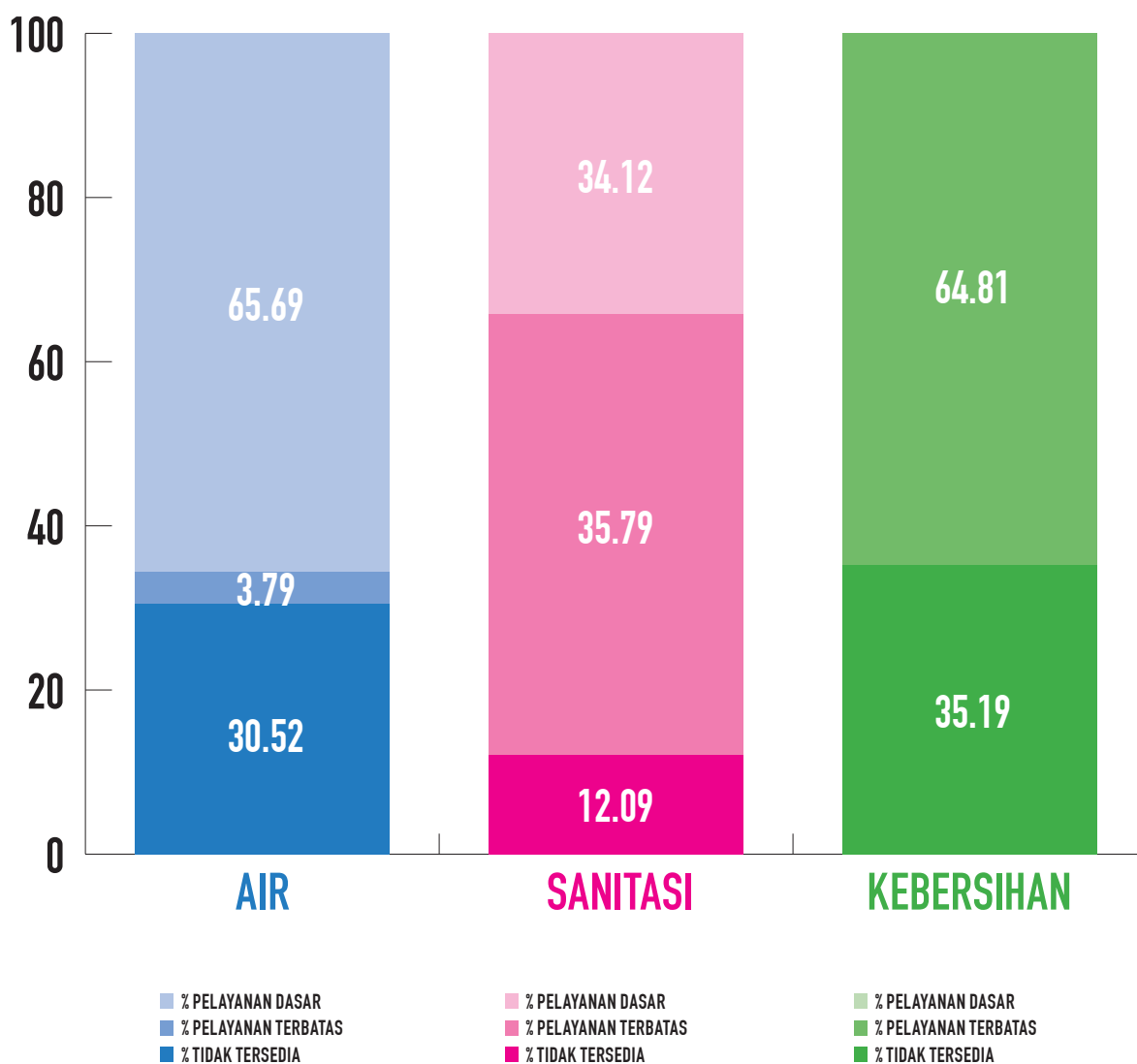


Lauren Rumble

Deputy Representative
UNICEF Indonesia

INFOGRAFIK

INDIKATOR SANITASI SEKOLAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN





**1 DARI 3 SEKOLAH DI INDONESIA
TIDAK MEMILIKI AKSES AIR**



12,09%

**ATAU 25.835 SEKOLAH
DI INDONESIA TIDAK
MEMILIKI JAMBAN**



35,19%

**ATAU 75.193 SEKOLAH
DI INDONESIA TIDAK
MEMILIKI SARANA
CUCI TANGAN**

**SATU DARI DUA SEKOLAH DI INDONESIA
TIDAK MEMILIKI JAMBAN YANG TERPISAH ANTARA
SISWA LAKI-LAKI DAN SISWA PEREMPUAN**



1:122

**RASIO JAMBAN UNTUK
SISWA LAKI-LAKI**



1:117

**RASIO JAMBAN UNTUK
SISWA PEREMPUAN**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Semua anak Indonesia berhak untuk mendapatkan akses pada lingkungan yang aman, bersih dan sehat di sekolah. Ketersediaan akses pada Sanitasi Sekolah merupakan prasyarat terciptanya lingkungan sekolah yang aman, bersih dan sehat. Pada tingkat global, Sanitasi Sekolah merupakan salah satu prioritas pembangunan yang termasuk ke dalam tujuan 4a pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Jenis akses Sanitasi Sekolah terbagi menjadi tiga indikator, yaitu akses pada sumber air minum layak dan tersedia sepanjang waktu, akses pada fasilitas sanitasi dasar yang layak dan terpisah, dan akses pada fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Akses Sanitasi Sekolah pada SDGs ini juga terbagi ke dalam empat tingkatan, yaitu, tidak tersedia akses, pelayanan terbatas, pelayanan dasar, dan pelayanan tingkat lanjut. Tantangannya, data untuk mengukur capaian SDGs, khususnya indikator Sanitasi Sekolah belum tersedia secara memadai.

Sebagai upaya untuk mengatasi ketersediaan data, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama UNICEF melakukan analisa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2016. Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh gambaran rinci mengenai status akses akses pada sumber air minum layak dan tersedia sepanjang waktu, akses pada fasilitas sanitasi dasar yang layak dan terpisah, dan akses pada fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain itu, Analisa data Dapodik juga digunakan untuk mengadvokasi pemangku kepentingan dalam rangka mendorong pemenuhan akses pada Sanitasi Sekolah di seluruh Indonesia. Pada akhirnya, analisa data Dapodik ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan sektor pendidikan, kesehatan, kesetaraan jender, dan khususnya pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

Hasil analisa Dapodik dipresentasikan berdasarkan tipe akses dalam setiap jenjang berdasarkan provinsi dan status sekolah (negeri atau swasta). Tipe akses yang dimaksud yaitu akses air, akses sanitasi atau jamban dan akses sarana cuci tangan. Sedangkan jenjang yang dimaksud adalah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Profil Sanitasi Sekolah ini tidak termasuk madrasah.

Sekolah dengan akses air dasar adalah sekolah dengan sumber air yang layak. Sumber air yang layak adalah ledeng/PAM, sumur pompa, air hujan, mata air terlindungi, sumur terlindungi, dan air kemasan. Selain itu, akses dasar juga mensyaratkan bahwa sumber air yang layak tersedia disekitar lingkungan sekolah dan cukup atau tersedia sepanjang waktu. Sedangkan akses air terbatas adalah sekolah yang memiliki akses pada sumber air yang layak dan masih terdapat di lingkungan sekolah, namun air tidak selalu tersedia sepanjang waktu. Tangga akses air paling

rendah adalah sekolah yang tidak ada sumber airnya atau ada sumber air, namun sumber air tersebut dikategorikan tidak layak. Sumber air yang dikategorikan tidak layak adalah sumur tidak terlindungi, mata air tidak terlindungi, dan sumber air permukaan seperti sungai dan danau.

Berdasarkan hasil analisa, jenjang pendidikan yang paling banyak memiliki akses air dasar adalah SLB (76,47%) dan SMK (74,65%). Jenjang pendidikan yang paling banyak tidak memiliki akses terhadap air adalah SD (31,85%). Ini berarti sejumlah 46.985 SD di seluruh Indonesia tidak memiliki akses terhadap air. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu hambatan dalam proses belajar mengajar, di mana siswa tidak mendapat akses terhadap air bersih.

Sekolah dengan akses jamban dasar adalah sekolah dengan jamban atau toilet yang layak, terpisah berdasarkan jenis kelamin dan dapat digunakan. Jamban atau toilet yang layak yaitu apabila jamban atau toilet yang dipakai adalah leher angsa, dan cubluk dengan tutup. Sedangkan akses jamban yang terbatas apabila sekolah memiliki sarana sanitasi yang layak, misalnya WC sentor dan cubluk dengan tutup, namun tidak terpisah berdasarkan jenis kelamin dan tidak dapat digunakan. Sekolah yang disebut sebagai sekolah yang tidak memiliki akses jamban apabila tidak tersedia sarana jamban atau toilet di sekolah tersebut sehingga siswa dan guru melakukan praktik buang air di sembarang tempat. Sekolah juga disebut sebagai sekolah yang tidak tersedia akses apabila memiliki jamban namun kondisinya tidak layak karena berjenis cubluk tanpa penutup, jamban menggantung.

Jenjang pendidikan yang paling banyak memiliki akses jamban dasar adalah SMP (41,88%) dan SMK (41,36%). Jenjang pendidikan yang paling sedikit memiliki akses jamban dasar adalah SLB (29,95%). Jenjang pendidikan yang paling tinggi persentasenya tidak memiliki jamban adalah SMK (14,08%) dan SMA (13,21%). Dilanjutkan dengan SD (12,19%) tidak memiliki jamban, ini berarti jika total jumlah SD adalah 147.503 di seluruh Indonesia, maka sebanyak 17.983 SD belum memiliki jamban.

Sekolah dengan akses terbatas pada sarana cuci tangan adalah sekolah yang memiliki sarana cuci tangan. Sedangkan tidak ada akses apabila sekolah tersebut tidak memiliki sarana cuci tangan.

Dari seluruh jenjang pendidikan, sekolah luar biasa memiliki akses yang paling besar terhadap sarana cuci tangan, yakni sebesar 77,83% SLB memiliki sarana cuci tangan. Disusul oleh sekolah pada jenjang SMK dan SMA yang rerata persentase sekolah pada jenjang tersebut sekitar 68% memiliki akses terhadap sarana cuci tangan. Sedangkan yang paling rendah memiliki akses terhadap sarana cuci tangan adalah sekolah pada jenjang SMP, hanya sekitar 60,19%. Ini berarti masih ada sekitar 15.000 SMP di seluruh Indonesia tidak memiliki sarana cuci tangan. Selain itu jenjang SD juga menjadi jenjang yang rendah dalam akses terhadap sarana cuci tangan. Sekitar 34,9% SD tidak memiliki sarana cuci tangan, yang berarti 51.485 SD di seluruh Indonesia tidak menyediakan sarana cuci tangan. Situasi ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena pembiasaan untuk melakukan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) sudah sepatutnya dimulai sejak dini.

Indeks Sanitasi Sekolah adalah pendekatan statistik untuk dapat membandingkan kinerja Sanitasi Sekolah antar provinsi, dengan pemilahan menurut jenjang pendidikan. Melalui pendekatan ini, maka memungkinkan untuk membandingkan status suatu kabupaten atau kota dengan kabupaten/kota lainnya. Pada bagian ini, analisa Indeks Sanitasi Sekolah dilakukan baik pada semua jenjang secara keseluruhan, maupun untuk masing-masing jenjang. Secara nasional, jenjang sekolah yang

memiliki Indeks Sanitasi Sekolah yang paling tinggi adalah SMK (61,62%) dan disusul oleh SLB (61,42%). Sekolah dasar di Indonesia masuk kategori Indeks Sanitasi Sekolah yang rendah. Hanya 53,75% Sekolah Dasar di Indonesia memiliki akses pada air, jamban dan fasilitas cuci tangan.

Pada jenjang SD, SMP dan SLB, provinsi dengan indeks tertinggi adalah provinsi DI Yogyakarta, yaitu 80,76% untuk SD, 77,70% untuk SMP dan 80,26% untuk SLB. Sebaliknya, provinsi Papua adalah provinsi dengan Indeks Sanitasi Sekolah terendah untuk tiga jenjang tersebut, yang hanya mencapai 24,96% untuk SD, 32,05% untuk SMP dan 36,11% untuk SLB. Sementara, pada jenjang SMA, provinsi dengan indeks tertinggi adalah provinsi Bangka Belitung (74,75%). Sebaliknya, provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi dengan Indeks Sanitasi Sekolah terendah yang hanya mencapai 38,01%. Bangka Belitung juga merupakan provinsi dengan indeks Sanitasi Sekolah tertinggi untuk jenjang SMK yang mencapai 75,93%. Sebaliknya, provinsi Maluku Utara adalah provinsi dengan indeks Sanitasi Sekolah terendah yang hanya mencapai 38,14%.

Berdasarkan analisa data yang dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan pada para pengambil kebijakan, baik di tingkat sekolah, dinas, maupun kementerian, yaitu;

1. Saat ini data terdapat 32% sekolah di berbagai tingkatan yang tidak mengisi data Sanitasi Sekolah. Angka ini sangat besar dan berdampak pada hasil analisa keseluruhan. Perlu ada upaya untuk mendorong keterisian data Sanitasi Sekolah dalam Dapodik.
2. Berdasarkan definisi indikator Sanitasi Sekolah yang dipublikasikan oleh UNICEF dan WHO, indikator kebersihan, tidak saja hanya dilihat dari ketersediaan fasilitas cuci tangan, namun juga ketersediaan sabun dan air yang mengalir. Karena data tersebut belum terdapat dalam Dapodik, maka diperlukan satu pertanyaan tambahan dalam Dapodik untuk mendapatkan informasi tersebut
3. Disadari bahwa pengisian data Dapodik di setiap sekolah dilakukan oleh operator Dapodik. Tidak semua operator Dapodik memiliki pengetahuan tentang Sanitasi Sekolah, terutama istilah-istilah yang sangat teknis. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas data melalui pelatihan pengisian data Sanitasi Sekolah atau melalui pengembangan panduan pengisian data Sanitasi Sekolah yang dapat diunduh dengan mudah dari website Dapodik
4. Berdasarkan analisa dalam publikasi ini, kondisi Sanitasi Sekolah di Indonesia masih jauh dari standar yang diharapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan No 24 Tahun 2007. Diperlukan upaya untuk mendorong agar analisa data dalam publikasi ini dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran baik oleh Kementerian terkait di tingkat pusat, maupun oleh dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten.



EXECUTIVE SUMMARY

All children in Indonesia have the right to a safe, clean and healthy school environment. Access to Water, Sanitation and Hygiene (WASH) in Schools is an essential part of a safe, clean and healthy school environment. Globally, WASH in Schools (WinS) is a key development priority that is now specifically recognized in Goal 4.a of the Sustainable Development Goals (SDGs). The SDGs assess access to WinS across three criteria: continuous access to safe drinking water sources, access to appropriate and gender-specific facilities, and access to handwashing facilities supplied with soap and water. WinS is assessed in terms of advanced access, basic access, limited access and no access to water, sanitation and hygiene provision. Currently, the main challenge to tracking progress on WinS toward the SDGs is a lack of adequate data.

To address this lack of data on WinS, the Center for Education Statistics at the Government of Indonesia's Ministry of Education and Culture, with support from UNICEF, analyzed 2016 Education Management Information System data from Indonesian schools –a system known as “Dapodik” in the Indonesian language. The purpose of the analysis was to obtain a detailed picture of WASH in schools across the three SDG criteria. In addition, the analysis was used to advocate for the importance of achieving WinS targets among stakeholders. This analysis can now be used as a reference for strengthening policymaking around education, health, and gender and especially WASH.

The findings presented here concern WinS access according to school type. The data is disaggregated by province and by whether the school is public or privately funded. The WinS components examined pertain to the levels of access to water, sanitation and hygiene provisions. The type of schools examined are: Primary Schools (SD); Junior Secondary Schools (SMP); Senior Secondary Schools (SMA); Vocational Schools (SMK); and Special Schools (SLB). Madrasahs, or Islamic elementary schools, are not included,

Schools with “basic access” are defined as those with protected water sources. Protected water sources include piped water, boreholes, rainwater, protected springs, protected wells and bottled water. In addition, “basic access” requires that the water source lie in close proximity to the school and is available 24 hours a day. “Limited access”, meanwhile, is defined as a school which limits access to a protected water source to specific times. A school with defined as one with “no access” is one with no source of water or with an unprotected water source. Unprotected water sources include unprotected springs and surface sources like rivers and lakes.

Based on the analysis presented in this report, the type of schools with the best access to basic water provision are SLB (76.47 per cent) and SMK (74.65 per cent). The schools with the worst access to basic water provision, meanwhile, are SD (31.85 per cent). Some 46,985 primary schools were found to lack basic access to water services, creating a significant obstacle to learning.

Schools with “basic access” to sanitation are defined as those with adequate, well-functioning, gender-specific toilets. Adequate toilets are those that flush or those with pit latrines with lids. “Limited access” to sanitation means a school has an adequate number toilets, but those toilets are either broken, non-gender-specific, or both. Schools are deemed to have “no access” to sanitation if there is no pit latrine or toilet on campus, which means students and teachers must practice open defecation. Schools may also be classified as having “no access” if the toilets are unsafe; for example, if a pit latrine lacks a lid, or if faecal waste is dumped into a body of water like a lake or river via a “hanging toilet”.



Among schools with “basic access” to sanitation, SMP (41.88 per cent) and SMK (41.36 per cent) were found to have the highest rates. The type of school with the lowest rates of “basic access” were found to be SLB (29.95 per cent). Of those with “no access”, SMK (14.08 per cent), SMA (13.21 per cent) and SD (12.19 per cent) had the highest percentages. In total, 17,893 out of 147,503 primary schools (SD) in Indonesia were found to lack toilets.

Schools with a “limited access” to hygiene are defined as schools that have installed hand-washing facilities. Schools are considered as having “no access” to hygiene if no such facilities have been installed.

Across all levels of schools, SLB, or special schools, showed the highest level of access to handwashing facilities, at 77.83 per cent. Following this were SMK and SMA, each with 68 per cent access to handwashing facilities. With only 60.19 per cent access to handwashing facilities, SMP displayed the lowest levels of Access, translating to over 15,000 Junior Secondary Schools lacking handwashing facilities. Primary schools, or SD, displayed poor levels of access, with over 30 per cent (51,485 schools in absolute figures) lacking hand-washing facilities altogether. This is concerning given that good hygiene must be initiated in schools at the earliest possible opportunity.

This report utilizes an index that calculates a combined score for WinS at schools. The statistical approach was developed to compare WinS progress across provinces, disaggregated by school type. Such an approach allows also decision makers to compare the status of WinS among districts or cities within a single province.. The highest WinS index score was achieved by SMK (61.62 per cent) followed by SLB (61.42 per cent). Primary schools, or SD, were the lowest performers.

Among SD, SMP and SLB schools, the province with the highest WinS index score was DI Yogyakarta, at 80.76 per cent for SD, 77.70 per cent for SMP, and 80.26 per cent for SLB. Papua scored lowest within these three school types, with 24.96 per cent for SD, 32.05 per cent for SMP and 36.11 per cent for SLB. At the SMA level, the province with the highest WinS index score was Bangka Belitung, at 74.75 per cent. East Nusa Tenggara had the lowest score among SMA, at 38.01 per cent. Bangka Belitung's WinS index score for SMK was highest at 75.93 percent, while North Maluku scored lowest, at 38.14 per cent.

Key recommendations for education sector policymakers, local education departments and officials at the Ministry of Education and Culture have been developed based on the findings in this report. They are:

1. One third of all schools are not submitting WASH in Schools data, impacting negatively on the overall analysis. Proactive efforts are needed to increase the data return rate.
2. In terms of assessing hygiene in schools, the availability of soap and running water should also be included as key indicators. Soap and water for handwashing are not reflected in Dapodik yet so additional questions may be required to get this information
3. There is a lack of understanding at the school level on the meaning of WinS indicators, especially those that are technical in nature. The quality of the data could be improved if those responsible for reporting Dapodik data completed an online training on how to report it. This is possible through the official WASH in Schools Guideline, which can be downloaded from the Dapodik website
4. WinS conditions in Indonesia are currently significantly below the targets set by the Government in Ministerial Regulation No. 24/2007. This publication may act as a reference for national and subnational planning and budgeting, and as a baseline for tracking progress against SDG 4.a.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	i
Kata Pengantar UNICEF Indonesia	iii
Infografik	iv
Ringkasan Eksekutif	vii
Executive Summary	xi
Daftar Isi	xiv
Daftar Gambar	xvii
Daftar Tabel	xvii
Daftar Grafik	xvii
Daftar Istilah dan Singkatan	xix
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Kebijakan Nasional	3
1.4 Komitmen Internasional	5
II. METODOLOGI	6
2.1 Definisi dan Konsep Sanitasi Sekolah	6
2.2 Indikator Sanitasi Sekolah	8
2.2.1 Akses Air Dasar	9
2.2.2 Akses Jamban Dasar	9
2.2.3 Akses Sarana Cuci Tangan Dasar	9
2.3 Sumber Data	10
2.4 Keterbatasan Data	10
III. GAMBARAN KONDISI SANITASI SEKOLAH	11
3.1 Kondisi Sanitasi Sekolah Di Sekolah Dasar	11
3.1.1 Akses Air Dasar	11
3.1.1.1 Menurut Provinsi	11
3.1.1.2 Menurut Status Sekolah	13
3.1.2 Akses Jamban Dasar	13
3.1.2.1 Menurut Provinsi	13
3.1.2.2 Menurut Status Sekolah	15
3.1.3 Akses Sarana Cuci Tangan Dasar	16
3.1.3.1 Menurut Provinsi	16
3.1.3.2 Menurut Status Sekolah	17

3.2 Kondisi Sanitasi Sekolah Di Sekolah Menengah Pertama	17
3.2.1 Akses Air Dasar	17
3.2.1.1 Menurut Provinsi	17
3.2.1.2 Menurut Status Sekolah	19
3.2.2 Akses Jamban Dasar	19
3.2.2.1 Berdasarkan Provinsi	19
3.2.2.2 Berdasarkan Status Sekolah	21
3.2.3 Akses Sarana Cuci Tangan Dasar	21
3.2.3.1 Menurut Provinsi	21
3.2.3.2 Menurut Status Sekolah	22
3.3 Kondisi Sanitasi Sekolah Di Sekolah Menengah Atas	23
3.3.1 Akses Air Dasar	23
3.3.1.1 Menurut Provinsi	23
3.3.1.2 Menurut Status Sekolah	25
3.3.2 Akses Jamban Dasar	25
3.3.2.1 Menurut Provinsi	25
3.3.2.2 Menurut Status Sekolah	27
3.3.3 Akses Sarana Cuci Tangan Dasar	27
3.3.3.1 Menurut Provinsi	27
3.3.3.2 Menurut Status Sekolah	28
3.4 Kondisi Sanitasi Sekolah Di Sekolah Menengah Kejuruan	29
3.4.1 Akses Air Dasar	29
3.4.1.1 Menurut Provinsi	29
3.4.1.2 Menurut Status Sekolah	31
3.4.2 Akses Jamban Dasar	31
3.4.2.1 Menurut Provinsi	31
3.4.2.2 Menurut Status Sekolah	33
3.4.3 Akses Sarana Cuci Tangan Dasar	33
3.4.3.1 Menurut Provinsi	33
3.4.3.2 Menurut Status Sekolah	34
3.5 Kondisi Sanitasi Sekolah Di Sekolah Luar Biasa	35
3.5.1 Akses Air Dasar	35
3.5.1.1 Menurut Provinsi	35
3.5.1.2 Menurut Status Sekolah	37
3.5.2 Akses Jamban Dasar	37
3.5.2.1 Menurut Provinsi	37
3.5.2.2 Menurut Status Sekolah	39
3.5.3 Akses Sarana Cuci Tangan Dasar	39
3.5.3.1 Menurut Provinsi	39
3.5.3.2 Menurut Status Sekolah	40

IV INDIKATOR DAN INDEKS SANITASI SEKOLAH	41
4.1 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sanitasi Sekolah	41
4.1.1 Akses Air	41
4.1.2 Akses Jamban	42
4.1.3 Akses Sarana Cuci Tangan	42
4.2 Indeks Sanitasi Sekolah	43
4.2.1 Indeks Sanitasi Sekolah untuk Sekolah Dasar	43
4.2.2 Indeks Sanitasi Sekolah untuk Sekolah Menengah Pertama	45
4.2.3 Indeks Sanitasi Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas	46
4.2.4 Indeks Sanitasi Sekolah untuk Sekolah Menengah Kejuruan	47
4.2.5 Indeks Sanitasi Sekolah untuk Sekolah Luar Biasa	48
4.2.6 Indeks Sanitasi Sekolah Semua Jenjang	49
V. KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Rekomendasi	52
LAMPIRAN 1. Rumus Analisa Indikator Sanitasi Sekolah	53
LAMPIRAN 2. Tangga Pelayanan Sanitasi Sekolah	55
LAMPIRAN 3. Indikator Akses Air	57
LAMPIRAN 4. Indikator Akses Jamban	63
LAMPIRAN 5. Indikator Akses Cuci Tangan	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Konsep Sanitasi Sekolah	6
Gambar 2.2	Diagram Alur Hubungan Antara Input, Output, Outcome dan Impact	7
Gambar 2.3	Tangga Pelayanan Sanitasi Sekolah Berdasarkan SDGs	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Standar Sanitasi Nasional Sekolah dan Madrasah	4
Tabel 2.1	Persentase Sekolah yang Tidak Mengisi Data Jamban	10
Tabel 4.1	Indikator Akses Air pada Semua Jenjang Pendidikan	41
Tabel 4.2	Indikator Akses Jamban pada Semua Jenjang Pendidikan	42
Tabel 4.3	Indikator Akses Sarana Cuci Tangan pada Semua Jenjang Pendidikan	43
Tabel 4.4	Indeks Sanitasi Sekolah Jenjang SD Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	44
Tabel 4.5	Indeks Sanitasi Sekolah Jenjang SMP Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	45
Tabel 4.6	Indeks Sanitasi Sekolah Jenjang SMA Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	46
Tabel 4.7	Indeks Sanitasi Sekolah Jenjang SMK Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	47
Tabel 4.8	Indeks Sanitasi Sekolah Jenjang SLB Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	48
Tabel 4.9	Indeks Sanitasi Sekolah Semua Jenjang Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	50

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Gambaran Kondisi Jamban SD di Indonesia Tahun 2016/2017	3
Grafik 3.1	Akses Air Dasar Pada SD Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	12
Grafik 3.2	Sumber Air Pada SD Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	13
Grafik 3.3	Akses Jamban Dasar Pada SD Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	14
Grafik 3.4	Kondisi Jamban Pada SD Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	15
Grafik 3.5	Sarana Cuci Tangan Pada SD Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	16
Grafik 3.6	Sarana Cuci Tangan Pada SD Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	17
Grafik 3.7	Akses Air Dasar Pada SMP Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	18
Grafik 3.8	Sumber Air Pada SMP Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	19
Grafik 3.9	Akses Jamban Dasar Pada SMP Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	20
Grafik 3.10	Kondisi Jamban Pada SMP Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	21
Grafik 3.11	Sarana Cuci Tangan Pada SMP Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	22
Grafik 3.12	Sarana Cuci Tangan Pada SMP Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	22

Grafik 3.13 Akses Air Dasar Pada SMA Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	24
Grafik 3.14 Sumber Air Pada SMA Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	25
Grafik 3.15 Akses Jamban Dasar Pada SMA Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	26
Grafik 3.16 Kondisi Jamban Pada SMA Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	27
Grafik 3.17 Sarana Cuci Tangan Pada SMA Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	28
Grafik 3.18 Sarana Cuci Tangan Pada SMA Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	28
Grafik 3.19 Akses Air Dasar Pada SMK Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	30
Grafik 3.20 Sumber Air Pada SMK Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	31
Grafik 3.21 Akses Jamban Dasar Pada SMK Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	32
Grafik 3.22 Kondisi Jamban Pada SMK Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	33
Grafik 3.23 Sarana Cuci Tangan Pada SMK Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	34
Grafik 3.24 Sarana Cuci Tangan Pada SMK Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	34
Grafik 3.25 Akses Air Dasar Pada SLB Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	36
Grafik 3.26 Sumber Air Pada SLB Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	37
Grafik 3.27 Akses Jamban Dasar Pada SLB Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	38
Grafik 3.28 Kondisi Jamban Pada SLB Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	39
Grafik 3.29 Sarana Cuci Tangan Pada SLB Menurut Provinsi Tahun 2016/2017	40
Grafik 3.30 Sarana Cuci Tangan Pada SLB Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017	40

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

BOS	Bantuan Operasional Sekolah
CTPS	Cuci Tangan Pakai Sabun
Dapodik	Data Pokok Pendidikan
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI	Daerah Khusus Ibukota
EMIS	Education Management Information System
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MKM	Manajemen Kebersihan Menstruasi
MTs	Madrasah Tsanawiyah
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
PAM	Perusahaan Air Minum
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PHBS	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
RAPBS	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
RKS	Rencana Kerja Sekolah
SD	Sekolah Dasar
SDGs	Sustainable Development Goals
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMALB	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SNP	Standar Nasional Pendidikan
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UKS/M	Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	United Nations Children's Fund
WASH	Water, Sanitation and Hygiene
WC	Water Closet
WHO	World Health Organization



PROFIL SANITASI SEKOLAH TAHUN 2017



I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Semua anak Indonesia berhak untuk mendapatkan akses pada lingkungan yang aman, bersih dan sehat di sekolah. Ketersediaan akses pada Sanitasi Sekolah merupakan prasyarat terciptanya lingkungan sekolah yang aman, bersih dan sehat. Sayangnya, hingga saat ini, Sanitasi Sekolah belum menjadi isu prioritas bersama yang perlu mendapatkan perhatian.

Sanitasi sekolah merupakan langkah awal mewujudkan lingkungan belajar yang sehat. Namun tidak semua sekolah di Indonesia sudah memperhatikan kesehatan lingkungan sekolah. Padahal buruknya fasilitas sanitasi di sekolah dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, seperti hilangnya waktu belajar dan menurunkan produktivitas siswa. Rendahnya kesadaran untuk menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah yang tidak mengalokasikan dana untuk operasional dan perawatan menimbulkan kondisi jamban yang tidak terurus sehingga dapat menjadi sumber penyebaran penyakit diare dan demam berdarah. Dengan adanya tempat berkembangnya vektor penyakit seperti itu di sekolah, maka siswa menjadi rentan untuk terkena penyakit dan hal ini merugikan bagi siswa yang terpaksa absen dari sekolah akibat sakit.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

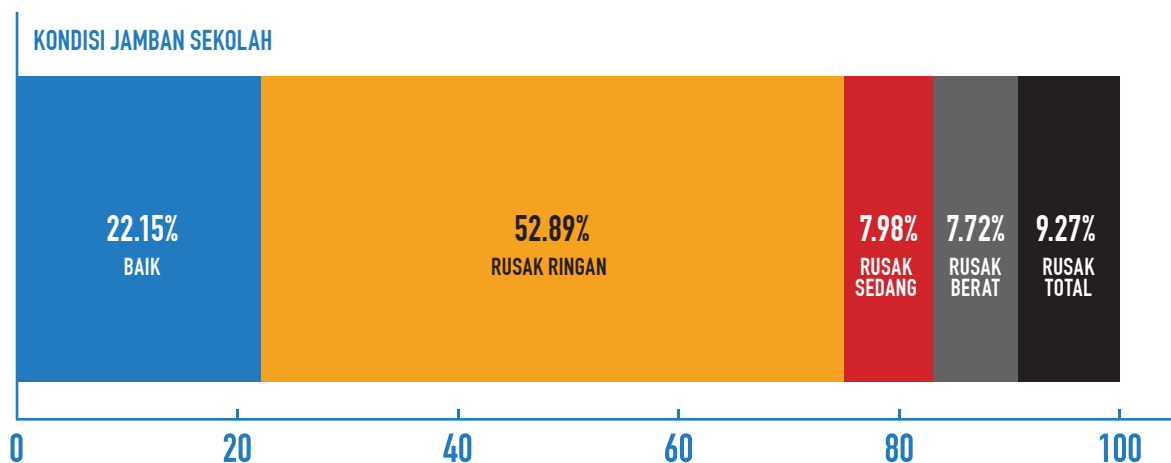
Kenapa Sanitasi Sekolah penting? Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di tingkat global, ketersediaan Sanitasi Sekolah yang memadai akan memberikan dampak yang luar biasa pada beberapa indikator utama dalam pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, ekonomi serta air dan sanitasi. Pada sektor kesehatan, kegiatan sederhana, seperti cuci tangan dengan sabun dapat menurunkan resiko terkena penyakit diare hingga 47%.¹ Anak-anak yang sehat dan terhindar penyakit diare tentunya meningkatkan akses pendidikan. Misalnya pembiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) secara rutin dapat menurunkan angka ketidakhadiran secara signifikan hingga 50%.²

Kecenderungan masalah yang muncul adalah sekolah memiliki jamban namun kondisinya tidak terawat karena keterbatasan air. Berdasarkan data Dapodik tahun 2016, terlihat bahwa 30,52% sekolah tidak memiliki sumber air atau kalau pun ada sumber air tersebut tidak layak dari segi kesehatan, seperti berasal dari sungai, mata air tidak terlindungi atau sumber air permukaan.

1 Freeman et al (2014) Systematic Review: Hygiene and health: Systematic review of handwashing practices worldwide and update of health effects, *Tropical Medicine and International Health*, Vol 19 No. 8 p906-916

2 O'Reilly et. Al. The impact of a school-based safe water and hygiene programme on knowledge and practices of students and their parents: Nyanza Province, Western Kenya, 2006', *Epidemiology and Infection*, 136(1), pp. 80-91.

Dengan demikian, kondisi jamban di sekolah juga masih jauh dari memadai. Hanya 65% sekolah yang memiliki jamban, menyediakan jamban secara terpisah antara laki-laki dan perempuan dan hanya 22% yang jambannya dalam keadaan baik. Jika dibandingkan dengan peraturan yang ada, rasio jamban juga masih jauh dari ideal.



Grafik 1.1 Gambaran Kondisi Jamban SD di Indonesia Tahun 2016/2017

Selain itu, dengan minimnya sumber air di sekolah, maka masalah dalam menjaga kebersihan diri anak juga dapat timbul, karena anak jadi tidak bisa melakukan cuci tangan pakai sabun. Tiga point utama permasalahan inilah, yakni air, jamban dan sarana cuci tangan pakai sabun yang akan dibahas dalam analisis kondisi Sanitasi Sekolah.

1.3. KEBIJAKAN NASIONAL

Perhatian terhadap kesehatan lingkungan sekolah, termasuk didalamnya Sanitasi Sekolah merupakan amanat undang-undang, khususnya Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 79 menyatakan "Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas."

Di tingkat nasional terdapat kesepakatan bersama 4 Menteri yang tertuang dalam peraturan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah atau UKS/M. Dalam peraturan bersama tersebut disebutkan bahwa tujuan UKS/M adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan presetasi belajar peserta didik dengan meningkatkan PHBS dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Di dalam peraturan bersama itu juga terdapat tiga pilar UKS/M yakni pendidikan sehat, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat. Sanitasi sekolah berkaitan dengan dua pilar UKS/M yakni pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat. Oleh karena itu, pada prinsipnya Sanitasi Sekolah terdiri dari tiga komponen utama yakni, pertama infrastruktur sarana prasarana air dan sanitasi yang layak, berfungsi dan terpelihara dengan baik. Kedua, pengetahuan dan kebiasaan melakukan PHBS. Ketiga, sekolah menerapkan manajemen sanitasi berbasis sekolah untuk memastikan biaya operasional dan perawatan terkait fasilitas sanitasi sekolah tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana SD/MI, SMP/ MTs, SMA/MA, standar terkait Sanitasi Sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Standar Sanitasi Nasional Sekolah dan Madrasah

KOMPONEN SANITASI SEKOLAH	STANDAR
Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air harus tersedia 2. Tempat air dalam jamban, volume minimum 200 liter dan berisi air bersih
Sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jamban untuk buang air besar dan buang air kecil 2. Rasio Jamban Sekolah <ul style="list-style-type: none"> * Sekolah Dasar : Laki-laki 1:60, Perempuan 1:50 * Sekolah Menengah Pertama : Laki-laki 1:40, Perempuan 1:30 * Sekolah Menengah Atas : Laki-laki 1:40, Perempuan 1:30 3. Luas minimum per unit jamban adalah 2 m² 4. Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan 5. Tersedia air bersih di setiap unit jamban 6. Jamban kloset jongkok dengan leher angsa 7. Gayung 8. Gantungan pakaian 9. Tempat sampah
Cuci Tangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 unit Sarana Cuci tangan untuk setiap ruang kelas 2. 1 unit Sarana Cuci tangan untuk ruang guru 3. 1 unit Sarana Cuci tangan untuk Ruang UKS/M



1.4. KOMITMEN INTERNASIONAL

Pada tingkat global, sanitasi sekolah juga merupakan salah satu prioritas pembangunan yang termasuk ke dalam SDGs (Sustainable Development Goals) tujuan 4a. Tujuan 4a adalah “Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang cacat dan jender, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua”. Lebih rinci lagi pada tujuan 4a1 dinyatakan “Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa difabel, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan”. Sejalan dengan tujuan SDGs, maka Sanitasi Sekolah terdiri dari akses air, akses jamban atau toilet, dan sarana cuci tangan.

II. METODOLOGI

2.1 DEFINISI DAN KONSEP SANITASI SEKOLAH

Apa yang dimaksud dengan Sanitasi Sekolah? Sebuah sekolah dapat dikatakan menerapkan Sanitasi Sekolah yang baik apabila dapat sekolah tersebut dapat memenuhi tiga aspek yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pertama, sekolah memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, terutama akses pada sarana air bersih yang aman dari pencemaran, sarana sanitasi (jamban) yang berfungsi dan terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan, serta fasilitas cuci tangan pakai sabun. Kedua, sekolah melaksanakan kegiatan pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sekolah, seperti kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) secara rutin dan memastikan pelaksanaan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) secara konsisten. Ketiga, adanya dukungan manajemen sekolah untuk mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan sarana sanitasi dan biaya kegiatan PHBS.



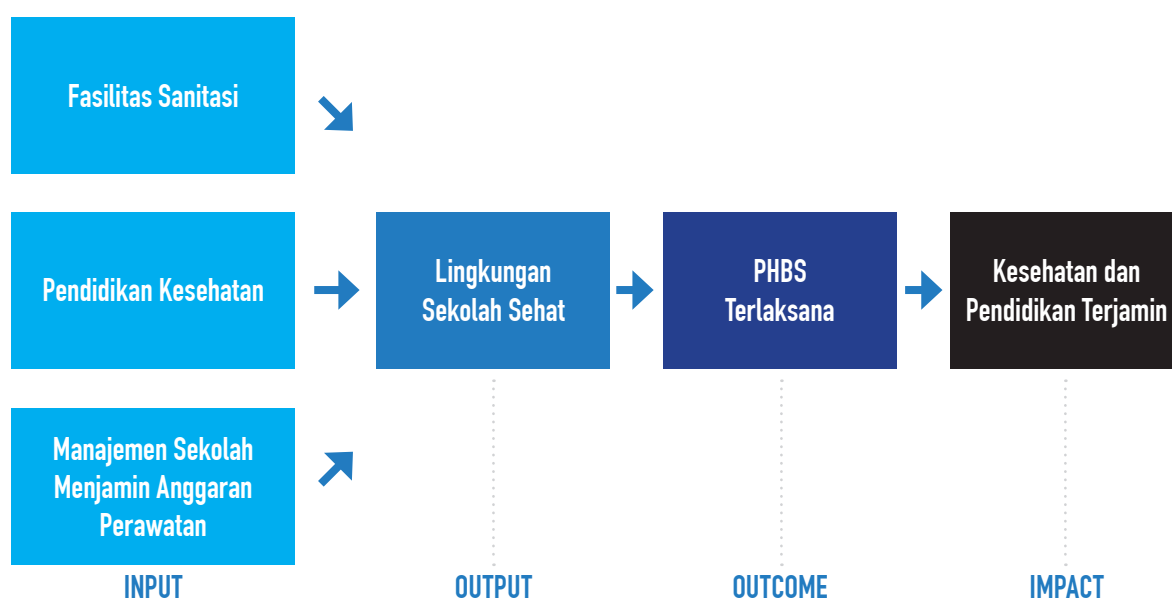
Gambar 2.1 Konsep Sanitasi Sekolah

Komponen sarana prasarana Sanitasi Sekolah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah. Standar Sarana dan Prasarana ini merupakan salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang harus dipenuhi berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Berdasarkan Standar Sarana Prasarana tersebut, menyebutkan standar kebutuhan sarana sanitasi yang harus ada di sekolah. Untuk SD sekurang-kurangnya memiliki tiga unit jamban. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik perempuan dan 1 unit jamban untuk guru. Sedangkan untuk SMP sekurang-kurangnya memiliki jamban setidaknya tiga unit. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 30 peserta didik perempuan dan 1 unit jamban untuk guru. Luas minimum jamban adalah 2 m² serta tersedia air bersih di setiap unit jamban. Jamban harus ber dinding, beratap, dapat dikunci dan mudah dibersihkan.

Komponen pendidikan kesehatan dan PHBS dalam program sanitasi sekolah dapat dijalankan dengan memberikan pengetahuan kesehatan kepada siswa serta menerapkan kebiasaan PHBS di lingkungan sekolah. Pembelajaran PHBS yang dapat disampaikan di sekolah terdiri dari cuci tangan pakai sabun, membuang sampah pada tempatnya, air minum yang aman, gosok gigi secara rutin serta manajemen kebersihan menstruasi.

Komponen manajemen sanitasi berbasis sekolah merupakan upaya menjamin kebersihan jamban dan pengelolaan sanitasi di sekolah yang berkelanjutan. Sekolah sebaiknya menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan memasukkan biaya operasional serta perawatan Sanitasi Sekolah ke dalam rencana anggaran penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sekolah juga diharapkan dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan dan perencanaan pengembangan sanitasi sekolah.

Apabila digambarkan dalam diagram, maka ketiga konsep komponen sanitasi sekolah diatas akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.2 Diagram Alur Hubungan Antara Input, Output, Outcome dan Impact

Program Sanitasi Sekolah yang disosialisasikan selama ini adalah meningkatkan kepedulian sekolah pada sanitasi dan penyehatan lingkungan sekolah, memobilisasi sumber daya untuk mengamankan kesehatan siswa, sekarang dan untuk generasi mendatang. Selain itu Sanitasi Sekolah juga melibatkan pemangku kebijakan di tingkat global, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendukung program Sanitasi Sekolah. Dalam skala global, program sanitasi sekolah terbagi menjadi tiga indikator yakni, air, sanitasi (spesifik mengenai jamban) dan kebersihan (spesifik mengenai cuci tangan pakai sabun).

2.2 INDIKATOR SANITASI SEKOLAH

Seperti digambarkan pada tabel di bawah ini mengenai tiga indikator tersebut dan tingkatannya, maka diharapkan negara yang terlibat dalam SDGs dapat memenuhi tingkatan pelayanan dasar pada 2030. Namun, apabila sudah bisa mencapai pelayanan tingkat lanjut, merupakan hal yang sangat diapresiasi. Untuk Indonesia, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24/2007 tentang Standar Sarana Prasarana SD/MI, SMP/ MTs, SMA/ MA sudah tertulis secara jelas mengenai rasio minimal jamban untuk siswa laki-laki dan perempuan pada setiap jenjang sekolah, baik itu SD/MI maupun SMP/MTs dan SMA/MA. Apabila Indonesia mau menggunakannya sebagai definisi pelayanan tingkat lanjut, maka data yang disediakan oleh Dapodik dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menganalisa untuk menganalisa pelayanan tingkat lanjut, khususnya akses pada sanitasi di sekolah disekolah.

AIR	SANITASI	KEBERSIHAN
Pelayanan Tingkat Lanjut Ditentukan tingkat Nasional	Pelayanan Tingkat Lanjut Ditentukan tingkat Nasional	Pelayanan Tingkat Lanjut Ditentukan tingkat Nasional
Pelayanan Dasar Air minum dari sumber yang layak dan tersedia di sekitar sekolah	Pelayanan Dasar Fasilitas yang layak, terpisah berdasarkan jenis kelamin dan dapat digunakan di sekolah	Pelayanan Dasar Sarana CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) lengkap dengan air yang mengalir dan sabun
Pelayanan Terbatas Ada sumber air layak (air perpipaan, sumur/mata air terlindungi, penampungan air hujan, air dalam kemasan), namun air tidak tersedia pada saat survei	Pelayanan Terbatas Ada sarana sanitasi yang layak (WC sentor, cubluk dengan tutup, jamban komposting), namun tidak terpisah berdasarkan jenis kelamin dan tidak dapat digunakan	Pelayanan Terbatas Sarana cuci tangan dengan air namun tidak tersedia sabun
Tidak Tersedia Tidak ada sumber air atau sumber air tidak layak (sumur/mata air tidak terlindungi, air tangkap dan sumber air permukaan)	Tidak Tersedia Tidak ada jamban atau jamban tidak layak (cubluk tanpa penutup, jamban menggantung dan buang air disembarang tempat)	Tidak Tersedia Tidak ada sarana cuci tangan di sekolah, atau ada sarana cuci tangan tapi tidak tersedia air

Gambar 2.3 Tangga Pelayanan Sanitasi Sekolah Berdasarkan SDGs

Berdasarkan dokumen *Core questions and indicators for monitoring WASH in Schools in the Sustainable Development Goals* yang diterbitkan oleh UNICEF dan WHO Tahun 2016³, mendefinisikan akses pada Sanitasi Sekolah ke dalam empat tingkatan, yaitu, tidak tersedia akses, pelayanan terbatas, pelayanan dasar, dan pelayanan tingkat lanjut. Jenis akses itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu akses pada sumber air minum layak dan tersedia sepanjang waktu, akses pada fasilitas sanitasi dasar yang layak dan terpisah, dan akses pada fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Sebenarnya terdapat perhitungan indikator yang lebih rinci untuk akses air, sanitasi (jamban), dan sarana cuci tangan. Namun dalam buku ini dibatasi pembahasan lebih lanjut sembilan indikator di atas yakni tiga indikator akses, yaitu akses pada air, jamban dan sarana cuci tangan. Pada setiap indikator, dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tidak tersedia, pelayanan terbatas dan akses dasar. Definisi operasional setiap indikator diuraikan dibawah ini.

2.2.1 AKSES AIR DASAR

Sekolah dengan akses air dasar adalah sekolah dengan sumber air yang layak. Sumber air yang layak adalah ledeng/PAM, sumur pompa, air hujan, mata air terlindungi, sumur terlindungi, dan air kemasan. Selain itu, akses dasar juga mensyaratkan bahwa sumber air yang layak tersedia disekitar lingkungan sekolah dan cukup atau tersedia sepanjang waktu. Sedangkan akses air terbatas adalah sekolah yang memiliki akses pada sumber air yang layak dan masih terdapat di lingkungan sekolah, namun air tidak selalu tersedia sepanjang waktu. Tangga akses air paling rendah adalah sekolah yang tidak ada sumber airnya atau ada sumber air, namun sumber air tersebut dikategorikan tidak layak. Sumber air yang dikategorikan tidak layak adalah sumur tidak terlindungi, mata air tidak terlindungi, dan sumber air permukaan seperti sungai dan danau.

2.2.2 AKSES JAMBAAN DASAR

Sekolah dengan akses jamban dasar adalah sekolah dengan jamban atau toilet yang layak, terpisah berdasarkan jenis kelamin dan dapat digunakan. Jamban atau toilet yang layak yaitu apabila jamban atau toilet yang dipakai adalah leher angsa, dan cubluk dengan tutup. Sedangkan akses jamban yang terbatas apabila sekolah memiliki sarana sanitasi yang layak, misalnya WC sentor dan cubluk dengan tutup, namun tidak terpisah berdasarkan jenis kelamin dan tidak dapat digunakan. Sekolah yang disebut sebagai sekolah yang tidak memiliki akses jamban apabila tidak tersedia sarana jamban atau toilet di sekolah tersebut sehingga siswa dan guru melakukan praktik buang air di sembarang tempat. Sekolah juga disebut sebagai sekolah yang tidak tersedia akses apabila memiliki jamban namun kondisinya tidak layak karena berjenis cubluk tanpa penutup, jamban menggantung.

2.2.3 AKSES SARANA CUCI TANGAN DASAR

Sekolah dengan akses pada sarana cuci tangan adalah sekolah yang memiliki sarana cuci tangan. Sedangkan tidak ada akses apabila sekolah tersebut tidak memiliki sarana cuci tangan, atau ada sarana cuci tangan tapi tidak tersedia air

³ Core questions and indicators for monitoring WASH in Schools in the Sustainable Development Goals" (UNICEF and World Health Organization 2016)

2.3 SUMBER DATA

Sumber data yang dipakai dalam publikasi ini adalah data yang dikumpulkan melalui aplikasi Dapodik pada semester genap Tahun 2016. Data yang dipakai menggunakan versi terakhir yaitu cut off pada Bulan Oktober 2016.

2.4 KETERBATASAN DATA

Dalam analisis Sanitasi Sekolah ini terdapat keterbatasan data yang diambil dari Dapodik. Meskipun secara keseluruhan data Dapodik yang masuk hampir mencapai 100%, terdapat sekitar 32 persen sekolah di berbagai tingkatan tidak mengisi data jamban di sekolah. Ada beberapa alasan yang diperkirakan menjadi alasan sekolah tidak mengisi data jamban, antara lain karena keterbatasan informasi bagaimana pengisian data Sanitasi Sekolah yang benar. Untuk mengatasi hal itu, Dapodik bekerjasama dengan UNICEF menyusun Panduan Pengisian Data Sanitasi Sekolah⁴. Melalui panduan ini, diharapkan para operator Dapodik memiliki acuan untuk mengisi data dengan benar. Selain itu, Dapodik juga merubah kolom Sanitasi Sekolah dalam aplikasi Dapodik menjadi kolom yang wajib untuk diisi. Namun perubahan ini baru dapat dilihat hasilnya pada pengumpulan data Dapodik Tahun 2017.

Tabel 2.1 Persentase Sekolah yang Tidak Mengisi Data Jamban

NO.	TINGKATAN SEKOLAH	PERSENTASE TIDAK MENGISI DATA
1.	SD	29,12
2.	SMP	24,37
3.	SMA	32,06
4.	SMK	38,15
5.	SLB (SDLB, SMPLB, SMALB)	36,18

⁴ Panduan Pengisian Data Sanitasi Sekolah Dalam Aplikasi Dapodik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan UNICEF dapat diakses pada <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/berita/panduan-pengisian-data-sanitasi-sekolah-pada-aplikasi-dapodik>

III. GAMBARAN KONDISI SANITASI SEKOLAH

Gambaran kondisi Sanitasi Sekolah yang disajikan dalam bab ini adalah indikator akses air, jamban dan sarana cuci tangan menurut jenjang pendidikan. Pada setiap jenjang pendidikan, indikator-indikator ini akan dipilah lagi menurut provinsi dan tipe sekolah. Secara berurutan, jenjang pendidikan yang digambarkan adalah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Adapun pemilahan pada setiap indikator di setiap jenjang menurut provinsi, yaitu 34 provinsi dan menurut status sekolah, yaitu negeri dan swasta.

3.1 KONDISI SANITASI SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR

Gambaran kondisi Sanitasi Sekolah di Sekolah Dasar dipilih berdasarkan, akses air, akses jamban dan akses pada sarana cuci tangan.

3.1.1 AKSES AIR DASAR

Analisa akses air dasar di Sekolah Dasar dipisahkan menurut provinsi dan tipe sekolah, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta.

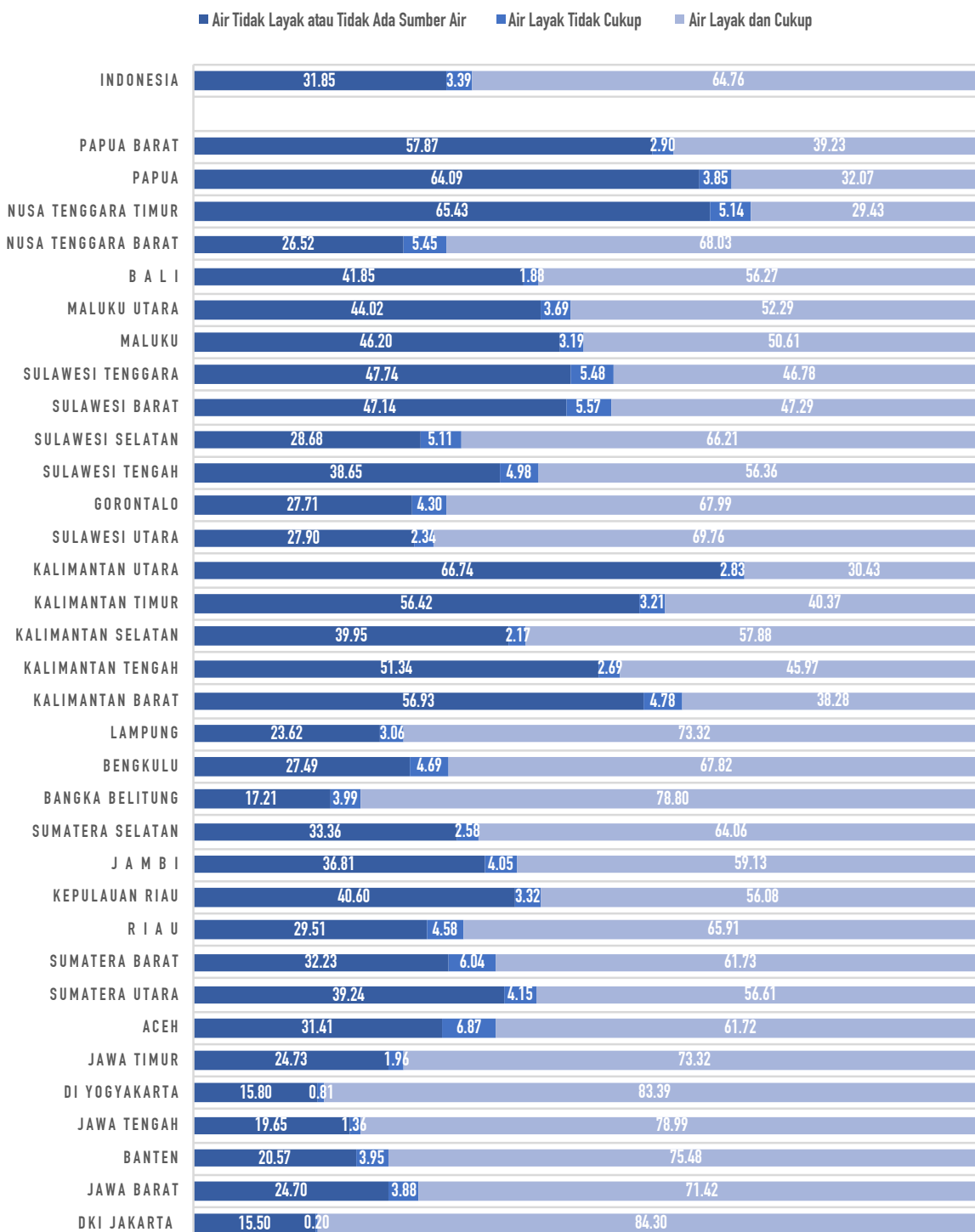
3.1.1.1 Menurut Provinsi

Persentase sekolah dasar yang memiliki rata-rata akses air layak dan cukup di Indonesia 64,76%.

Wilayah di Indonesia yang masuk dalam indikator sekolah dengan fasilitas air layak dan cukup tersebar di seluruh pulau Jawa (6 provinsi), Bali, 3 provinsi di Sumatera (Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung), Sulawesi Utara dan NTB.

Sebanyak 31,85% sekolah dasar di Indonesia tidak memiliki akses air layak atau bahkan tidak ada sama sekali. Provinsi yang paling tinggi jumlah persentase sekolah dasar dengan akses air tidak layak atau tidak ada sumber air sebagian besar berada di tengah dan timur Indonesia. Misalnya di provinsi Kalimantan Utara (66,74%), NTT (65,43%), Papua (64,09%). Provinsi tersebut dapat menjadi lokasi untuk program prioritas intervensi terkait ketersediaan air di sekolah.

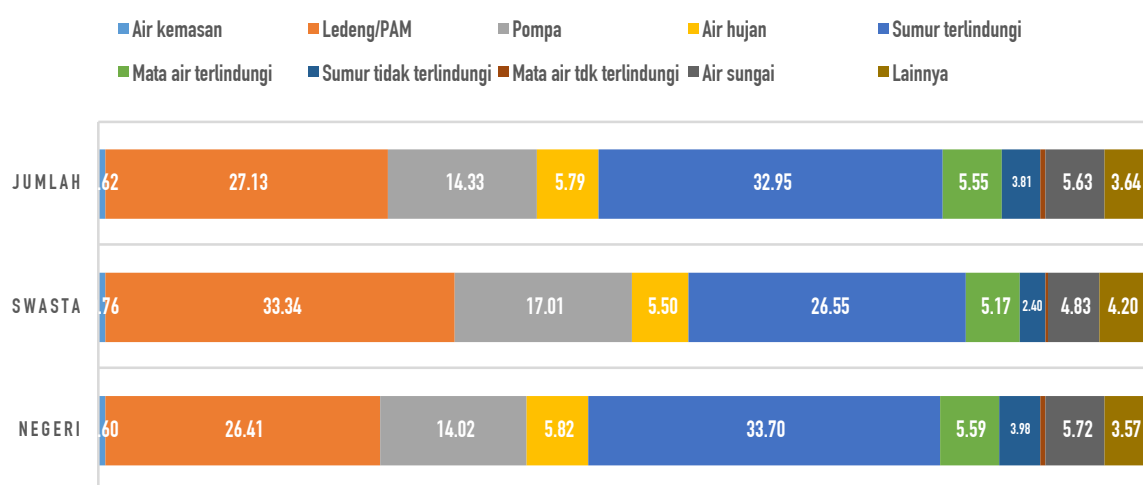




Grafik 3.1 Akses Air Dasar Pada SD Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

3.1.1.2 Menurut Status Sekolah

Dari segi persentase, antara sekolah negeri dan sekolah swasta tidak berbeda jauh. Akses air di sekolah negeri paling banyak berasal dari sumur terlindungi sebesar 33,7%. Sedangkan sekolah swasta paling banyak mengandalkan Perusahaan Air Minum (PAM) sebagai sumber airnya yakni sebesar 33,34%. Hal ini berarti perlu ada dukungan alokasi dana untuk membayar rekening PAM. Menariknya sekitar 5,72% sekolah dasar negeri dan 4,83% sekolah dasar swasta masih menggunakan air sungai sebagai sumber air di sekolah. Hal ini menggambarkan bahwa masih ada sekitar tujuh ribuan sekolah dasar yang memiliki akses air tidak aman.



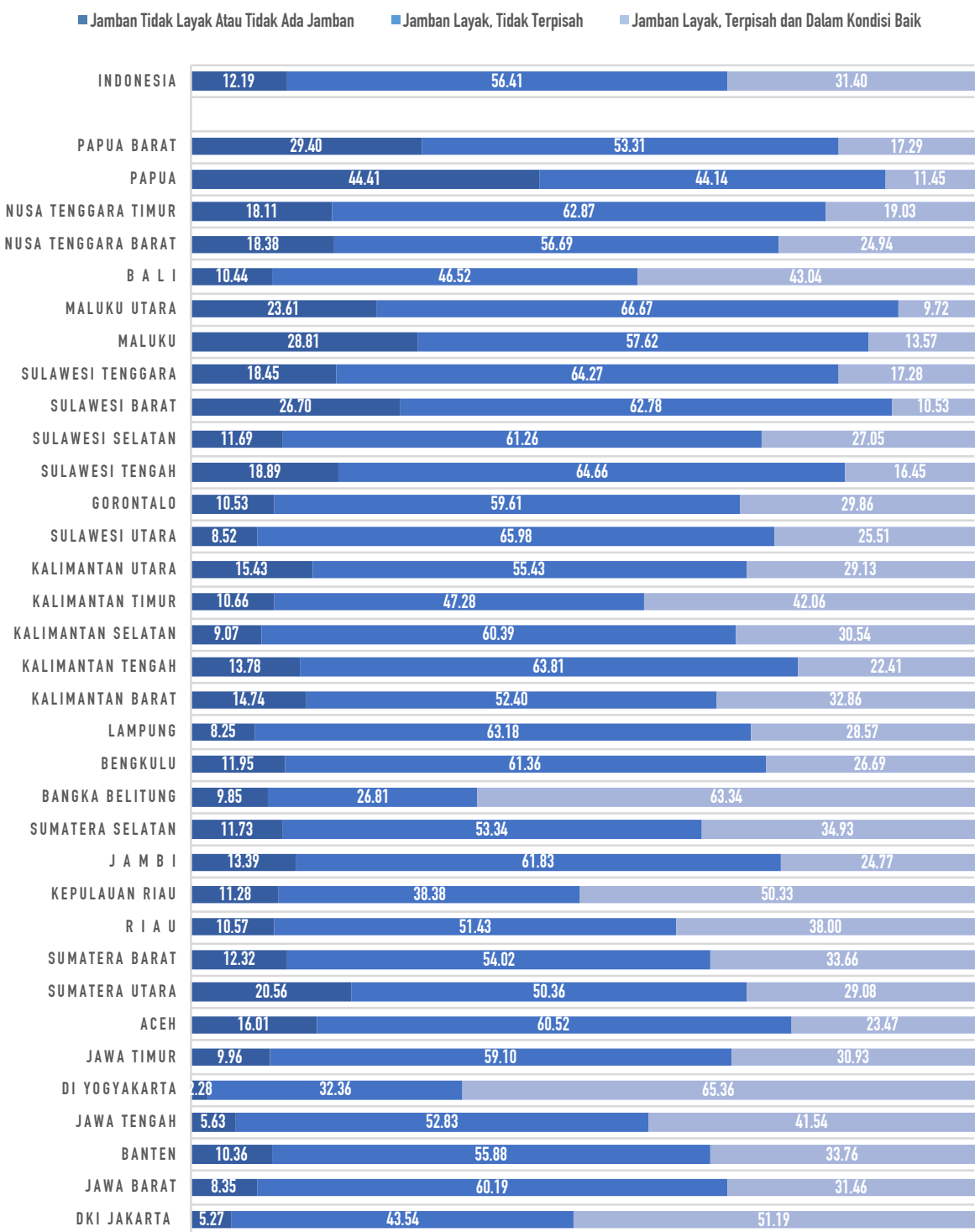
Grafik 3.2 Sumber Air Pada SD Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

3.1.2 AKSES JAMBAAN DASAR

Akses jamban di Sekolah Dasar dapat dianalisa berdasarkan dua hal, yaitu akses jamban menurut provinsi dan akses jamban menurut status sekolah, sekolah swasta dan negeri.

3.1.2.1 Menurut Provinsi

Secara nasional hanya 1 dari 3 Sekolah Dasar yang memiliki jamban layak dan terpisah. Yang dimaksud dengan jamban layak adalah memenuhi standard kesehatan, dengan tipe WC duduk/jongkok/leher angsa, cubluk dengan tutup, dan jamban komposting. Selebihnya, 2 dari 3 Sekolah Dasar di Indonesia memiliki jamban layak namun tidak terpisah, atau memiliki jamban namun tidak layak, atau bahkan tidak memiliki jamban sama sekali. Yang disebutkan jamban tidak layak adalah tipe cubluk tanpa penutup, jamban menggantung dan buang air besar sembarang tempat.



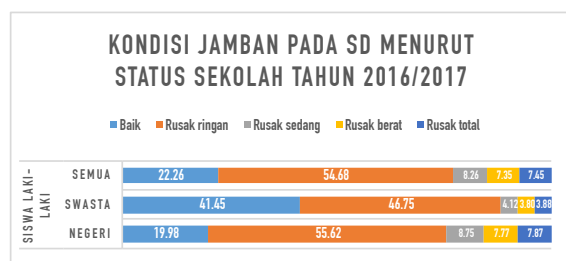
Grafik 3.3 Akses Jamban Dasar Pada SD Menurut Provinsi Tahun 2016/2017



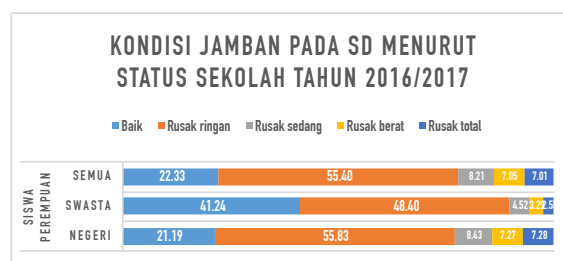
Secara nasional 12,19% sekolah dasar tidak memiliki jamban atau kalau pun ada kondisinya tidak layak. Menariknya dua provinsi di Jawa yakni Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak (sekitar 60%) yang sekolah dasarnya di wilayah tersebut memiliki jamban yang layak, namun tidak terpisah. Selanjutnya masih ada enam provinsi yang lebih dari dua pertiga jumlah SD diwilayahnya tidak memiliki jamban atau kondisi jambannya tidak layak. Provinsi tersebut tiga berada di pulau Sulawesi (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara) dan satu di Timur Indonesia (Maluku Utara) serta satu di pulau Sumatera (Lampung) dan satu di pulau Kalimantan (Kalimantan Tengah).

3.1.2.2 Menurut Status Sekolah

Secara umum, kondisi jamban baik bagi laki-laki maupun perempuan di Sekolah Dasar swasta jauh lebih baik kondisinya dibandingkan dengan Sekolah Dasar Negeri. Sebanyak 41,45% Sekolah Dasar Swasta memiliki jamban dalam kondisi baik, dibandingkan dengan Sekolah Dasar Negeri yang hanya 19,98% saja. Begitu juga dengan kondisi jamban sekolah bagi perempuan. Sebanyak 43,45% Sekolah Dasar Swasta memiliki jamban perempuan dalam kondisi yang baik, sedangkan jamban perempuan di Sekolah Dasar Negeri yang dalam kondisi baik hanya 21,19% saja. Umumnya, jamban yang kondisinya rusak ringan masih dapat dipergunakan untuk buang air kecil atau buang air besar. Untuk memastikan semua sekolah memiliki jamban dalam kondisi yang baik, maka pihak pengelola sekolah harus mengalokasikan dana BOS untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan sarana jamban sekolah. Sehingga jamban dapat tetap dalam kondisi yang baik, berfungsi dan dapat dipergunakan oleh peserta didik.



JAMBAN LAKI-LAKI MENURUT KONDISI



JAMBAN PEREMPUAN MENURUT KONDISI

Grafik 3.4 Kondisi Jamban Pada SD Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

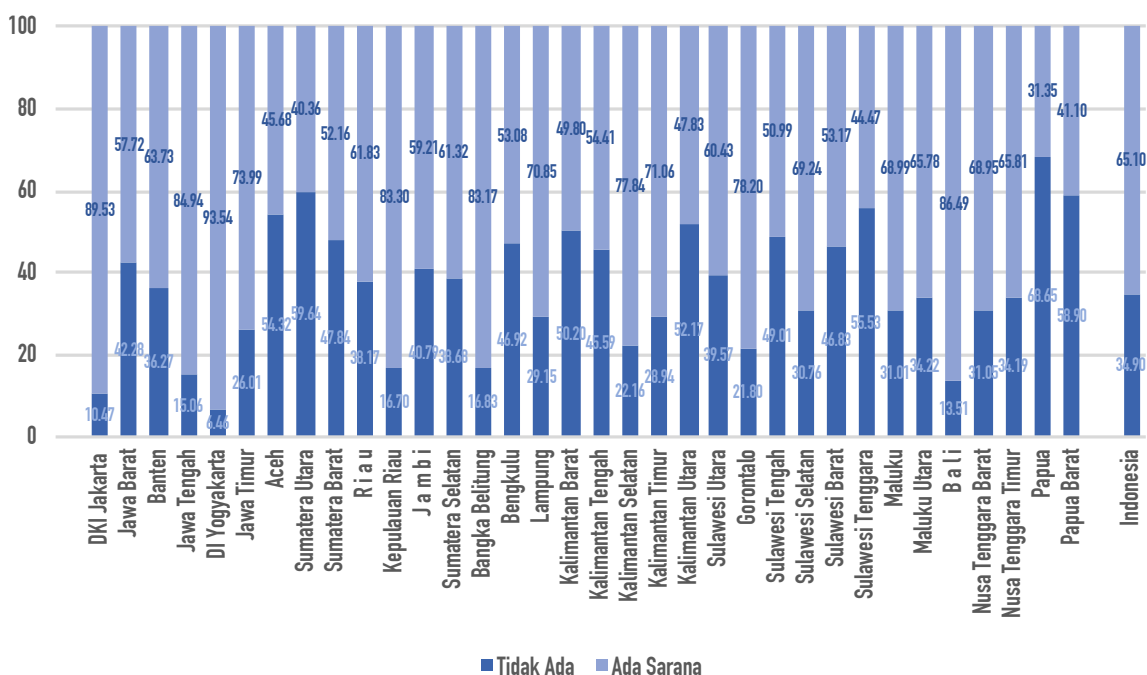


3.1.3 AKSES SARANA CUCI TANGAN DASAR

Akses sarana Cuci Tangan di Sekolah Dasar dapat dianalisa berdasarkan dua hal, yaitu akses sarana cuci tangan menurut provinsi dan akses sarana cuci tangan menurut status sekolah, sekolah swasta dan negeri.

3.1.3.1 Menurut Provinsi

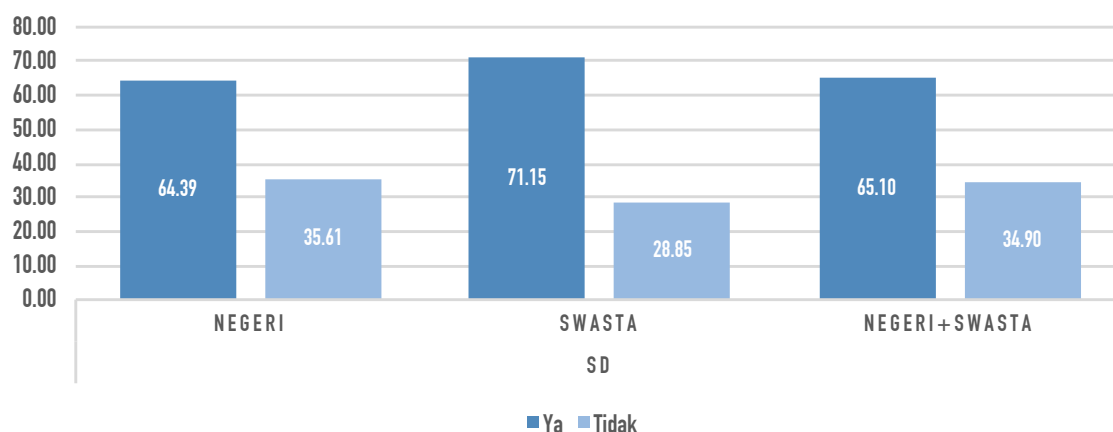
Sebanyak 65,1% Sekolah Dasar di Indonesia yang memiliki tempat cuci tangan. Papua menjadi provinsi yang paling banyak sekolah dasarnya tidak memiliki tempat cuci tangan. Berikut 7 provinsi yang sekolah dasarnya terbanyak (di atas 50%) tidak memiliki sarana cuci tangan, Papua (68,6%), Sumatera Utara (59,6%), Papua Barat (58,9%), Sulawesi Tenggara (55,5%), Aceh (54,3%), Kalimantan Utara (52,2%), Kalimantan Barat (50,2%).



Grafik 3.5 Sarana Cuci Tangan Pada SD Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

3.1.3.2 Menurut Status Sekolah

Antara Sekolah Dasar Negeri dan swasta memiliki perbedaan yang signifikan untuk ketersediaan sarana cuci tangan. Persentase Sekolah Dasar Swasta yang memiliki sarana cuci tangan mencapai 71,15% sedangkan Sekolah Dasar Negeri hanya mencapai 64,39%. Rerata persentase Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta yang tidak memiliki sarana cuci tangan mencapai 34,9%.



Grafik 3.6 Sarana Cuci Tangan Pada SD Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

3.2 KONDISI SANITASI SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

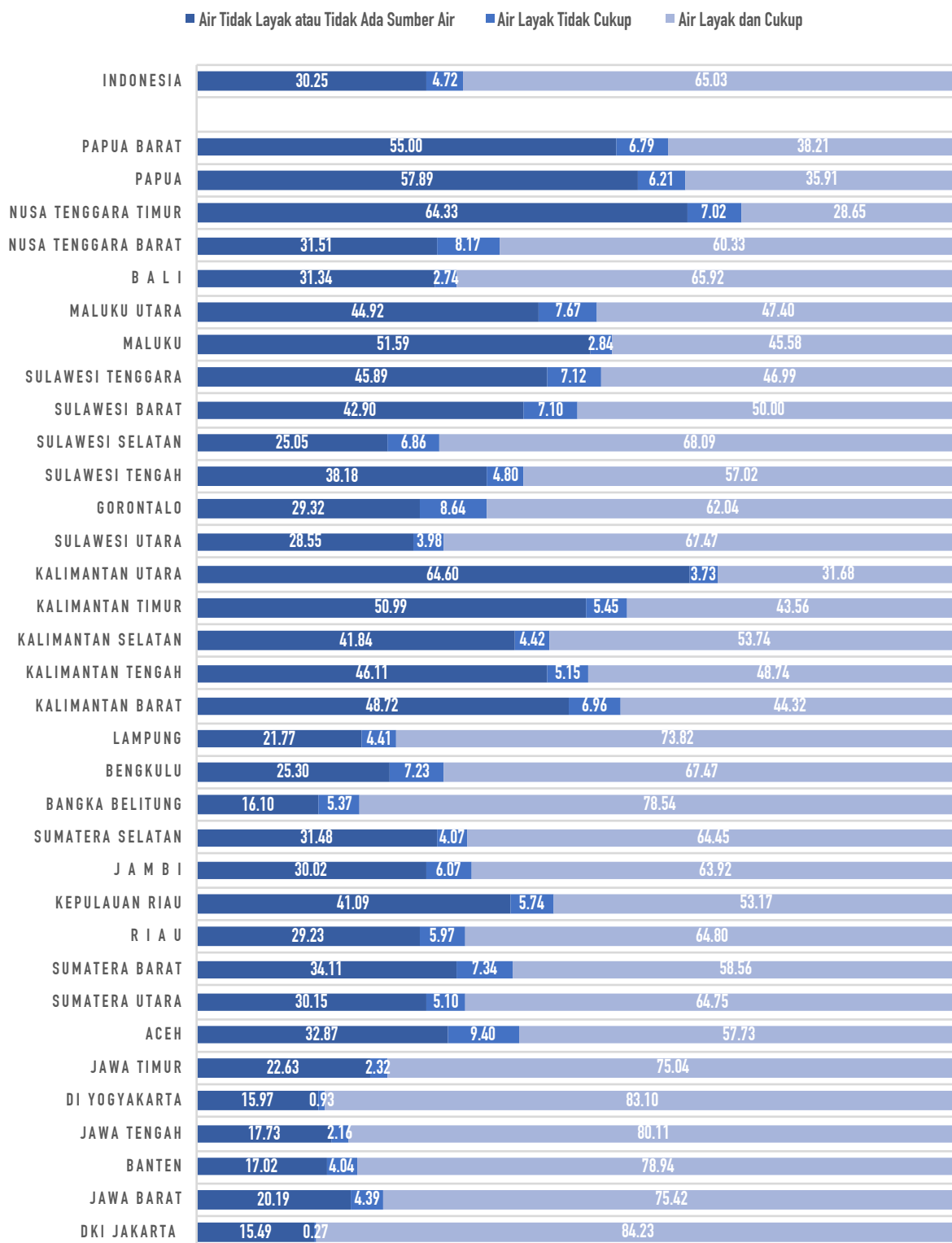
Gambaran kondisi Sanitasi Sekolah di Sekolah Menengah Pertama dipilah berdasarkan, akses air, akses jamban dan akses pada sarana cuci tangan

3.2.1 AKSES AIR DASAR

Analisa akses air di Sekolah Menengah Pertama dipisahkan berdasarkan provinsi dan tipe sekolah, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta.

3.2.1.1 Menurut Provinsi

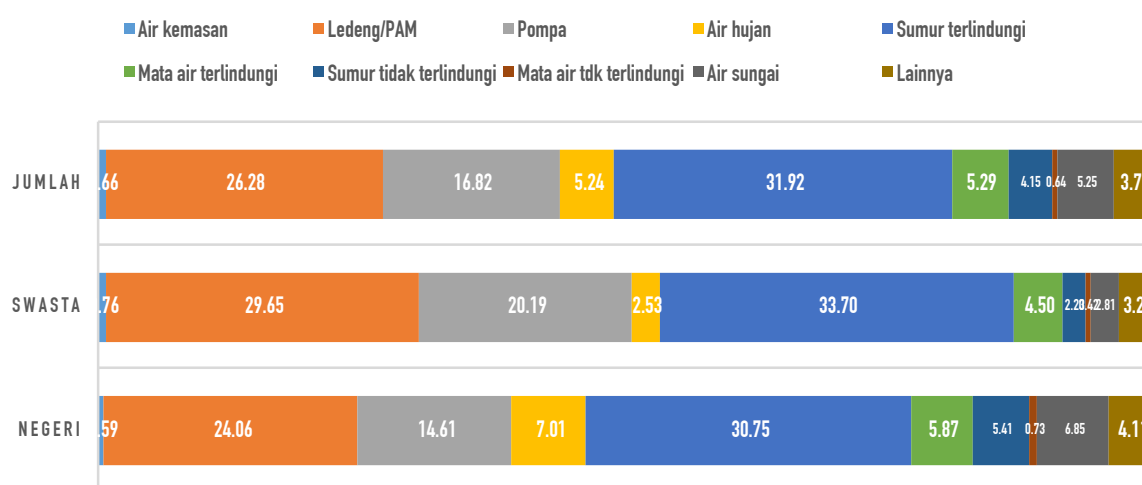
DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling tinggi persentasenya dapat menyediakan akses air layak dan cukup di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni sebesar 84,23%. Daerah Istimewa Yogyakarta (83,1%) dan Jawa Tengah (80,11%) menjadi provinsi lainnya yang menempati urutan kedua dan ketiga tertinggi yang dapat menyediakan akses air layak dan cukup pada jenjang SMP. Keadaan yang paling memprihatinkan adalah provinsi NTT (28,65%), Papua (35,91%) dan Papua Barat (38,21%) di mana ketersediaan akses air bersih tidak mencapai setengah dari populasi SMP di provinsi tersebut.



Grafik 3.7 Akses Air Dasar Pada SMP Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

3.2.1.2 Menurut Status Sekolah

PAM dan sumur terlindungi menjadi pilihan sumber air layak paling banyak pada jenjang Sekolah Menengah Pertama baik negeri maupun swasta. SMP negeri yang memiliki sumber air PAM mencapai 24,06%, sedangkan SMP swasta yang mendapatkan sumber air dari PAM mencapai 29,65%. Sedangkan SMP negeri yang memiliki sumber air dari sumur terlindungi mencapai 30,75% dan SMP swasta yang memiliki sumur air terlindungi mencapai 33,70%. Namun masih ada SMP negeri dan swasta yang memiliki sumber air tidak layak seperti sumur tidak terlindungi (4,15%), mata air tidak terlindungi (0,64%) dan bahkan sungai (5,25%). SMP yang demikian sebaiknya mengganti sumber airnya menjadi yang layak, demi kesehatan peserta didik.



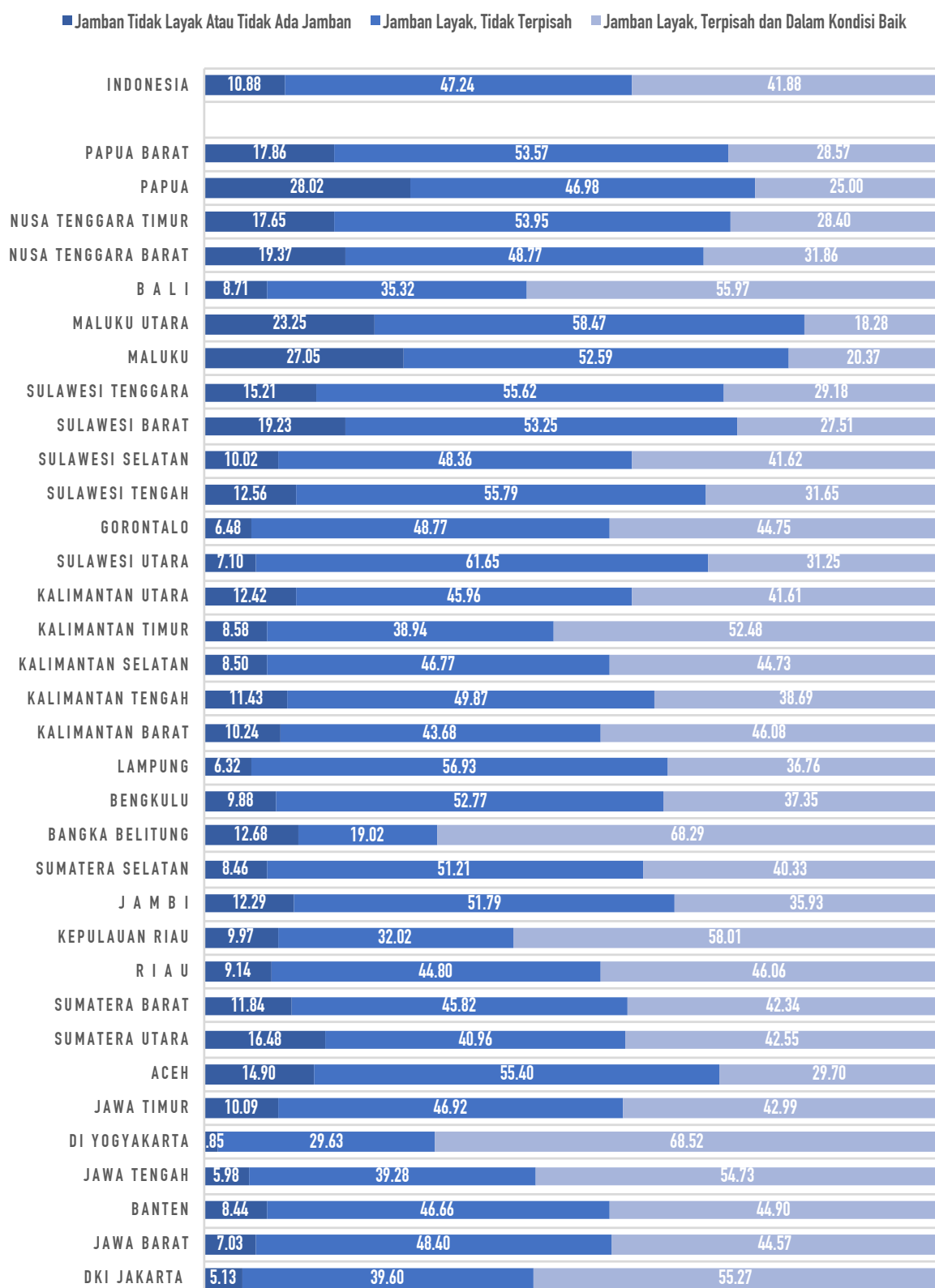
Grafik 3.8 Sumber Air Pada SMP Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

3.2.2 AKSES JAMBAAN DASAR

Akses jamban di Sekolah Menengah Pertama dapat dianalisa berdasarkan dua hal, yaitu akses jamban menurut provinsi dan akses jamban menurut status sekolah, sekolah swasta dan negeri.

3.2.2.1 Berdasarkan Provinsi

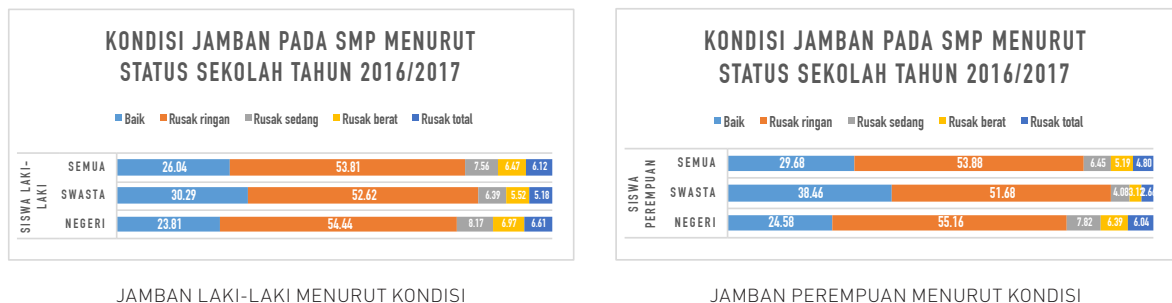
Persentase SMP di Indonesia yang memiliki jamban layak namun tidak terpisah adalah 47,24%. Bahkan di 13 provinsi, lebih dari separuh dari seluruh sekolah jenjang SMP tidak memiliki jamban yang terpisah. Tiga provinsi yang paling tinggi tidak memiliki jamban terpisah, adalah Sulawesi Utara (61,65%), Maluku Utara (58,47%), dan Lampung (56,93%). Hal ini tentu memprihatinkan, karena masih banyak peserta didik SMP, terutama siswa perempuan, yang tidak dapat mengakses jamban dengan nyaman. Jamban yang terpisah antara laki-laki dan perempuan penting untuk menjamin rasa aman dan nyaman khususnya bagi siswa perempuan ketika menggunakan jamban. Terlebih ketika siswa perempuan sedang dalam periode menstruasi. Siswa perempuan juga cenderung membutuhkan waktu lebih lama dalam menggunakan jamban. Oleh karena itu tidak adil rasanya kalau jamban siswa laki-laki dan siswa perempuan dijadikan satu.



Grafik 3.9 Akses Jamban Dasar Pada SMP Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

3.2.2.2 Berdasarkan Status Sekolah

Kondisi jamban siswa laki-laki dan perempuan yang rusak ringan pada SMP negeri maupun swasta berada di angka yang kurang lebih sama, yakni sebesar 53,81% untuk jamban siswa dan 53,88% untuk jamban siswa perempuan. Persentase jamban siswa laki-laki dan perempuan pada SMP swasta yang kondisinya baik lebih banyak daripada SMP negeri, selisihnya hingga lebih dari 7%. Jamban siswa dalam kondisi baik pada SMP swasta mencapai 30,29% sedangkan pada SMP negeri jamban siswa yang kondisinya baik hanya berjumlah 23,81%. Demikian pula dengan jamban siswa laki-laki dan perempuan, SMP swasta memiliki jamban dalam kondisi baik dari pada SMP negeri. Sebanyak 32,31% jamban siswa perempuan di SMP swasta dalam kondisi baik sedangkan pada SMP negeri hanya sekitar 24,58% yang kondisinya baik.



Grafik 3.10 Kondisi Jamban Pada SMP Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

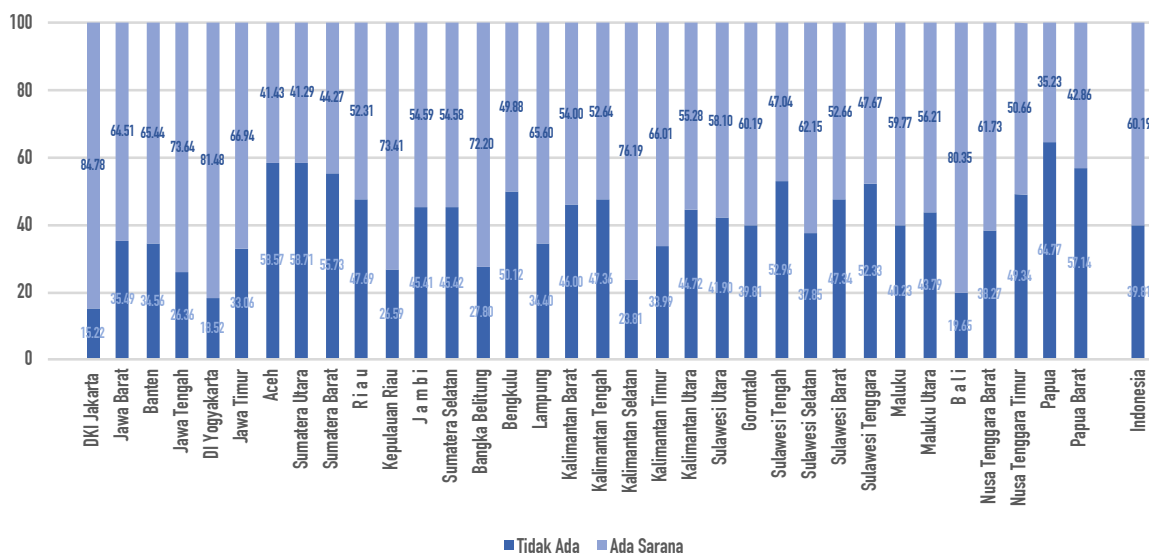
3.2.3 AKSES SARANA CUCI TANGAN DASAR

Akses sarana Cuci Tangan di Sekolah Menengah Pertama dapat dianalisa berdasarkan dua hal, yaitu akses jamban menurut provinsi dan akses jamban menurut status sekolah, sekolah swasta dan negeri.

3.2.3.1 Menurut Provinsi

Rerata SMP di Indonesia yang tidak memiliki sarana cuci tangan mencapai 39,8%. Kondisi paling tidak ideal berada di ujung barat dan ujung timur Indonesia. Hanya 35,3% SMP di provinsi Papua yang memiliki sarana cuci tangan. Selanjutnya di provinsi Sumatera Utara (41,3%) dan provinsi Aceh hanya 41,4% SMP yang memiliki sarana cuci tangan. Selain dua provinsi itu masih ada tiga provinsi di Sumatera yang masuk 10 besar paling sedikit memiliki sarana cuci tangan, yakni provinsi Sumatera Barat (44,3%), provinsi Bengkulu (49,9%) dan provinsi Riau (52,3%). Padahal daerah di Pulau Sumatera umumnya tidak memiliki kesulitan air, sehingga seyogyanya tidak mengalami kesulitan untuk menyediakan akses cuci tangan dengan air mengalir. Sarana cuci tangan juga dapat dibuatkan yang sederhana, misalkan dengan menyediakan pipa saluran air, membolongkannya dan menyambungkannya pada kran.

Sementara itu, provinsi DKI Jakarta (84,8%), provinsi DI Yogyakarta

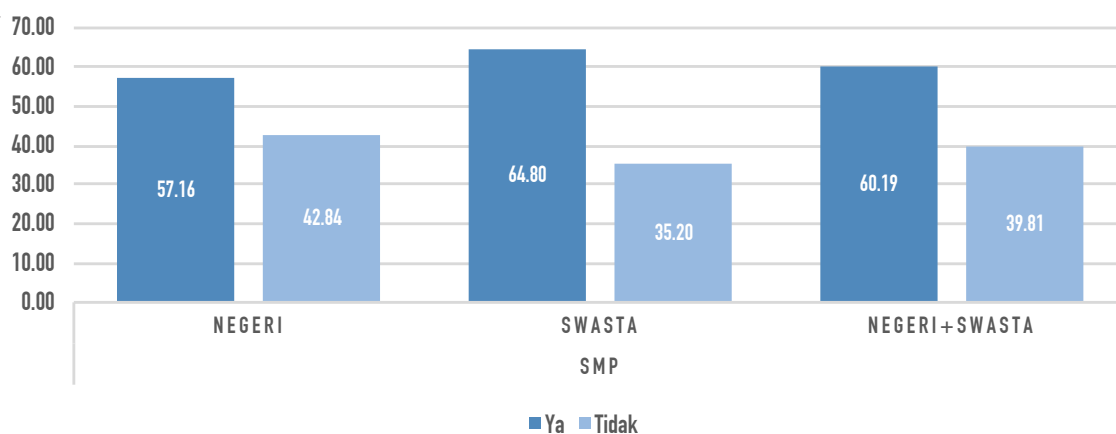


Grafik 3.11 Sarana Cuci Tangan Pada SMP Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

(81,5%) dan provinsi Bali (80,3%) menjadi tiga besar provinsi yang memiliki sarana cuci tangan terbanyak se-Indonesia pada jenjang SMP.

3.2.3.2 Menurut Status Sekolah

Persentase SMP swasta memiliki sarana cuci tangan lebih besar daripada SMP negeri. Sekitar 64,8% SMP swasta memiliki sarana cuci tangan, dan hanya 57,16% SMP negeri memiliki sarana cuci tangan. Ini berarti hampir setengah peserta didik SMP negeri tidak memiliki akses sarana cuci



Grafik 3.12 Sarana Cuci Tangan Pada SMP Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

3.3 KONDISI SANITASI SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Gambaran kondisi Sanitasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas dipilah menurut, akses air, akses jamban dan akses pada sarana cuci tangan

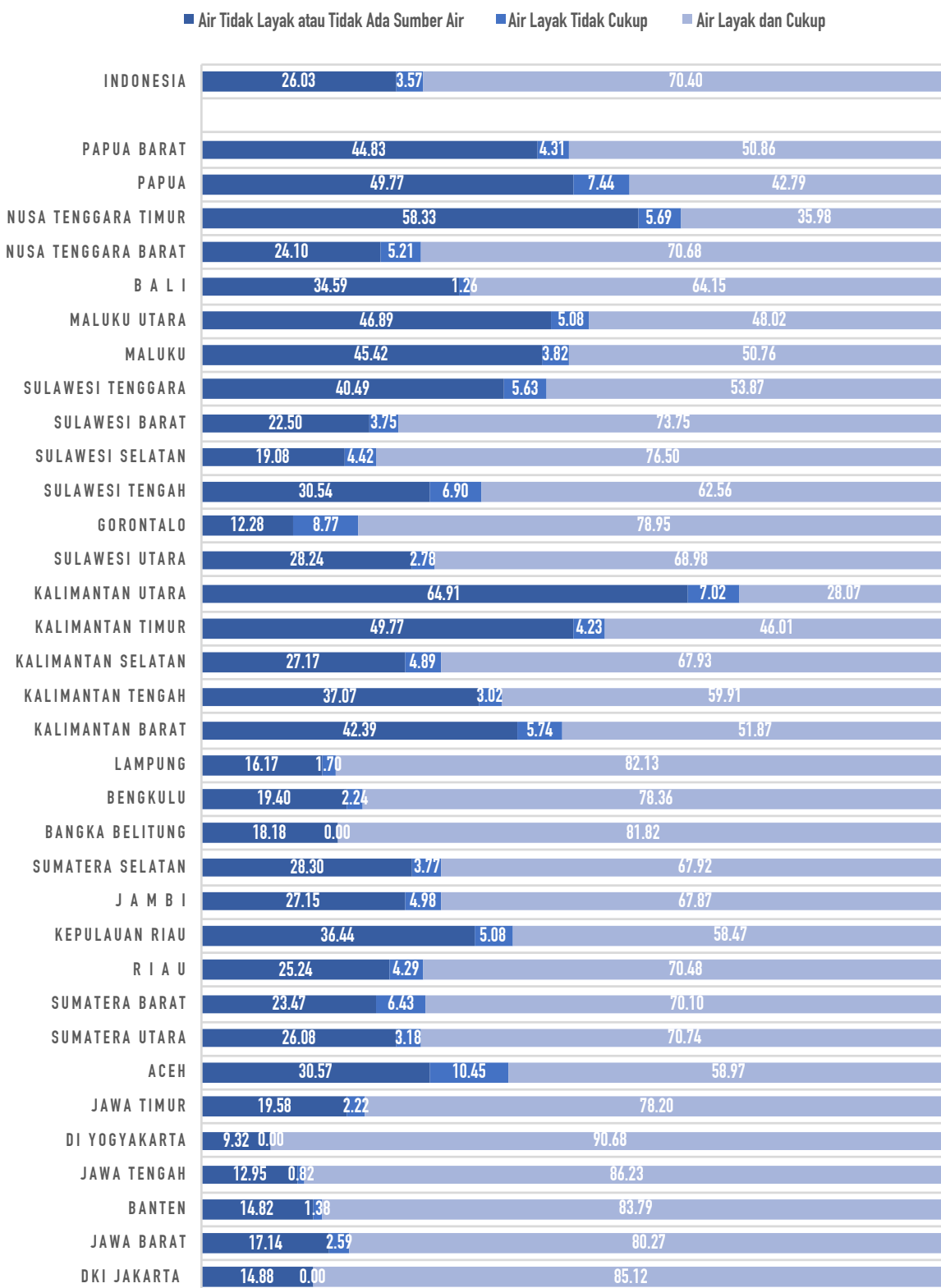
3.3.1 AKSES AIR DASAR

Analisa akses air di Sekolah Menengah Atas dipisahkan menurut provinsi dan tipe sekolah, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta.

3.3.1.1 Menurut Provinsi

Secara keseluruhan rerata SMA yang memiliki akses air layak dan cukup di Indonesia mencapai 70,4%. Namun Kalimantan Utara (28,07%), NTT (35,98%) dan Papua (42,79%) masih mengalami kesulitan untuk memenuhi akses air layak dan cukup bagi peserta didik SMA. Sedangkan provinsi DI Yogyakarta (90,68%), Jawa Tengah (86,23%) dan DKI Jakarta



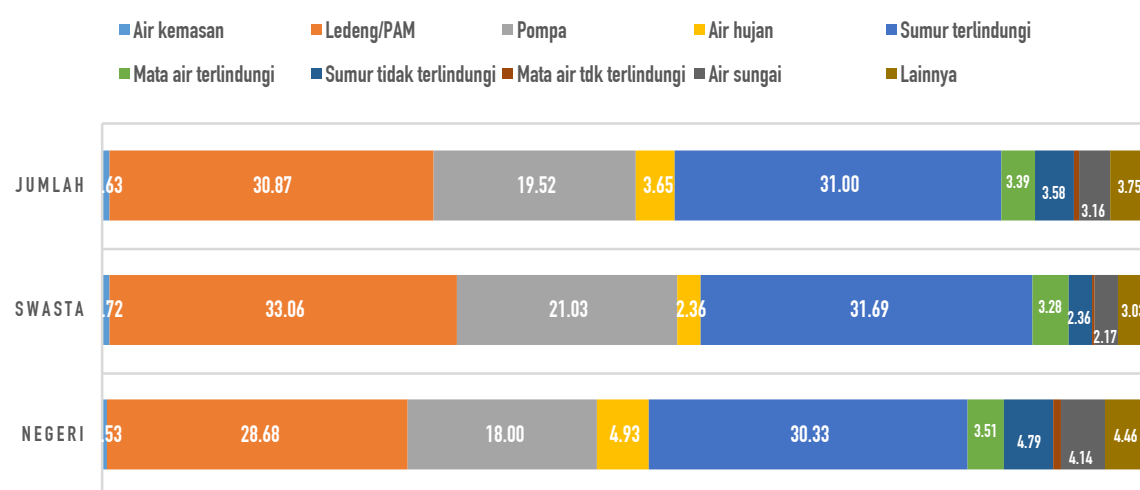


Grafik 3.13 Akses Air Dasar Pada SMA Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

(85,12%) menjadi tiga besar terbaik se-Indonesia dalam hal akses air layak dan cukup.

3.3.1.2 Menurut Status Sekolah

Antara SMA negeri dan swasta tidak terlalu berbeda dalam hal sumber air. Kebanyakan SMA negeri dan swasta di Indonesia mengandalkan PAM (30,87%) dan sumur terlindungi (31%) sebagai sumber air. Namun masih juga terdapat SMA di Indonesia yang mengandalkan sumber air tidak layak. Misalnya sungai sebagai sumber air, terdapat pada 4,14% SMA negeri dan 2,17% SMA swasta. Hal ini dapat diartikan bahwa masih ada peserta didik SMA yang mendapatkan akses air tidak layak selama proses belajar di sekolah. Bahkan secara nasional rerata SMA negeri dan swasta yang memiliki akses air tidak layak mencapai kurang lebih 10% atau sekitar 1400 sekolah.



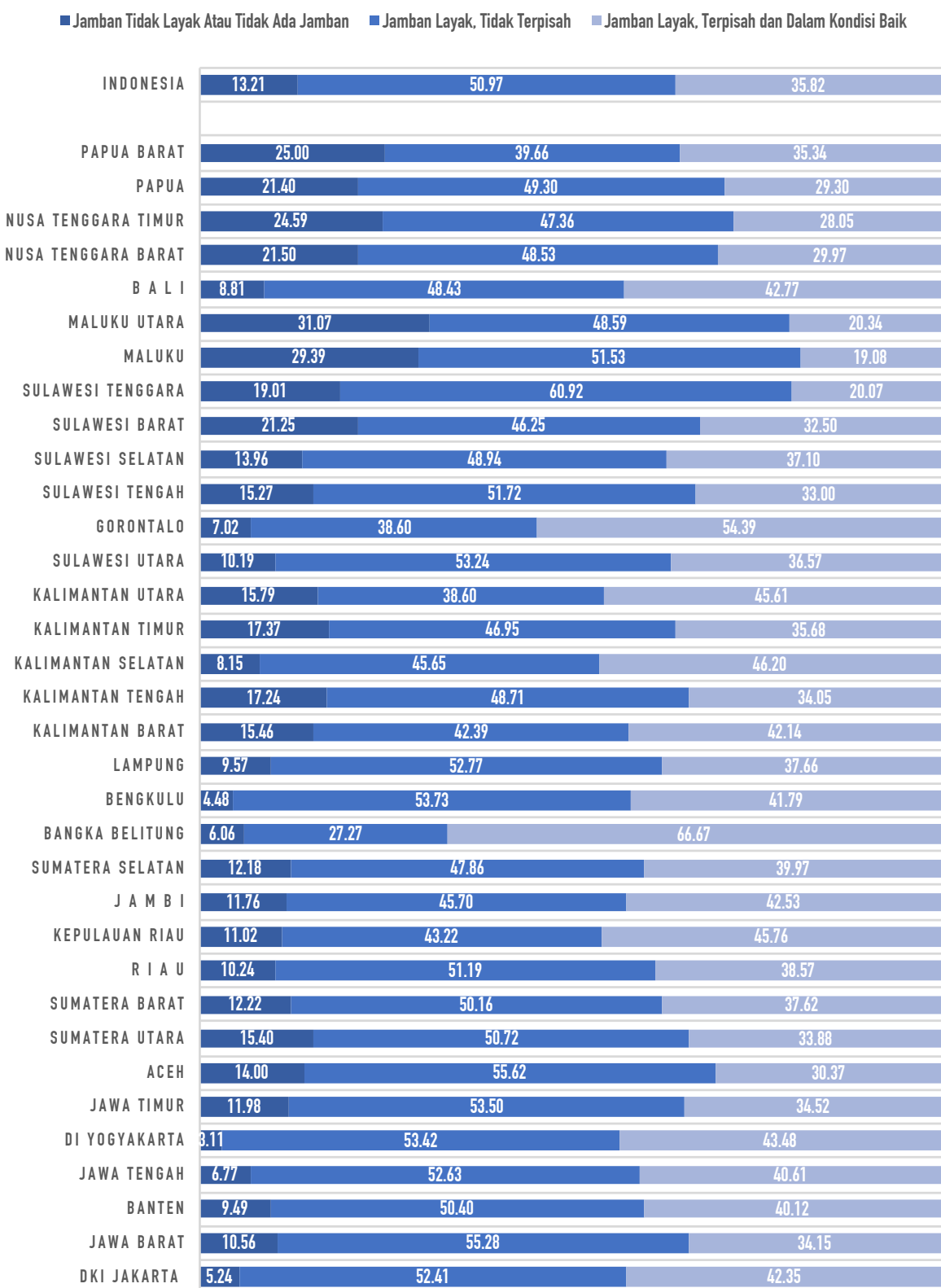
Grafik 3.14 Sumber Air Pada SMA Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

3.3.2 AKSES JAMBAAN DASAR

Akses jamban di Sekolah Menengah Atas dapat dianalisa berdasarkan dua hal, yaitu akses jamban menurut provinsi dan akses jamban menurut status sekolah, sekolah swasta dan negeri.

3.3.2.1 Menurut Provinsi

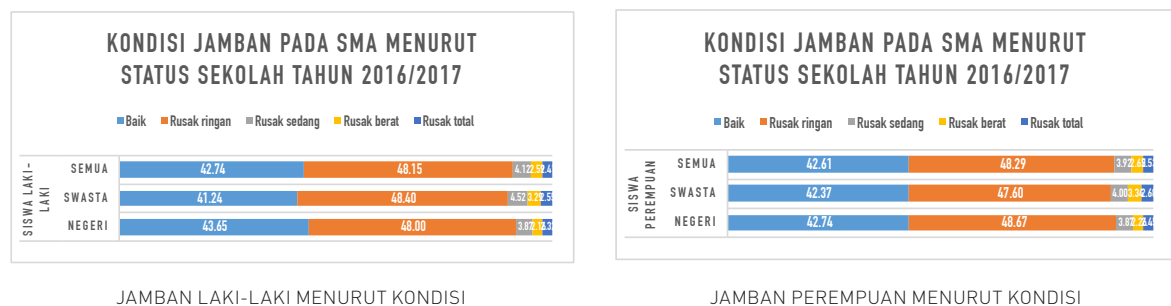
Ada tiga provinsi di Indonesia yang memiliki akses paling minim terhadap jamban sekolah pada jenjang SMA, yakni Maluku Utara (31,07%), Maluku (29,39%) dan Papua Barat (25,00%). Rerata jenjang SMA di Indonesia yang tidak memiliki akses jamban atau jamban tidak layak sebesar 13,21%. Sedangkan rerata jenjang SMA di Indonesia memiliki akses jamban layak tidak terpisah atau layak terpisah namun kondisinya tidak baik adalah 50,97%. Lebih dari sepertiga provinsi di Indonesia yang bisa menyediakan akses jamban layak, terpisah dan dalam kondisi layak untuk peserta didik SMA, dengan rerata 35,82%.



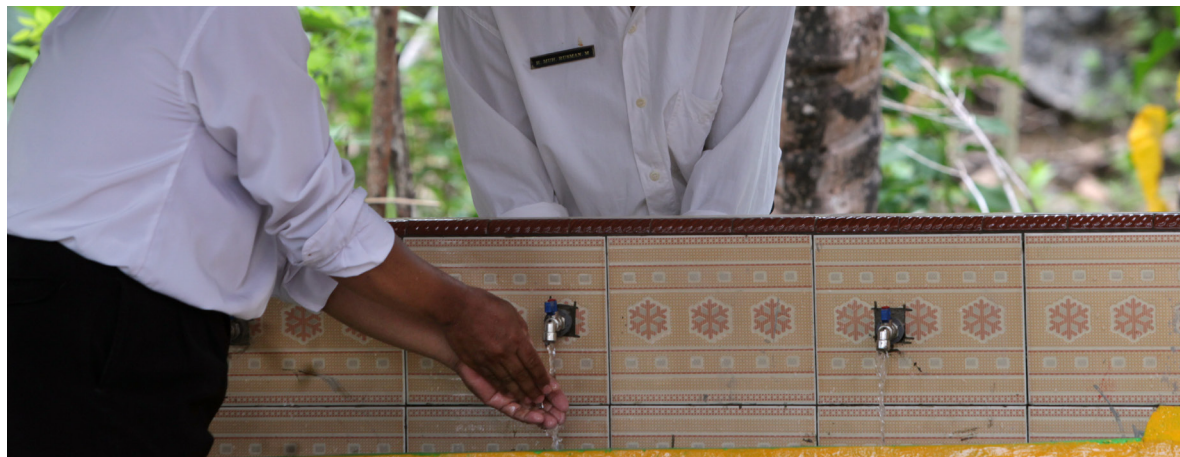
Grafik 3.15 Akses Jamban Dasar Pada SMA Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

3.3.2.2 Menurut Status Sekolah

Secara keseluruhan baik jamban untuk siswa laki-laki dan perempuan di SMA negeri dan swasta memiliki persentase yang kurang lebih sama untuk kondisi jamban baik dan rusak ringan. Sekitar 90 persen SMA negeri dan swasta di seluruh Indonesia telah memiliki jamban untuk laki dan perempuan yang kondisinya baik (43%) dan rusak ringan (48%). Hanya kurang dari sepuluh persen SMA yang memiliki jamban dalam kondisi rusak sedang, rusak berat dan rusak total. Oleh karenanya, peserta didik SMA masih cukup baik kondisinya terhadap akses jamban.



Grafik 3.16 Kondisi Jamban Pada SMA Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

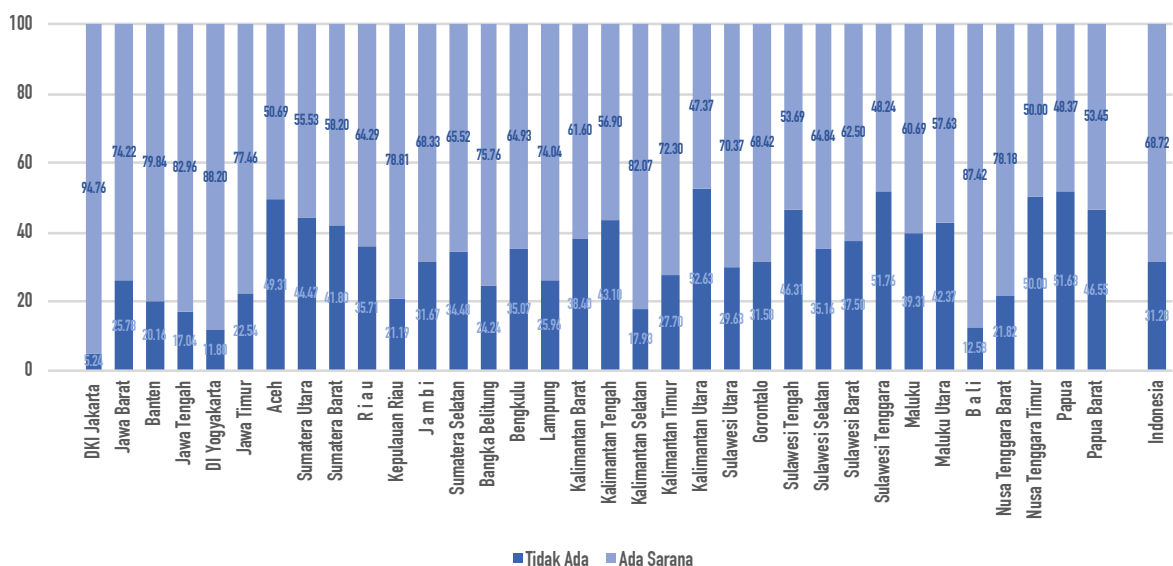


3.3.3 AKSES SARANA CUCI TANGAN DASAR

Akses sarana cuci tangan di Sekolah Menengah Atas dapat dianalisa berdasarkan dua hal, yaitu akses jamban menurut provinsi dan akses jamban menurut status sekolah, sekolah swasta dan negeri.

3.3.3.1 Menurut Provinsi

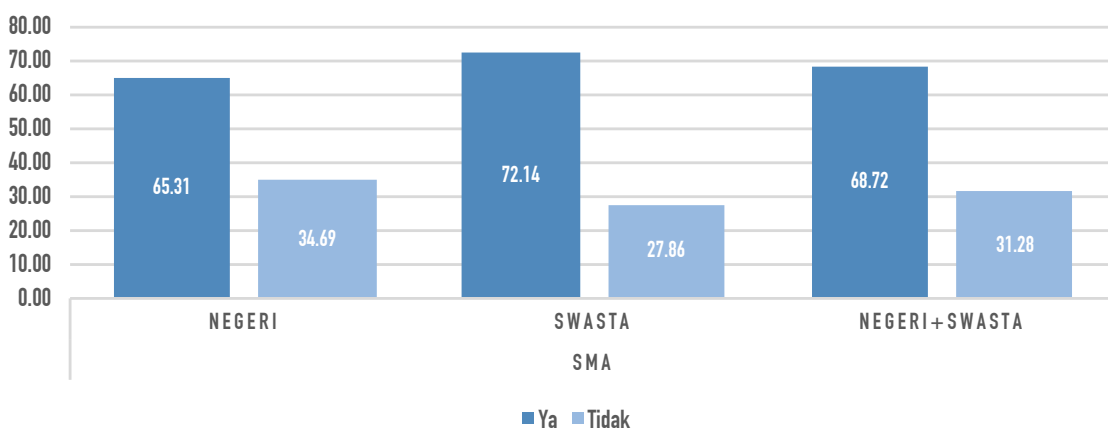
Tiga provinsi di Indonesia memiliki akses paling sedikit terhadap sarana cuci tangan, tidak sampai separuh populasi SMA di wilayahnya, yakni Kalimantan Utara (47,4%), Sulawesi Tenggara (48,2%) dan Papua (48,4%). Hal ini berarti separuh peserta didik di wilayah tersebut tidak dapat melakukan praktek cuci tangan pakai sabun. Padahal cuci tangan pakai sabun merupakan perilaku sederhana yang berdampak besar, salah satunya dapat mencegah tertularnya penyakit diare dan cacingan.



Grafik 3.17 Sarana Cuci Tangan Pada SMA Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

3.3.3.2 Menurut Status Sekolah

Antara SMA negeri dan swasta di seluruh Indonesia, rerata SMA yang memiliki sarana cuci tangan lebih banyak pada SMA swasta dengan selisih sekitar 7 persen. Sebanyak 72,14% SMA negeri menyatakan punya sarana cuci tangan, sementara itu SMA negeri yang memiliki akses cuci tangan sebesar 65,31%. Secara nasional, rerata SMA yang tidak memiliki sarana cuci tangan sebesar 31,28%. Hal ini perlu menjadi catatan, karena praktek cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu langkah paling efektif untuk mencegah penularan kuman penyakit, terutama bakteri e-coli yang bisa menyebabkan penyakit diare.



Grafik 3.18 Sarana Cuci Tangan Pada SMA Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

3.4 KONDISI SANITASI SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Gambaran kondisi Sanitasi Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dipilah menurut, akses air, akses jamban dan akses pada sarana cuci tangan

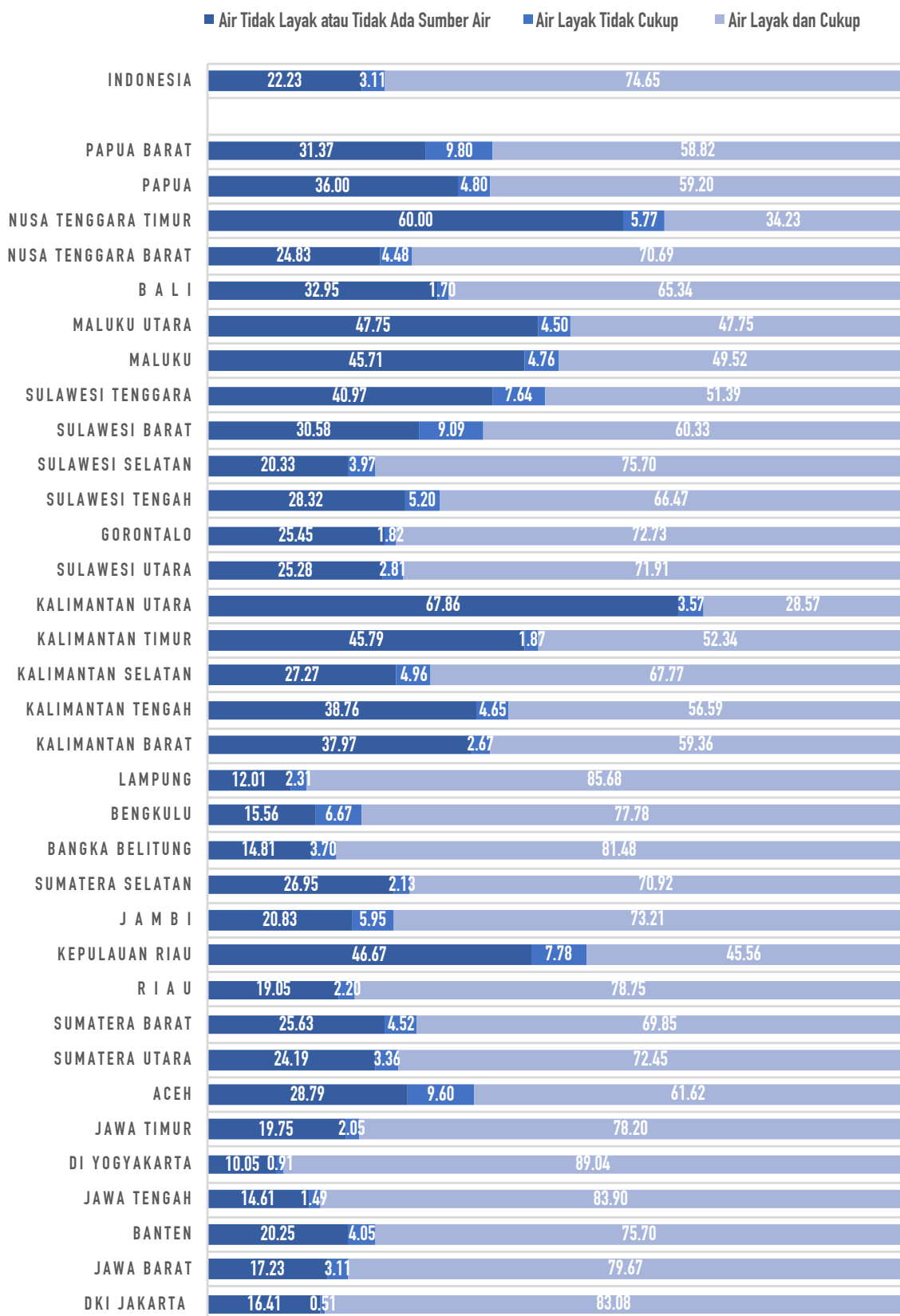
3.4.1 AKSES AIR DASAR

Analisa akses air di Sekolah Menengah Kejuruan dipisahkan menurut provinsi dan tipe sekolah, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta.

3.4.1.1 MENURUT PROVINSI

Secara keseluruhan SMK di Indonesia memiliki akses air yang baik, persentase SMK yang memiliki akses air layak dan cukup mencapai 74,65%. Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi pada jenjang pendidikan SMK yang minim akses terhadap air bersih. Sekitar 60% SMK di NTT mengakses sumber air yang tidak layak, seperti sungai, sumur tidak terlindungi atau mata air tidak terlindungi. Hal ini bisa jadi karena NTT memang kondisi alamnya kering di mana beberapa daerah di sana mengalami musim hujan dalam waktu yang singkat sekitar tiga bulan. Karena air merupakan hal yang vital untuk dimiliki sekolah, ada baiknya SMK terutama teknik mencari inovasi untuk mencari sumber air yang layak.

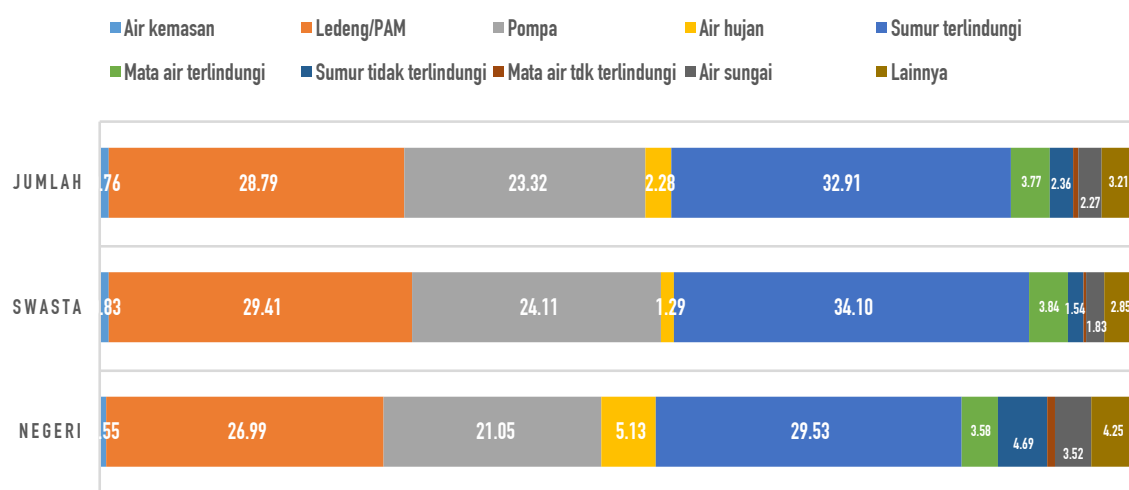




Grafik 3.19 Akses Air Dasar Pada SMK Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

3.4.1.2 Menurut Status Sekolah

PAM, pompa dan sumur terlindungi merupakan tiga jenis sumber air yang banyak dimiliki oleh SMK di seluruh Indonesia. Baik SMK negeri maupun swasta bergantung dengan ketiga jenis sumber air layak ini. Sebanyak 27% SMK negeri menggunakan PAM sebagai sumber air disekolahnya, sedangkan SMK swasta sebesar 29,4% menggunakan PAM. Sebanyak 21,1% SMK negeri menggunakan pompa sebagai sumber air layak, sedangkan SMK swasta yang menggunakan pompa mencapai 24,1%. Sebanyak 29,5% SMK negeri menggunakan sumur terlindungi sebagai sumber air layak, dan sekitar 34,1% SMK swasta menggunakan sumur terlindungi. Namun masih ada sekitar 13% SMK baik negeri maupun swasta memiliki sumber air yang tidak layak. Sumber air tidak layak berasal dari sumur tidak terlindungi, mata air tidak terlindungi dan juga sungai.



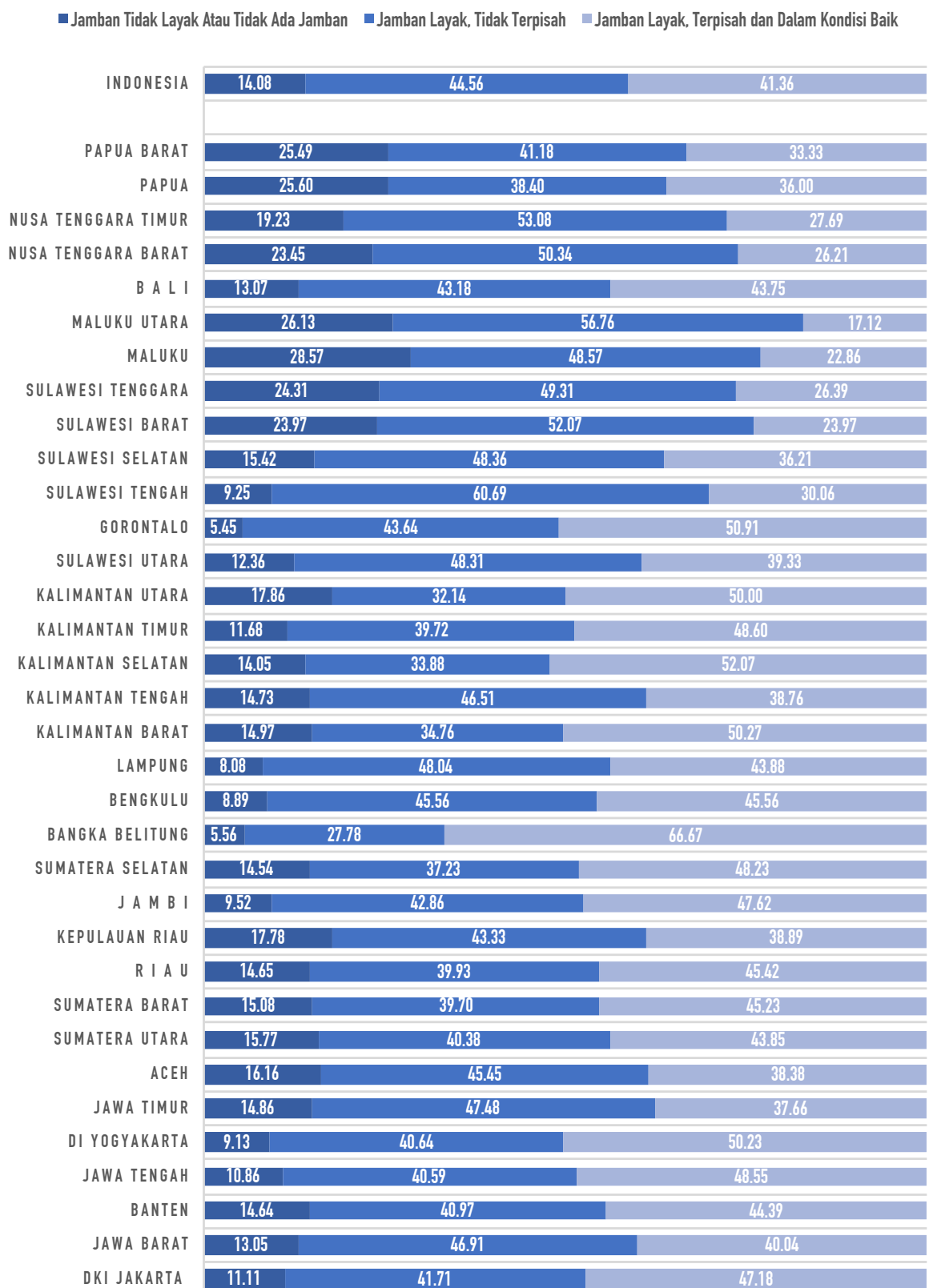
Grafik 3.20 Sumber Air Pada SMK Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

Akses jamban di Sekolah Menengah Kejuruan dapat dianalisa berdasarkan dua hal, yaitu akses jamban menurut provinsi dan akses jamban menurut status sekolah, sekolah swasta dan negeri.

3.4.2.1 Menurut Provinsi

Sekitar 14,08% SMK di seluruh Indonesia belum memiliki akses jamban atau jamban yang dimiliki masuk kategori tidak layak. Sedangkan sekitar 44,56% SMK di Indonesia yang memiliki akses jamban layak, walaupun belum terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan. Selain itu, SMK yang memiliki akses jamban layak terpisah dan dalam kondisi baik sekitar 41,36%.

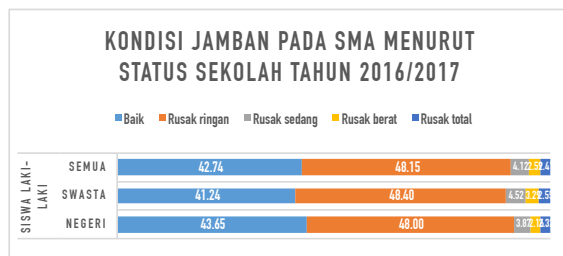
Satu dari empat SMK di lima provinsi (Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) memiliki jamban tapi tidak layak atau bahkan tidak memiliki jamban sama sekali. Hal ini tentu menyedihkan karena lebih dari separuh peserta didik akan kesulitan mencari tempat buang air besar dan buang air kecil setiap mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMK. Sebaiknya pihak SMK memikirkan hal-hal inovatif supaya tetap bisa memenuhi hak pelajar untuk mendapatkan fasilitas jamban yang layak disekolahnya. Jamban dapat dibuat sederhana asalkan memenuhi syarat kesehatan, misalnya cubluk dengan tutup yang lokasinya jauh dari sumber air.



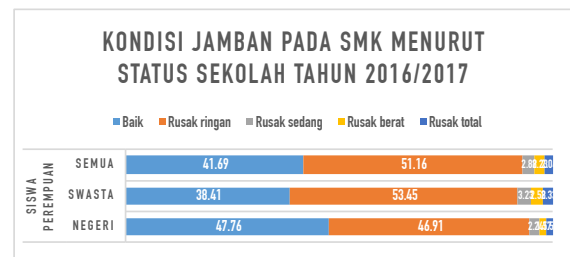
Grafik 3.21 Akses Jamban Dasar Pada SMK Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

3.4.2.2 Menurut Status Sekolah

Lebih banyak SMK negeri yang memiliki jamban dalam kondisi baik, merata untuk jamban siswa laki-laki dan perempuan sekitar 47%. Sedangkan SMK swasta lebih banyak jambansiswa laki-laki dan perempuan dalam kondisi rusak ringan yakni sekitar 53%. Sepuluh persen jamban siswa laki-laki dan perempuan di SMK negeri dan swasta dalam kondisi rusak sedang, rusak berat dan rusak total.



JAMBAN LAKI-LAKI MENURUT KONDISI



JAMBAN PEREMPUAN MENURUT KONDISI

Grafik 3.22 Kondisi Jamban Pada SMK Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

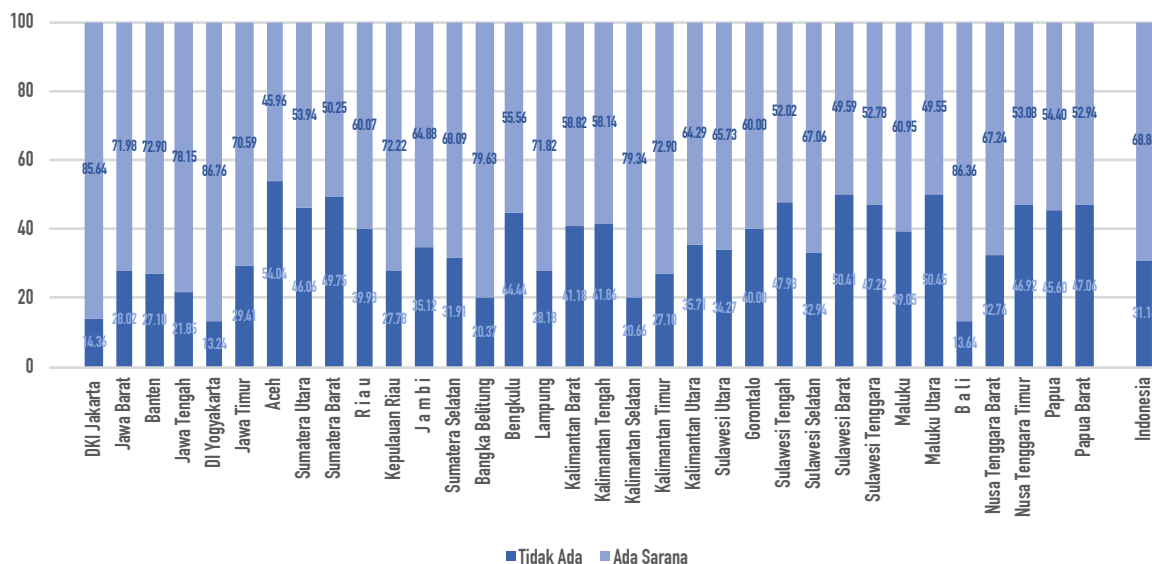


3.4.3 AKSES SARANA CUCI TANGAN DASAR

Akses sarana Cuci Tangan di Sekolah Menengah Kejuruan dapat dianalisa berdasarkan dua hal, yaitu akses jamban menurut provinsi dan akses jamban menurut status sekolah, sekolah swasta dan negeri

3.4.3.1 Menurut Provinsi

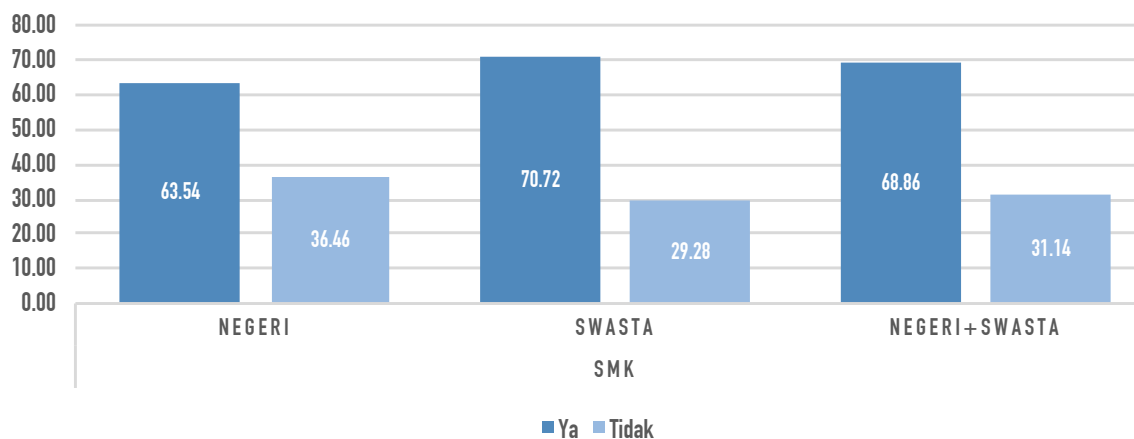
Hampir 70 persen SMK di Indonesia telah memiliki sarana cuci tangan. Hal ini tentu menggembirakan karena berarti peserta didik SMK dapat melakukan praktek cuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar untuk menghindar dari penyakit. Namun masih ada tiga provinsi yang setengah dari populasi SMK diwilayahnya belum memiliki sarana cuci tangan, yakni Aceh (54%), Maluku Utara (50,5%) dan Sulawesi Barat (50,4%). Padahal sarana cuci tangan tidak sulit untuk diadakan. Apalagi SMK merupakan wadah untuk peserta didik yang kreatif. SMK dapat menugaskan peserta didik untuk membuat sarana cuci tangan sederhana, misalnya terbuat dari tong bekas atau dari jerigen bekas yang disebut tippy tap.



Grafik 3.23 Sarana Cuci Tangan Pada SMK Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

3.4.3.2 Menurut Status Sekolah

Secara nasional, persentase SMK swasta yang memiliki sarana cuci tangan lebih banyak dari pada SMK negeri. SMK swasta yang memiliki sarana cuci tangan mencapai 70,72% sedangkan SMK negeri yang memiliki sarana cuci tangan mencapai 63,54%. Padahal sarana cuci tangan dibutuhkan untuk mempermudah peserta didik melakukan praktek cuci tangan. Sarana cuci tangan bukanlah suatu sarana yang mahal dan sulit didapatkan. SMK dapat mendorong peserta didik untuk berinovasi menghasilkan sarana cuci tangan dengan bahan sederhana yang tersedia disekitar sekolah, misal batang bambu dibolongi atau kaleng cat yang dibolongi atau bisa juga jerigen yang dibolongi lalu digantung didahan pohon.



Grafik 3.24 Sarana Cuci Tangan Pada SMK Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017



3.5 KONDISI SANITASI SEKOLAH DI SEKOLAH LUAR BIASA

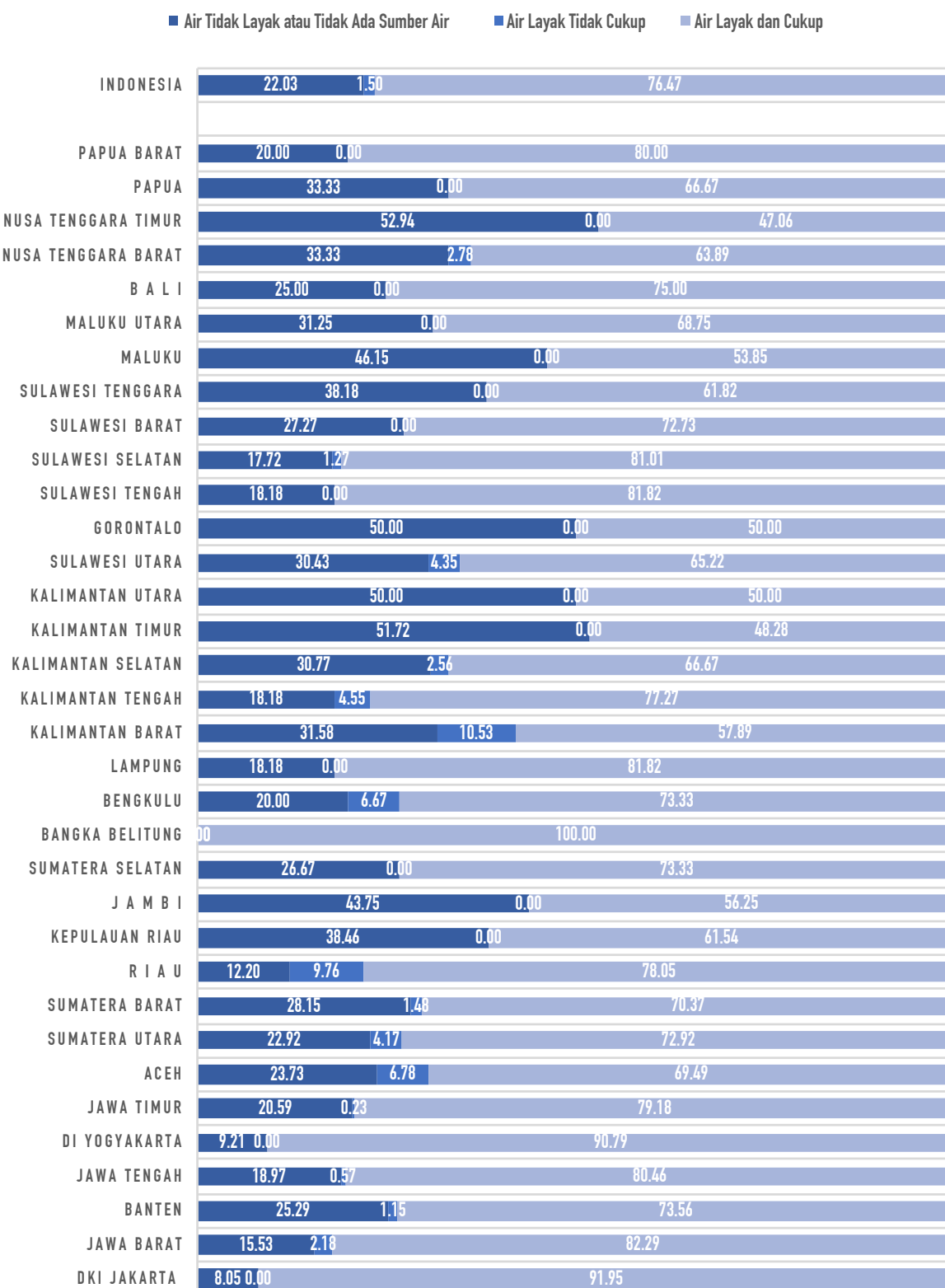
Gambaran kondisi Sanitasi Sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) dipilah menurut, akses air, akses jamban dan akses pada sarana cuci tangan

3.5.1 AKSES AIR DASAR

Analisa akses air di Sekolah Luar Biasa dipisahkan menurut provinsi dan tipe sekolah, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta

3.5.1.1 Menurut Provinsi

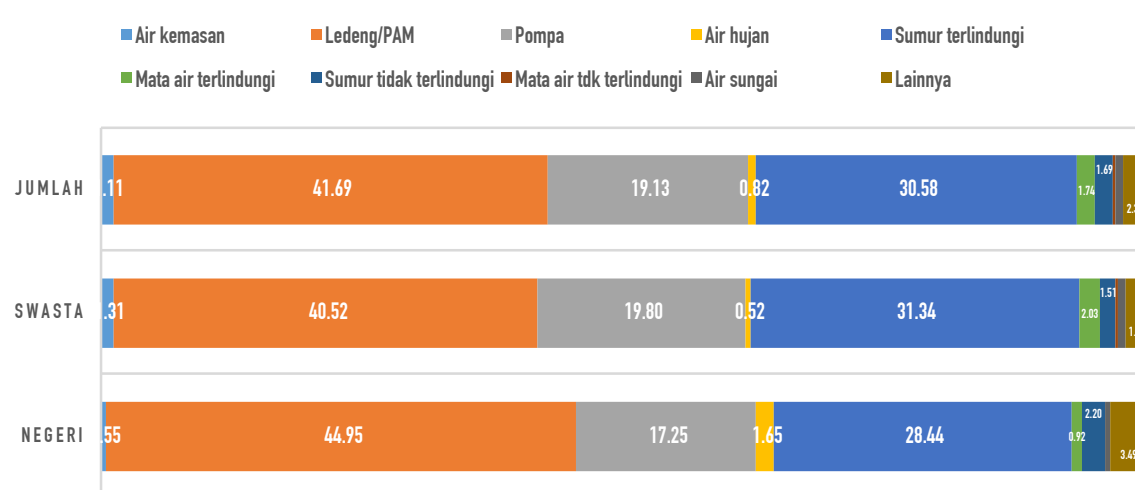
Secara nasional, rerata persentase sekolah luar biasa yang sudah memiliki akses air layak dan cukup mencapai 76,47%. Bahkan di beberapa provinsi seluruh sekolah luar biasa disana memiliki akses pada air layak dan cukup disepanjang tahun, yakni provinsi Sumatera Selatan, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Bangka Belitung dan Bali. Namun demikian masih ada beberapa provinsi dengan setengah jumlah sekolah luar biasa diwilayahnya tidak memiliki akses air, yakni Kalimantan Timur (51,72%), Kalimantan Utara (50%), Gorontalo (50%).



Grifik 3.25 Akses Air Dasar Pada SLB Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

3.5.1.2 Menurut Status Sekolah

Sebanyak 45 persen SLB negeri memiliki sumber air layak dari PAM sementara itu sebanyak 40,5 persen SLB swasta juga menggantungkan sumber air disekolahnya dari PAM. Selain itu sumber air layak lainnya adalah sumur terlindungi di mana sebanyak 28,4 persen SLB negeri menjadikannya sebagai sumber air dan 31,3 persen SLB swasta menggunakannya sebagai sumber air disekolahnya. Secara nasional hamper 94 persen SLB negeri dan swasta telah memiliki akses terhadap air layak yakni sumber air yang berasal dari air kemasan, PAM, pompa, air hujan, sumur terlindungi dan mata air terlindungi.



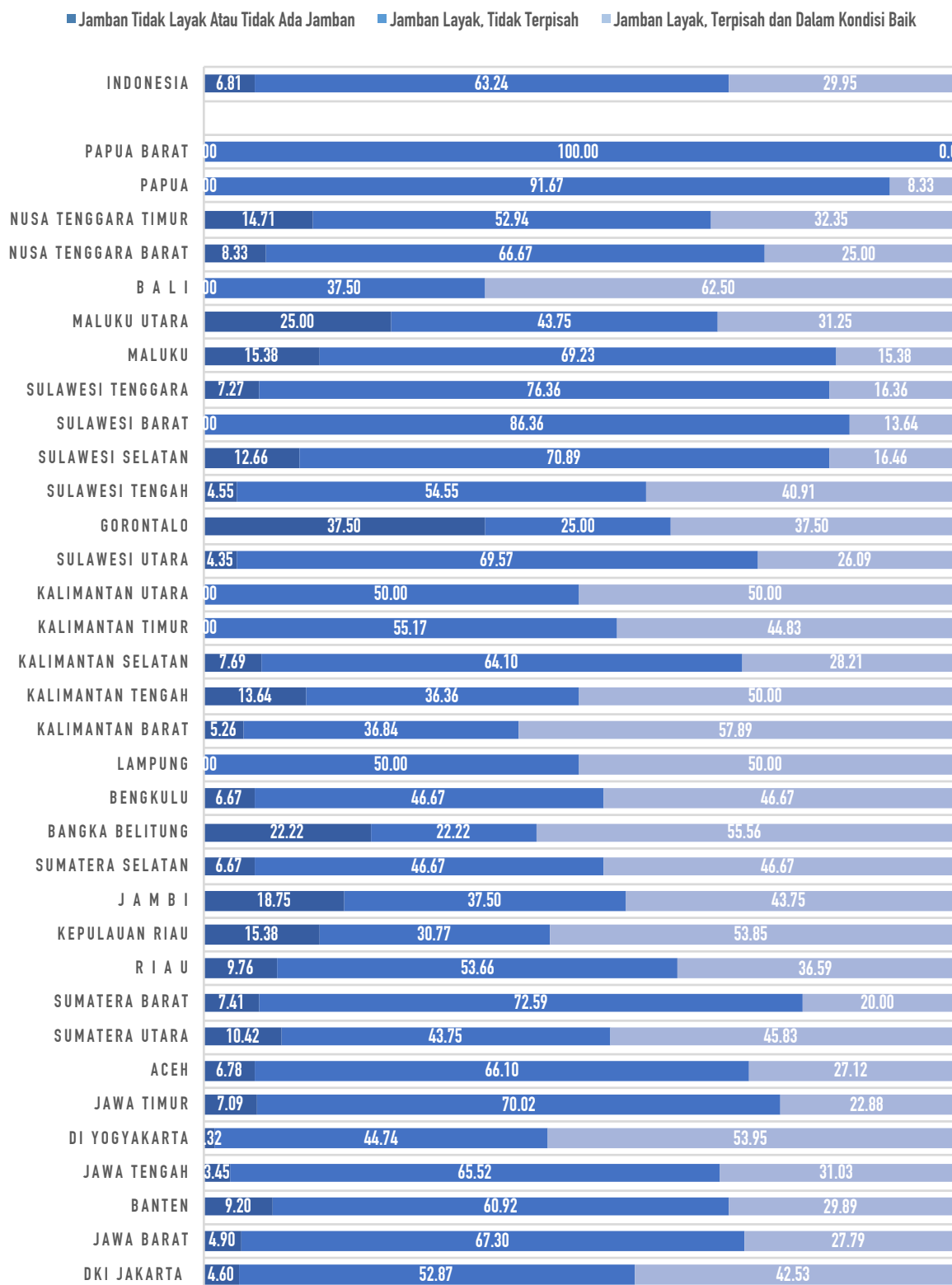
Grafik 3.26 Sumber Air Pada SLB Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

3.5.2 AKSES JAMBAN DASAR

Akses jamban di Sekolah Luar Biasa dapat dianalisa berdasarkan dua hal, yaitu akses jamban menurut provinsi dan akses jamban menurut status sekolah, sekolah swasta dan negeri.

3.5.2.1 Menurut Provinsi

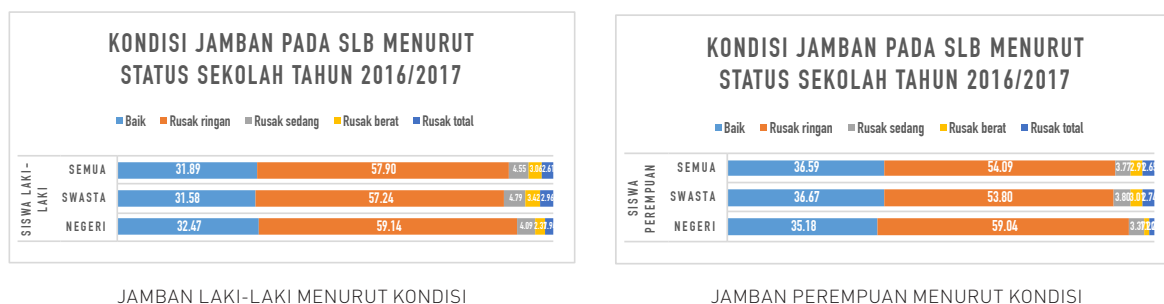
Kalau akses air di sekolah luar biasa tidak ada masalah, namun sepertinya sekolah luar biasa masih terkendala dengan akses jamban. Berdasarkan grafik berikut ini terlihat bahwa secara nasional hanya sekitar sepuluh persen sekolah luar biasa yang memiliki akses jamban layak, terpisah, dan dalam kondisi baik. Sementara itu, sebanyak 39,4% sekolah luar biasa di Indonesia belum memiliki jamban atau walaupun ada jamban namun kondisinya tidak layak. Hal ini tentu menyedihkan karena peserta didik SLB memiliki kebutuhan khusus oleh karenanya kondisi jamban harus disesuaikan. Tiga besar provinsi di Indonesia dengan sekolah luar biasa yang tidak memiliki jamban atau kondisinya tidak layak yakni Papua Barat (100%), Papua (91,67%) dan Sulawesi Barat (86,36%). Suatu kondisi yang sebaiknya menjadi perhatian bagi pengambil keputusan di level SLB, agar menyusun strategi perencanaan lebih baik dalam memenuhi hak peserta didik selama di sekolah.



Grafik 3.27 Akses Jamban Dasar Pada SLB Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

3.5.2.2 Menurut Status Sekolah

Secara nasional, persentase kondisi jamban baik lebih banyak untuk jamban siswa perempuan (36,59%) dari pada jamban siswa laki-laki (31,89%). Jamban siswa perempuan yang dalam kondisi baik di SLB negeri sebanyak 35,18% sedangkan di SLB swasta sebanyak 36,67%. Sedangkan secara keseluruhan 54,69% jamban siswi Sekolah Luar Biasa mengalami rusak ringan dan hampir 58% jamban siswa laki-laki mengalami rusak ringan. Sekitar sepuluh persen jamban di sekolah luar biasa negeri dan swasta dalam kondisi rusak sedang, rusak berat dan rusak total.



Grafik 3.28 Kondisi Jamban Pada SLB Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

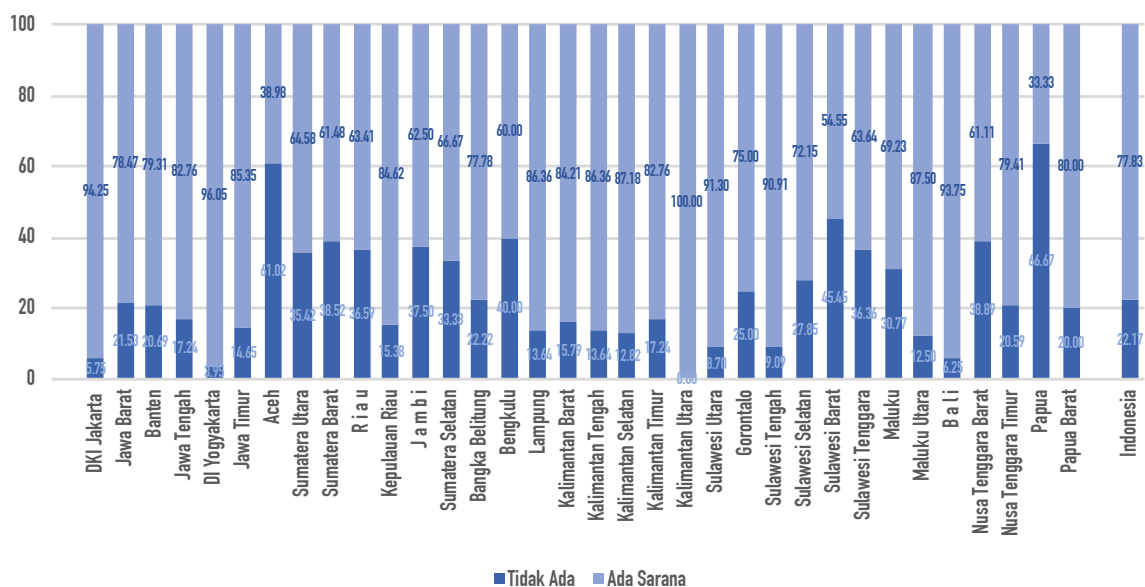
3.5.3 AKSES SARANA CUCI TANGAN DASAR

Akses sarana Cuci Tangan di Sekolah Luar Biasa dapat dianalisa berdasarkan dua hal, yaitu akses jamban menurut provinsi dan akses jamban menurut status sekolah, sekolah swasta dan negeri.

3.5.3.1 Menurut Provinsi

Secara nasional 77,8% sekolah luar biasa di Indonesia telah memiliki akses terhadap sarana cuci tangan. Namun masih ada provinsi yang sekolah luar biasa diwilayahnya hanya separuh yang memiliki sarana cuci tangan, yakni Papua (33,3%) dan Aceh (39%). Sepertinya akses cuci tangan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan air, karena provinsi NTT yang rawan air dapat mencapai ketersediaan sarana cuci tangan hingga 79,4%. Oleh karenanya, provinsi yang sekolah luar biasa diwilayahnya belum memiliki akses cuci tangan secara luas bisa mengusahakan agar sekolah luar biasa tersebut dapat memiliki sarana cuci tangan di tahun mendatang.

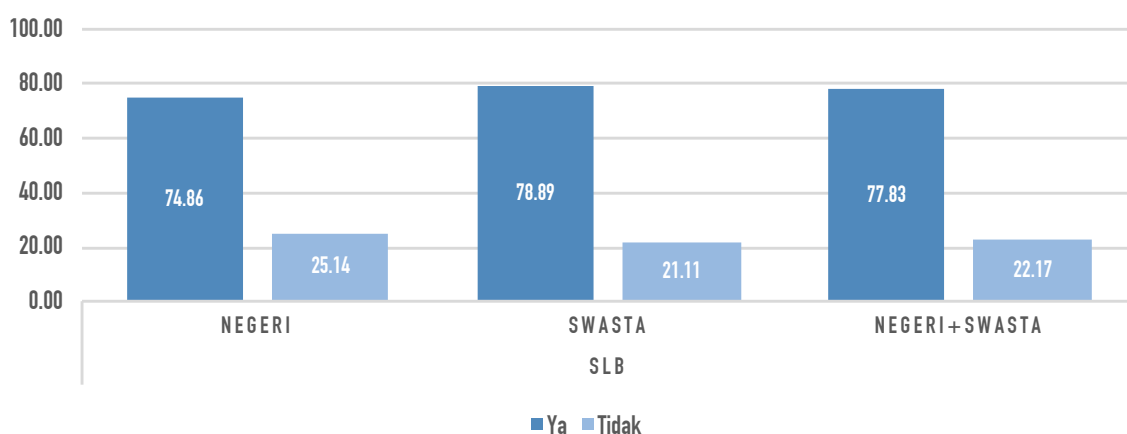




Grafik 3.29 Sarana Cuci Tangan Pada SLB Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

3.5.3.2 Menurut Status Sekolah

Apabila diperbandingkan, antara SLB negeri dan swasta maka persentase SLB swasta di Indonesia memiliki sarana cuci tangan lebih banyak daripada SLB negeri. Hampir 79% SLB swasta memiliki sarana cuci tangan, dimana SLB negeri hanya sekitar hampir 75%. Perbedaan yang tidak terlalu signifikan namun bermakna. Lebih banyak peserta didik di SLB negeri yang tidak memiliki akses pada sarana cuci tangan daripada SLB swasta. Maka diperlukan dorongan agar baik SLB negeri dan swasta sama-sama memperhatikan sarana cuci tangan disekolahnya. Karena sarana cuci tangan merupakan langkah sederhana yang bisa membiasakan anak didik untuk praktek cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air besar.



Grafik 3.30 Sarana Cuci Tangan Pada SLB Menurut Status Sekolah Tahun 2016/2017

IV. INDIKATOR DAN INDEKS SANITASI SEKOLAH

Kondisi Sanitasi Sekolah yang disajikan dalam bab ini berdasarkan dua hal. Pertama, yaitu menurut indikator akses air, akses jamban dan akses sarana cuci tangan. Indikator ini menganalisa rata-rata secara nasional yang merupakan gabungan dari jenjang, di semua provinsi dan semua tipe sekolah. Kedua, menurut indeks atau rata-rata

4.1 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SANITASI SEKOLAH

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, akses Sanitasi Sekolah terbagi dalam tiga indikator dan setiap indikator terdapat tiga tingkatan yang berbeda. Tiga indikator tersebut adalah, akses pada air, akses jamban dan akses sarana cuci tangan. Sedangkan tiga tingkatan adalah akses dasar, akses terbatas dan tidak ada akses. Di bawah ini rangkuman indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sanitasi Sekolah

4.1.1 AKSES AIR

Persentase akses terhadap air dibagi menjadi tiga indikator yakni, tidak memiliki akses air, memiliki akses air namun terbatas, serta memiliki akses air dasar yakni sumber air layak dan cukup sepanjang waktu. Jenjang pendidikan yang paling banyak memiliki akses air dasar adalah SLB (76,47%) dan SMK (74,65%). Jenjang pendidikan yang paling banyak tidak memiliki akses terhadap air adalah SD (31,85%). Ini berarti sejumlah 46.985 SD di seluruh Indonesia tidak memiliki akses terhadap air. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu hambatan dalam proses belajar mengajar, di mana siswa tidak mendapat akses terhadap air bersih.

Tabel 4.1 Indikator Akses Air pada Semua Jenjang Pendidikan

INDIKATOR	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
% Akses Air Dasar	64.76 (95519)	65.03 (24556)	70.40 (9210)	74.65 (9881)	76.47 (1583)	65.69 (140749)
% Akses Air Terbatas Sekolah	3.39 (4999)	4.72 (1782)	3.57 (467)	3.11 (412)	1.50 (31)	3.79 (7691)
% Tidak ada Akses Air	31.85 (46985)	30.25 (11425)	26.03 (3405)	22.23 (2943)	22.03 (456)	30.52 (65241)
Total	100.00 (147503)	100.00 (37763)	100.00 (13082)	100.00 (13236)	100.00 (2070)	100.00 (213654)

4.1.2 AKSES JAMBAK

Persentase akses terhadap jamban dibagi menjadi tiga indikator yakni, tidak memiliki akses jamban, memiliki akses jamban namun terbatas, serta memiliki akses jamban dasar yakni terpisah dan dalam kondisi baik atau rusak ringan. Jenjang pendidikan yang paling banyak memiliki akses jamban dasar adalah SMP (41,88%) dan SMK (41,36%). Jenjang pendidikan yang paling sedikit memiliki akses jamban dasar adalah SLB (29,95%). Namun demikian SLB memiliki akses jamban terbatas yang paling banyak, yakni sebesar 63,24%. Sedangkan yang paling sedikit yang memiliki akses jamban terbatas adalah SMK (44,56%).

Jenjang pendidikan yang paling banyak tidak memiliki jamban adalah SMK (14,08%) dan SMA (13,21%). Dilanjutkan dengan SD (12,19%) tidak memiliki jamban, ini berarti jika total SD adalah 147.503 di seluruh, maka sebanyak 17.983 SD belum memiliki jamban.

Tabel 4.2 Indikator Akses Jamban pada Semua Jenjang Pendidikan

INDIKATOR	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
% Akses Jamban Dasar	31.40 (46315)	41.88 (15814)	35.82 (4686)	41.36 (5474)	29.95 (620)	34.12 (72909)
% Akses Jamban Terbatas	56.41 (83205)	47.24 (17840)	50.97 (6668)	44.56 (5898)	63.24 (1309)	53.79 (114920)
% Tidak ada Jamban	12.19 (17983)	10.88 (4109)	13.21 (1728)	14.08 (1864)	6.81 (141)	12.09 (25825)
Total	100.00 (147503)	100.00 (37763)	100.00 (13082)	100.00 (13236)	100.00 (2070)	100.00 (213654)

4.1.3 AKSES SARANA CUCI TANGAN

Dari seluruh jenjang pendidikan, sekolah luar biasa memiliki akses yang paling besar terhadap sarana cuci tangan, yakni sebesar 77,83% SLB memiliki sarana cuci tangan. Disusul oleh sekolah pada jenjang SMK dan SMA yang rerata persentase sekolah pada jenjang tersebut sekitar 68% memiliki akses terhadap sarana cuci tangan. Sedangkan yang paling rendah memiliki akses terhadap sarana cuci tangan adalah sekolah pada jenjang SMP, hanya sekitar 60,19%. Ini berarti masih ada sekitar 15.035 SMP di seluruh Indonesia tidak memiliki sarana cuci tangan. Selain itu jenjang SD juga menjadi jenjang yang rendah dalam akses terhadap sarana cuci tangan. Sekitar 34,9% SD tidak memiliki sarana cuci tangan, yang berarti 51.485 SD di seluruh Indonesia tidak menyediakan sarana cuci tangan. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena pembiasaan untuk melakukan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) sudah sepatutnya dimulai sejak dini.

Tabel 4.3 Indikator Akses Sarana Cuci Tangan pada Semua Jenjang Pendidikan

INDIKATOR	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
% Akses Cuci Tangan	65.10 (96018)	60.19 (22728)	68.72 (8990)	68.86 (9114)	77.83 (1611)	64.81 (138461)
% Tidak ada Akses	34.90 (51485)	39.81 (15035)	31.28 (4092)	31.14 (4122)	22.17 (459)	35.19 (75193)
Total	100.00 (147503)	100.00 (37763)	100.00 (13082)	100.00 (13236)	100.00 (2070)	100.00 (213654)



4.2 INDEKS SANITASI SEKOLAH

Indeks Sanitasi Sekolah adalah pendekatan statistik untuk dapat membandingkan kinerja Sanitasi Sekolah antar provinsi, dengan pemilahan menurut jenjang pendidikan. Melalui pendekatan ini, maka memungkinkan untuk membandingkan status suatu kabupaten atau kota dengan kabupaten/kota lainnya. Pada bagian ini, analisa Indeks Sanitasi Sekolah dilakukan baik pada semua jenjang secara keseluruhan, maupun untuk masing-masing jenjang.

Secara nasional, jenjang sekolah yang memiliki Indeks Sanitasi Sekolah yang paling tinggi adalah SMK (61,62%) dan disusul oleh SLB (61,42%). Sekolah dasar di Indonesia masuk kategori Indeks Sanitasi Sekolah yang rendah dengan meraih nilai 53,75%.

4.2.1 INDEKS SANITASI SEKOLAH UNTUK SEKOLAH DASAR

Pada jenjang Sekolah Dasar, provinsi dengan indeks tertinggi adalah provinsi DI Yogyakarta (80,76%). Sebaliknya, provinsi Papua adalah provinsi dengan Indeks Sanitasi Sekolah terendah yang hanya mencapai 24,96%.

Tabel 4.4 Indeks Sanitasi Sekolah Jenjang SD Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

NO	PROVINSI	SD			
		AKSES DASAR			INDEKS SANITASI SEKOLAH
		Air	Jamban	CTPS	
		W	S	H	
1	DKI Jakarta	84.30	51.19	89.53	75.01
2	Jawa Barat	71.42	31.46	57.72	53.54
3	Banten	75.48	33.76	63.73	57.66
4	Jawa Tengah	78.99	41.54	84.94	68.49
5	DI Yogyakarta	83.39	65.36	93.54	80.76
6	Jawa Timur	73.32	30.93	73.99	59.41
7	Aceh	61.72	23.47	45.68	43.62
8	Sumatera Utara	56.61	29.08	40.36	42.01
9	Sumatera Barat	61.73	33.66	52.16	49.18
10	Riau	65.91	38.00	61.83	55.25
11	Kepulauan Riau	56.08	50.33	83.30	63.24
12	Jambi	59.13	24.77	59.21	47.71
13	Sumatera Selatan	64.06	34.93	61.32	53.44
14	Bangka Belitung	78.80	63.34	83.17	75.10
15	Bengkulu	67.82	26.69	53.08	49.19
16	Lampung	73.32	28.57	70.85	57.58
17	Kalimantan Barat	38.28	32.86	49.80	40.32
18	Kalimantan Tengah	45.97	22.41	54.41	40.93
19	Kalimantan Selatan	57.88	30.54	77.84	55.42
20	Kalimantan Timur	40.37	42.06	71.06	51.16
21	Kalimantan Utara	30.43	29.13	47.83	35.80
22	Sulawesi Utara	69.76	25.51	60.43	51.90
23	Gorontalo	67.99	29.86	78.20	58.68
24	Sulawesi Tengah	56.36	16.45	50.99	41.27
25	Sulawesi Selatan	66.21	27.05	69.24	54.17
26	Sulawesi Barat	47.29	10.53	53.17	36.99
27	Sulawesi Tenggara	46.78	17.28	44.47	36.18
28	Maluku	50.61	13.57	68.99	44.39
29	Maluku Utara	52.29	9.72	65.78	42.60
30	Bali	56.27	43.04	86.49	61.93
31	Nusa Tenggara Barat	68.03	24.94	68.95	53.97
32	Nusa Tenggara Timur	29.43	19.03	65.81	38.09
33	Papua	32.07	11.45	31.35	24.96
34	Papua Barat	39.23	17.29	41.10	32.54
	Indonesia	64.76	31.40	65.10	53.75

4.2.2 INDEKS SANITASI SEKOLAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Pada jenjang SMP, provinsi dengan indeks tertinggi adalah provinsi DI Yogyakarta (77,70%). Sebaliknya, provinsi Papua adalah provinsi dengan Indeks Sanitasi Sekolah terendah yang hanya mencapai 32,05%

Tabel 4.5 Indeks Sanitasi Sekolah Jenjang SMP Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

NO	PROVINSI	SMP			
		AKSES DASAR			INDEKS SANITASI SEKOLAH (W+S+H)/3
		Air	Jamban	CTPS	
		W	S	H	
1	DKI Jakarta	84.23	55.27	84.78	74.76
2	Jawa Barat	75.42	44.57	64.51	61.50
3	Banten	78.94	44.90	65.44	63.10
4	Jawa Tengah	80.11	54.73	73.64	69.49
5	DI Yogyakarta	83.10	68.52	81.48	77.70
6	Jawa Timur	75.04	42.99	66.94	61.66
7	Aceh	57.73	29.70	41.43	42.95
8	Sumatera Utara	64.75	42.55	41.29	49.53
9	Sumatera Barat	58.56	42.34	44.27	48.39
10	Riau	64.80	46.06	52.31	54.39
11	Kepulauan Riau	53.17	58.01	73.41	61.53
12	Jambi	63.92	35.93	54.59	51.48
13	Sumatera Selatan	64.45	40.33	54.58	53.12
14	Bangka Belitung	78.54	68.29	72.20	73.01
15	Bengkulu	67.47	37.35	49.88	51.57
16	Lampung	73.82	36.76	65.60	58.73
17	Kalimantan Barat	44.32	46.08	54.00	48.13
18	Kalimantan Tengah	48.74	38.69	52.64	46.69
19	Kalimantan Selatan	53.74	44.73	76.19	58.22
20	Kalimantan Timur	43.56	52.48	66.01	54.02
21	Kalimantan Utara	31.68	41.61	55.28	42.86
22	Sulawesi Utara	67.47	31.25	58.10	52.27
23	Gorontalo	62.04	44.75	60.19	55.66
24	Sulawesi Tengah	57.02	31.65	47.04	45.24
25	Sulawesi Selatan	68.09	41.62	62.15	57.29
26	Sulawesi Barat	50.00	27.51	52.66	43.39
27	Sulawesi Tenggara	46.99	29.18	47.67	41.28
28	Maluku	45.58	20.37	59.77	41.90
29	Maluku Utara	47.40	18.28	56.21	40.63
30	Bali	65.92	55.97	80.35	67.41
31	Nusa Tenggara Barat	60.33	31.86	61.73	51.30
32	Nusa Tenggara Timur	28.65	28.40	50.66	35.91
33	Papua	35.91	25.00	35.23	32.05
34	Papua Barat	38.21	28.57	42.86	36.55
	Indonesia	65.03	41.88	60.19	55.70

4.2.3 INDEKS SANITASI SEKOLAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS

Pada jenjang SMA, provinsi dengan indeks tertinggi adalah provinsi Bangka Belitung (74,75%). Sebaliknya, provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi dengan Indeks Sanitasi Sekolah terendah yang hanya mencapai 38,01%

Tabel 4.6 Indeks Sanitasi Sekolah Jenjang SMA Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

NO	PROVINSI	SMA			
		AKSES DASAR			INDEKS SANITASI SEKOLAH
		Air	Jamban	CTPS	
		(W3)	(S7)	(H1)	
1	DKI Jakarta	85.12	42.35	94.76	74.07
2	Jawa Barat	80.27	34.15	74.22	62.88
3	Banten	83.79	40.12	79.84	67.92
4	Jawa Tengah	86.23	40.61	82.96	69.93
5	DI Yogyakarta	90.68	43.48	88.20	74.12
6	Jawa Timur	78.20	34.52	77.46	63.39
7	Aceh	58.97	30.37	50.69	46.68
8	Sumatera Utara	70.74	33.88	55.53	53.38
9	Sumatera Barat	70.10	37.62	58.20	55.31
10	R i a u	70.48	38.57	64.29	57.78
11	Kepulauan Riau	58.47	45.76	78.81	61.02
12	J a m b i	67.87	42.53	68.33	59.58
13	Sumatera Selatan	67.92	39.97	65.52	57.80
14	Bangka Belitung	81.82	66.67	75.76	74.75
15	Bengkulu	78.36	41.79	64.93	61.69
16	Lampung	82.13	37.66	74.04	64.61
17	Kalimantan Barat	51.87	42.14	61.60	51.87
18	Kalimantan Tengah	59.91	34.05	56.90	50.29
19	Kalimantan Selatan	67.93	46.20	82.07	65.40
20	Kalimantan Timur	46.01	35.68	72.30	51.33
21	Kalimantan Utara	28.07	45.61	47.37	40.35
22	Sulawesi Utara	68.98	36.57	70.37	58.64
23	Gorontalo	78.95	54.39	68.42	67.25
24	Sulawesi Tengah	62.56	33.00	53.69	49.75
25	Sulawesi Selatan	76.50	37.10	64.84	59.48
26	Sulawesi Barat	73.75	32.50	62.50	56.25
27	Sulawesi Tenggara	53.87	20.07	48.24	40.73
28	Maluku	50.76	19.08	60.69	43.51
29	Maluku Utara	48.02	20.34	57.63	42.00
30	B a l i	64.15	42.77	87.42	64.78
31	Nusa Tenggara Barat	70.68	29.97	78.18	59.61
32	Nusa Tenggara Timur	35.98	28.05	50.00	38.01
33	Papua	42.79	29.30	48.37	40.16
34	Papua Barat	50.86	35.34	53.45	46.55
	Indonesia	70.40	35.82	68.72	58.31

4.2.4 INDEKS SANITASI SEKOLAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Pada jenjang SMK, provinsi dengan indeks tertinggi adalah provinsi Bangka Belitung (75,93%). Sebaliknya, provinsi Maluku Utara adalah provinsi dengan indeks Sanitasi Sekolah terendah yang hanya mencapai 38,14%

Tabel 4.7 Indeks Sanitasi Sekolah Jenjang SMK Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

NO	PROVINSI	SMK			
		AKSES DASAR			INDEKS SANITASI SEKOLAH
		Air	Jamban	CTPS	
		(W)	(S)	(H)	
1	DKI Jakarta	83.08	47.18	85.64	71.97
2	Jawa Barat	79.67	40.04	71.98	63.89
3	Banten	75.70	44.39	72.90	64.33
4	Jawa Tengah	83.90	48.55	78.15	70.20
5	DI Yogyakarta	89.04	50.23	86.76	75.34
6	Jawa Timur	78.20	37.66	70.59	62.15
7	Aceh	61.62	38.38	45.96	48.65
8	Sumatera Utara	72.45	43.85	53.94	56.75
9	Sumatera Barat	69.85	45.23	50.25	55.11
10	R i a u	78.75	45.42	60.07	61.42
11	Kepulauan Riau	45.56	38.89	72.22	52.22
12	J a m b i	73.21	47.62	64.88	61.90
13	Sumatera Selatan	70.92	48.23	68.09	62.41
14	Bangka Belitung	81.48	66.67	79.63	75.93
15	Bengkulu	77.78	45.56	55.56	59.63
16	Lampung	85.68	43.88	71.82	67.13
17	Kalimantan Barat	59.36	50.27	58.82	56.15
18	Kalimantan Tengah	56.59	38.76	58.14	51.16
19	Kalimantan Selatan	67.77	52.07	79.34	66.39
20	Kalimantan Timur	52.34	48.60	72.90	57.94
21	Kalimantan Utara	28.57	50.00	64.29	47.62
22	Sulawesi Utara	71.91	39.33	65.73	58.99
23	Gorontalo	72.73	50.91	60.00	61.21
24	Sulawesi Tengah	66.47	30.06	52.02	49.52
25	Sulawesi Selatan	75.70	36.21	67.06	59.66
26	Sulawesi Barat	60.33	23.97	49.59	44.63
27	Sulawesi Tenggara	51.39	26.39	52.78	43.52
28	Maluku	49.52	22.86	60.95	44.44
29	Maluku Utara	47.75	17.12	49.55	38.14
30	B a l i	65.34	43.75	86.36	65.15
31	Nusa Tenggara Barat	70.69	26.21	67.24	54.71
32	Nusa Tenggara Timur	34.23	27.69	53.08	38.33
33	Papua	59.20	36.00	54.40	49.87
34	Papua Barat	58.82	33.33	52.94	48.37
	Indonesia	74.65	41.36	68.86	61.62

4.2.5 INDEKS SANITASI SEKOLAH UNTUK SEKOLAH LUAR BIASA

Pada jenjang SLB, provinsi dengan indeks tertinggi adalah provinsi DI Yogyakarta (80,26%). Sebaliknya, provinsi Papua adalah provinsi dengan indeks Sanitasi Sekolah terendah yang hanya mencapai 36,11%

Tabel 4.8 Indeks Sanitasi Sekolah Jenjang SLB Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

NO	PROVINSI	SLB			
		AKSES DASAR			INDEKS SANITASI SEKOLAH
		Air	Jamban	CTPS	
		(W)	(S)	(H)	
1	DKI Jakarta	91.95	42.53	94.25	76.25
2	Jawa Barat	82.29	27.79	78.47	62.85
3	Banten	73.56	29.89	79.31	60.92
4	Jawa Tengah	80.46	31.03	82.76	64.75
5	DI Yogyakarta	90.79	53.95	96.05	80.26
6	Jawa Timur	79.18	22.88	85.35	62.47
7	Aceh	69.49	27.12	38.98	45.20
8	Sumatera Utara	72.92	45.83	64.58	61.11
9	Sumatera Barat	70.37	20.00	61.48	50.62
10	R i a u	78.05	36.59	63.41	59.35
11	Kepulauan Riau	61.54	53.85	84.62	66.67
12	J a m b i	56.25	43.75	62.50	54.17
13	Sumatera Selatan	73.33	46.67	66.67	62.22
14	Bangka Belitung	100.00	55.56	77.78	77.78
15	Bengkulu	73.33	46.67	60.00	60.00
16	Lampung	81.82	50.00	86.36	72.73
17	Kalimantan Barat	57.89	57.89	84.21	66.67
18	Kalimantan Tengah	77.27	50.00	86.36	71.21
19	Kalimantan Selatan	66.67	28.21	87.18	60.68
20	Kalimantan Timur	48.28	44.83	82.76	58.62
21	Kalimantan Utara	50.00	50.00	100.00	66.67
22	Sulawesi Utara	65.22	26.09	91.30	60.87
23	Gorontalo	50.00	37.50	75.00	54.17
24	Sulawesi Tengah	81.82	40.91	90.91	71.21
25	Sulawesi Selatan	81.01	16.46	72.15	56.54
26	Sulawesi Barat	72.73	13.64	54.55	46.97
27	Sulawesi Tenggara	61.82	16.36	63.64	47.27
28	Maluku	53.85	15.38	69.23	46.15
29	Maluku Utara	68.75	31.25	87.50	62.50
30	B a l i	75.00	62.50	93.75	77.08
31	Nusa Tenggara Barat	63.89	25.00	61.11	50.00
32	Nusa Tenggara Timur	47.06	32.35	79.41	52.94
33	Papua	66.67	8.33	33.33	36.11
34	Papua Barat	80.00	0.00	80.00	53.33
	Indonesia	76.47	29.95	77.83	61.42



4.2.6 INDEKS SANITASI SEKOLAH SEMUA JENJANG

Provinsi DI Yogyakarta (DIY) memiliki Indeks Sanitasi Sekolah tertinggi se Indonesia untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB. Provinsi Bangka Belitung menduduki peringkat kedua terbaik untuk Indeks Sanitasi Sekolah pada semua jenjang kecuali jenjang SMP. Pada jenjang SMP posisi kedua terbaik diduduki oleh provinsi DKI Jakarta yang juga menduduki peringkat ketiga pada jenjang selain SMP, yakni SD, SMA, SMK dan SLB. Bisa disimpulkan bahwa, ada tiga provinsi dengan Indeks Sanitasi Sekolah tertinggi di Indonesia, yaitu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, provinsi Bangka Belitung, dan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Meskipun provinsi DIY, Bangka Belitung dan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan indeks Sanitasi Sekolah yang terbaik, bukan berarti semua sekolah di tiga provinsi tersebut sudah memiliki akses pada air, jamban dan sarana cuci tangan. Misalnya, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hanya 47,70% Sekolah Dasar yang memiliki akses pada jamban yang berfungsi dengan baik. Artinya, satu diantara dua Sekolah Dasar di provinsi DKI Jakarta masih memiliki masalah pada penyediaan jambannya.

Sebaliknya, provinsi Papua selalu muncul di peringkat terakhir pada setiap jenjang kecuali pada jenjang SMA. Pada jenjang SMA posisi paling rendah dalam hal indeks Sanitasi Sekolah ditempati oleh provinsi NTT. Adapun 5 provinsi dengan indeks Sanitasi Sekolah yang dikategorikan rendah adalah provinsi Papua Barat, NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Sulawesi Barat. Pengembangan dan pembangunan Sanitasi Sekolah seharusnya fokus pada daerah-daerah yang disebutkan di atas. Selain itu, diperlukan upaya dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemerintah daerah akan ancaman yang akan terjadi apabila Sanitasi Sekolah tidak dijadikan prioritas. Ancaman tersebut antara lain pada sektor kesehatan, semakin banyak anak yang sakit karena kesehatan lingkungannya yang tidak mendukung. Ancaman lain adalah pada sektor pendidikan, yaitu tingginya angka membolos atau tidak masuk sekolah. Tentunya ini disebabkan oleh penyakit-penyakit berbasis lingkungan yang menyerang peserta didik, sehingga mengakibatkan mereka tidak dapat masuk sekolah.

Tabel 4.9 Indeks Sanitasi Sekolah Semua Jenjang Menurut Provinsi Tahun 2016/2017

NO	PROVINSI	Semua Jenjang			
		AKSES DASAR			INDEKS SANITASI SEKOLAH
		Air	Jamban	CTPS	
		(W)	(S)	(H)	
1	DKI Jakarta	85.74	47.70	89.79	74.41
2	Jawa Barat	77.81	35.60	69.38	60.93
3	Banten	77.50	38.61	72.24	62.78
4	Jawa Tengah	81.94	43.29	80.49	68.57
5	DI Yogyakarta	87.40	56.31	89.21	77.64
6	Jawa Timur	76.79	33.80	74.87	61.82
7	Aceh	61.91	29.81	44.55	45.42
8	Sumatera Utara	67.49	39.04	51.14	52.56
9	Sumatera Barat	66.12	35.77	53.27	51.72
10	R i a u	71.60	40.93	60.38	57.64
11	Kepulauan Riau	54.96	49.37	78.47	60.93
12	J a m b i	64.08	38.92	61.90	54.97
13	Sumatera Selatan	68.14	42.02	63.24	57.80
14	Bangka Belitung	84.13	64.10	77.71	75.31
15	Bengkulu	72.95	39.61	56.69	56.42
16	Lampung	79.35	39.37	73.74	64.15
17	Kalimantan Barat	50.35	45.85	61.69	52.63
18	Kalimantan Tengah	57.70	36.78	61.69	52.06
19	Kalimantan Selatan	62.80	40.35	80.52	61.22
20	Kalimantan Timur	46.11	44.73	73.00	54.61
21	Kalimantan Utara	33.75	43.27	62.95	46.66
22	Sulawesi Utara	68.67	31.75	69.19	56.53
23	Gorontalo	66.34	43.48	68.36	59.39
24	Sulawesi Tengah	64.85	30.41	58.93	51.40
25	Sulawesi Selatan	73.50	31.69	67.09	57.43
26	Sulawesi Barat	60.82	21.63	54.49	45.65
27	Sulawesi Tenggara	52.17	21.86	51.36	41.79
28	Maluku	50.06	18.25	63.92	44.08
29	Maluku Utara	52.84	19.34	63.33	45.17
30	B a l i	65.34	49.61	86.87	67.27
31	Nusa Tenggara Barat	66.72	27.59	67.44	53.92
32	Nusa Tenggara Timur	35.07	27.10	59.79	40.66
33	Papua	47.33	22.02	40.54	36.63
34	Papua Barat	53.43	22.91	54.07	43.47
	Indonesia	70.26	36.08	68.14	58.16

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Pada tingkat global, Sanitasi Sekolah merupakan salah satu prioritas pembangunan yang termasuk ke dalam SDGs tujuan 4a. Tujuan 4a adalah “Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dengan beberapa indikator. Tiga indikator diantaranya adalah akses pada sumber air yang layak, fasilitas jamban yang berfungsi dan terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta akses pada fasilitas cuci tangan dengan ketersediaan sabun dan air mengalir. Berdasarkan Analisa data yang ada, maka terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Secara umum kondisi akses pada sumber air yang layak masih rendah. Rata-rata nasional untuk akses pada sumber air yang layak adalah 65,69%.
2. Akses pada fasilitas jamban yang berfungsi dan terpisah antara laki-laki dan perempuan sangat rendah. Rata-rata nasional untuk fasilitas jamban yang berfungsi dan terpisah antara laki-laki dan perempuan adalah 34,12%. Bisa dikatakan, hanya 1 dari 3 sekolah yang memiliki fasilitas jamban yang sesuai dengan indikator SDGs
3. Perhatian dunia pendidikan pada kesehatan dan kebersihan diri masih rendah. Hanya 64,81% sekolah di Indonesia yang memiliki akses pada fasilitas cuci tangan di sekolah.
4. Secara umum, provinsi DI Yogyakarta adalah provinsi dengan kondisi Sanitasi Sekolahnya yang terbaik dengan Indeks Sanitasi Sekolah 77,64%. Sedangkan provinsi Papua adalah provinsi dengan kondisi Sanitasi Sekolah terburuk dengan Indeks Sanitasi Sekolah sebesar 36,63%
5. Kondisi Sanitasi Sekolah pada Jenjang SMK relative paling baik dibandingkan dengan jenjang lainnya. SMK merupakan jenjang sekolah yang memiliki Indeks Sanitasi Sekolah yang paling tinggi sebesar 61,62%. Sementara itu, kondisi Sanitasi Sekolah pada jenjang SD adalah yang terburuk, dibandingkan dengan jenjang lainnya, di mana jenjang SD memiliki indeks Sanitasi Sekolah sebesar 53,75%.

5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan analisa data yang dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan pada para pengambil kebijakan, baik di tingkat sekolah, dinas maupun kementerian, yaitu:

1. Saat ini data terdapat 32% sekolah di berbagai tingkatan yang tidak mengisi data Sanitasi Sekolah. Angka ini sangat besar dan berdampak pada hasil analisa keseluruhan. Perlu ada upaya untuk mendorong keterisian data Sanitasi Sekolah dalam Dapodik.
2. Berdasarkan definisi indikator Sanitasi Sekolah yang dipublikasikan oleh UNICEF dan WHO, indikator kebersihan, tidak saja hanya dilihat dari ketersediaan fasilitas cuci tangan, namun juga ketersediaan sabun dan air yang mengalir. Karena data tersebut belum terdapat dalam Dapodik, maka diperlukan satu pertanyaan tambahan dalam Dapodik untuk mendapatkan informasi tersebut.
3. Disadari bahwa pengisian data Dapodik di setiap sekolah dilakukan oleh operator Dapodik. Tidak semua operator Dapodik memiliki pengetahuan tentang Sanitasi Sekolah, terutama istilah-istilah yang sangat teknis. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas data melalui pelatihan pengisian data Sanitasi Sekolah atau melalui pengembangan panduan pengisian data Sanitasi Sekolah yang dapat diunduh dengan mudah dari website Dapodik.
4. Berdasarkan analisa dalam publikasi ini, kondisi Sanitasi Sekolah di Indonesia masih jauh dari standar yang diharapkan. Diperlukan upaya untuk mendorong agar analisa data dalam publikasi ini dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran baik oleh Kementerian terkait di tingkat pusat, maupun oleh dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten.

LAMPIRAN 1

RUMUS ANALISA INDIKATOR SANITASI SEKOLAH

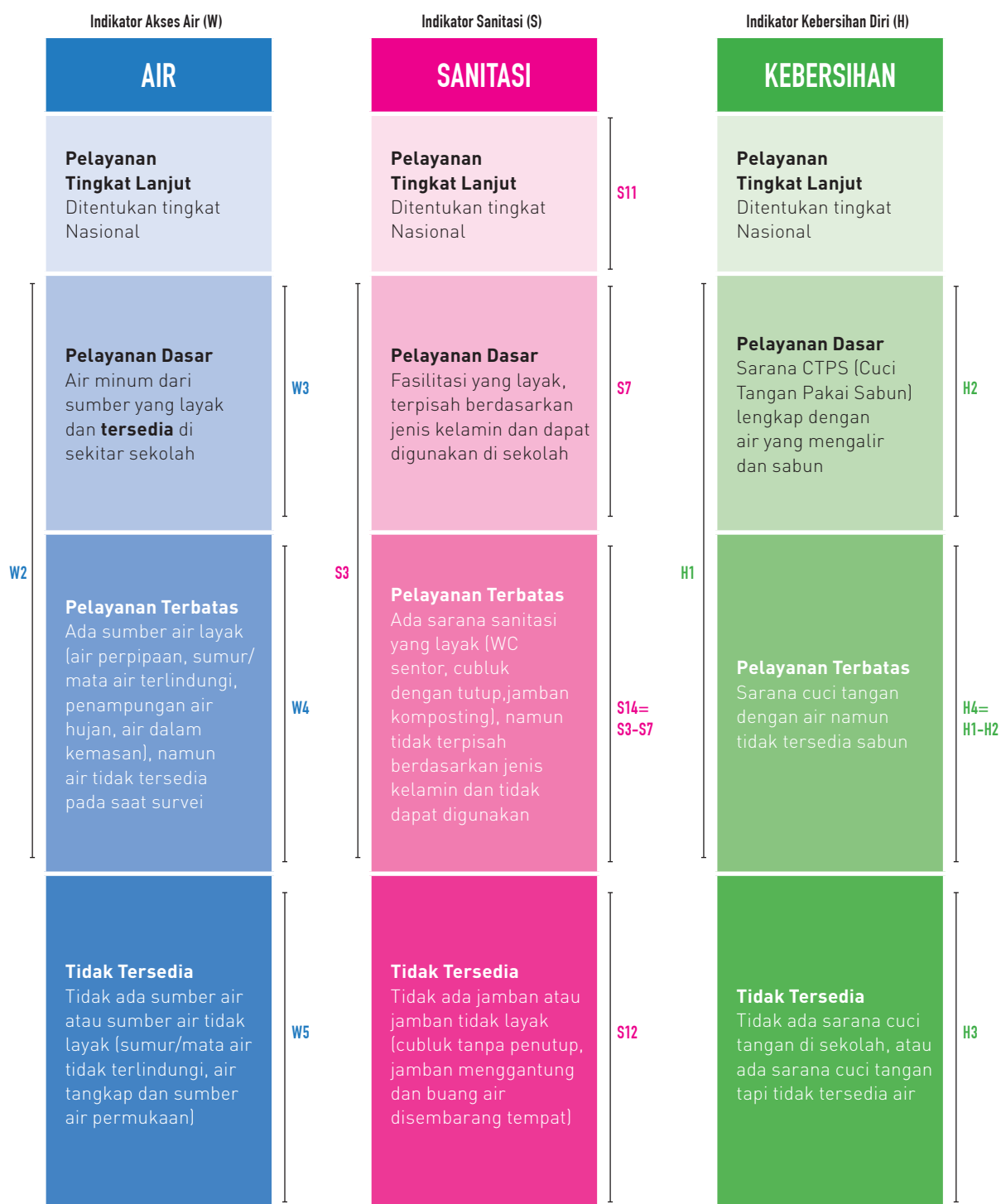
INDIKATOR	RUMUSAN	JENJANG
W1 % Sekolah dengan sumber air dilingkungan sekolah	$W1 = \frac{\text{Jumlah Sekolah memiliki Sumber Air}}{\text{Jumlah Sekolah seluruhnya}} \times 100\%$	SD, SMP, SMA, SMK
W2 % Sekolah dengan sumber air layak dan tersedia dilingkungan sekolah	$W2 = \frac{\text{Jumlah Sekolah memiliki Sumber Air Layak}}{\text{Jumlah Sekolah seluruhnya}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sumber air layak: Ledeng/PAM, Sumur Pompa, Air Hujan, Mata Air Terlindungi, Sumur Terlindungi, dan Air Kemasan</p>	SD, SMP, SMA, SMK
W3 % Sekolah dengan sumber air layak, tersedia dilingkungan sekolah dan cukup (tersedia sepanjang waktu)	$W3 = \frac{\text{Jumlah Sekolah memiliki Sumber Air Layak dan Cukup}}{\text{Jumlah Sekolah seluruhnya}} \times 100\%$	SD, SMP, SMA, SMK
W4 % Sekolah dengan sumber air layak namun tidak cukup (tidak tersedia sepanjang waktu)	$W3 = \frac{\text{Jumlah Sekolah memiliki Sumber Air Layak tapi Tidak Cukup}}{\text{Jumlah Sekolah seluruhnya}} \times 100\%$ <p>Atau $W4 = W2 - W3$</p>	SD, SMP, SMA, SMK
W5 % Sekolah dengan sumber air tidak layak ATAU tidak ada sumber air dilingkungan sekolah	$W5 = 100\% - W2$	SD, SMP, SMA, SMK
S1 % Sekolah memiliki jamban	$S1 = \frac{\text{Jumlah Sekolah memiliki Jamban}}{\text{Jumlah Sekolah seluruhnya}} \times 100\%$	SD, SMP, SMA, SMK
S2 Rasio jamban pada sekolah yang memiliki jamban	$S2 = \frac{\text{Jumlah Siswa dari Sekolah memiliki Jamban}}{\text{Jumlah Jamban seluruhnya}} \times 100\%$	SD, SMP, SMA, SMK
S3 % Sekolah memiliki jamban layak	$S3 = \frac{\text{Jumlah Sekolah memiliki Jamban Layak}}{\text{Jumlah Sekolah seluruhnya}} \times 100\%$ <p>Catatan: Toilet layak = Leher Angsa, Cubluk dengan Tutup</p>	SD, SMP, SMA, SMK
S4 % Sekolah memiliki jamban terpisah	$S4 = \frac{\text{Jumlah Sekolah memiliki Jamban Terpisah}}{\text{Jumlah Sekolah seluruhnya}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sekolah memiliki setidaknya 1 jamban untuk murid laki-laki dan 1 jamban untuk murid perempuan</p>	SD, SMP, SMA, SMK

S5 % Sekolah memiliki jamban layak dan terpisah	<p>Jumlah Sekolah memiliki Jamban Layak dan Terpisah</p> $S5 = \frac{\text{Jumlah Sekolah memiliki Jamban Layak dan Terpisah}}{\text{Jumlah Sekolah seluruhnya}} \times 100\%$	SD, SMP, SMA, SMK
S6 % jamban dengan kondisi baik dan rusak ringan	<p>Jumlah Jamban dengan kondisi Baik dan rusak ringan</p> $S6 = \frac{\text{Jumlah Jamban dengan kondisi Baik dan rusak ringan}}{\text{Jumlah Jamban seluruhnya}} \times 100\%$ <p>Catatan: Untuk jamban laki-laki, jamban perempuan, dan jamban bersama. Asumsi dasar bahwa jamban dengan kondisi baik dan rusak ringan adalah jamban tersebut berfungsi. Indikator ini untuk melihat proporsi jamban yang berfungsi.</p>	SD, SMP, SMA, SMK
S7 % Sekolah memiliki jamban layak dan terpisah dengan kondisi baik dan rusak ringan	<p>Jumlah Sekolah memiliki Jamban Layak, Terpisah, kondisi Baik & rusak ringan</p> $S7 = \frac{\text{Jumlah Sekolah memiliki Jamban Layak, Terpisah, kondisi Baik & rusak ringan}}{\text{Jumlah Sekolah seluruhnya}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sekolah dianggap memiliki jamban dengan kondisi baik & rusak ringan apabila minimal ada satu unit jamban yang baik & rusak ringan.</p>	SD, SMP, SMA, SMK
S8 Rasio jamban siswa laki-laki pada sekolah yang memiliki jamban layak & terpisah dgn kondisi baik	<p>Jumlah Siswa Laki2 dari Sekolah memiliki Jamban Layak, Terpisah, & Baik</p> $S8 = \frac{\text{Jumlah Siswa Laki2 dari Sekolah memiliki Jamban Layak, Terpisah, & Baik}}{\text{Jumlah Jamban Laki-laki}}$	SD, SMP, SMA, SMK
S9 Rasio jamban siswa perempuan pada sekolah yang memiliki jamban layak dan terpisah dengan kondisi baik	<p>Jumlah Siswa Perempuan dari Sekolah memiliki Jamban Layak, Terpisah, & Baik</p> $S9 = \frac{\text{Jumlah Siswa Perempuan dari Sekolah memiliki Jamban Layak, Terpisah, & Baik}}{\text{Jumlah Jamban Perempuan}}$	SD, SMP, SMA, SMK
S10 % Sekolah memiliki rasio jamban sesuai dengan standar Permendiknas 24/2007 Permendiknas 33/2008 Permendiknas 40/2008	<p>Jumlah Sekolah memiliki Rasio Siswa per Jamban sesuai dengan Permendiknas tentang sarana/prasarana</p> $S10 = \frac{\text{Jumlah Sekolah memiliki Rasio Siswa per Jamban sesuai dengan Permendiknas tentang sarana/prasarana}}{\text{Jumlah Sekolah seluruhnya}}$ <p>Catatan: Rasio jamban SD : 1/60 siswa laki-laki 1/50 siswa perempuan Rasio jamban SMP, SMA/SMK: 1/40 siswa laki-laki 1/30 siswa perempuan Rasio jamban SLB: tidak ada rasio</p>	SD, SMP, SMA, SMK
S11 % Sekolah memiliki jamban layak dan terpisah dengan kondisi baik serta rasio jamban sesuai dengan standar Permendiknas 24/2007 Permendiknas 33/2008 Permendiknas 40/2008	<p>Jamban layak dan terpisah dengan kondisi baik serta rasio toilet sesuai dengan standar Permendiknas.</p> $S10 = \frac{\text{Jamban layak dan terpisah dengan kondisi baik serta rasio toilet sesuai dengan standar Permendiknas.}}{\text{Jumlah Sekolah seluruhnya}}$ <p>Catatan: Rasio jamban SD : 1/60 siswa laki-laki 1/50 siswa perempuan Rasio jamban SMP, SMA/SMK: 1/40 siswa laki-laki 1/30 siswa perempuan Rasio jamban SLB: tidak ada rasio</p>	SD, SMP, SMA, SMK
S12 % Sekolah tidak memiliki jamban, ATAU jamban tidak layak	$S12 = 100\% - S3$	SD, SMP, SMA, SMK
S13 % Sekolah memiliki jamban untuk siswa berkebutuhan khusus	Jumlah Sekolah yang memiliki setidaknya 1 jamban untuk siswa berkebutuhan khusus, dibagi dengan jumlah total Sekolah	SD, SMP, SMA, SMK

S14 % Sekolah memiliki jamban layak tetapi tidak terpisah dan kondisinya rusak berat	$S14 = S3 - S7$	SD, SMP, SMA, SMK
H1 % Sekolah dengan sarana cuci tangan	$H1 = \frac{\text{Jumlah Sekolah memiliki tempat cuci tangan}}{\text{Jumlah Sekolah seluruhnya}} \times 100\%$	SD, SMP, SMA, SMK
H2 % Sekolah dengan sarana cuci dengan sabun dan air mengalir	$H1 = \frac{\text{Jumlah Sekolah memiliki cuci tangan dan air mengalir dan sabun}}{\text{Jumlah Sekolah seluruhnya}} \times 100\%$	SD, SMP, SMA, SMK
H3 % Sekolah tanpa sarana cuci tangan	$H3 = 100\% - H1$	SD, SMP, SMA, SMK
H4 % Sekolah dengan sarana cuci tangan namun tidak terdapat sabun dan air mengalir	$H4 = H1 - H2$	SD, SMP, SMA, SMK
<p>Catatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data untuk S13 dan H2 tidak tersedia dalam sistem dapodik sehingga tidak dapat dianalisa 2. Indikator baru per Agustus 2017 <ol style="list-style-type: none"> a. S14 : % Sekolah memiliki jamban layak tetapi tidak terpisah dan kondisinya rusak berat b. H4 : % Sekolah dengan sarana cuci tangan namun tidak terdapat sabun dan air mengalir (tidak dapat dianalisa karena data indikator H2 tidak tersedia) 		

LAMPIRAN 2

TANGGA PELAYANAN SANITASI SEKOLAH



LAMPIRAN 3

INDIKATOR AKSES AIR

Tabel 1: Akses Air Pada Sekolah Dasar

NO	PROVINSI	SD		
		Tidak ada Akses (W5)	Akses Terbatas (W4)	Akses Dasar (W3)
1	DKI Jakarta	15.50	0.20	84.30
2	Jawa Barat	24.70	3.88	71.42
3	Banten	20.57	3.95	75.48
4	Jawa Tengah	19.65	1.36	78.99
5	DI Yogyakarta	15.80	0.81	83.39
6	Jawa Timur	24.73	1.96	73.32
7	Aceh	31.41	6.87	61.72
8	Sumatera Utara	39.24	4.15	56.61
9	Sumatera Barat	32.23	6.04	61.73
10	Riau	29.51	4.58	65.91
11	Kepulauan Riau	40.60	3.32	56.08
12	Jambi	36.81	4.05	59.13
13	Sumatera Selatan	33.36	2.58	64.06
14	Bangka Belitung	17.21	3.99	78.80
15	Bengkulu	27.49	4.69	67.82
16	Lampung	23.62	3.06	73.32
17	Kalimantan Barat	56.93	4.78	38.28
18	Kalimantan Tengah	51.34	2.69	45.97
19	Kalimantan Selatan	39.95	2.17	57.88
20	Kalimantan Timur	56.42	3.21	40.37
21	Kalimantan Utara	66.74	2.83	30.43
22	Sulawesi Utara	27.90	2.34	69.76
23	Gorontalo	27.71	4.30	67.99
24	Sulawesi Tengah	38.65	4.98	56.36
25	Sulawesi Selatan	28.68	5.11	66.21
26	Sulawesi Barat	47.14	5.57	47.29
27	Sulawesi Tenggara	47.74	5.48	46.78
28	Maluku	46.20	3.19	50.61
29	Maluku Utara	44.02	3.69	52.29
30	Bali	41.85	1.88	56.27
31	Nusa Tenggara Barat	26.52	5.45	68.03
32	Nusa Tenggara Timur	65.43	5.14	29.43
33	Papua	64.09	3.85	32.07
34	Papua Barat	57.87	2.90	39.23
	Indonesia	31.85	3.39	64.76

Tabel 2: Akses Air Pada Sekolah Menengah Pertama

NO	PROVINSI	SMP		
		Tidak ada Akses (W5)	Akses Terbatas (W4)	Akses Dasar (W3)
1	DKI Jakarta	15.49	0.27	84.23
2	Jawa Barat	20.19	4.39	75.42
3	Banten	17.02	4.04	78.94
4	Jawa Tengah	17.73	2.16	80.11
5	DI Yogyakarta	15.97	0.93	83.10
6	Jawa Timur	22.63	2.32	75.04
7	Aceh	32.87	9.40	57.73
8	Sumatera Utara	30.15	5.10	64.75
9	Sumatera Barat	34.11	7.34	58.56
10	R i a u	29.23	5.97	64.80
11	Kepulauan Riau	41.09	5.74	53.17
12	J a m b i	30.02	6.07	63.92
13	Sumatera Selatan	31.48	4.07	64.45
14	Bangka Belitung	16.10	5.37	78.54
15	Bengkulu	25.30	7.23	67.47
16	Lampung	21.77	4.41	73.82
17	Kalimantan Barat	48.72	6.96	44.32
18	Kalimantan Tengah	46.11	5.15	48.74
19	Kalimantan Selatan	41.84	4.42	53.74
20	Kalimantan Timur	50.99	5.45	43.56
21	Kalimantan Utara	64.60	3.73	31.68
22	Sulawesi Utara	28.55	3.98	67.47
23	Gorontalo	29.32	8.64	62.04
24	Sulawesi Tengah	38.18	4.80	57.02
25	Sulawesi Selatan	25.05	6.86	68.09
26	Sulawesi Barat	42.90	7.10	50.00
27	Sulawesi Tenggara	45.89	7.12	46.99
28	Maluku	51.59	2.84	45.58
29	Maluku Utara	44.92	7.67	47.40
30	B a l i	31.34	2.74	65.92
31	Nusa Tenggara Barat	31.51	8.17	60.33
32	Nusa Tenggara Timur	64.33	7.02	28.65
33	Papua	57.89	6.21	35.91
34	Papua Barat	55.00	6.79	38.21
	Indonesia	30.25	4.72	65.03

Tabel 3: Akses Air Pada Sekolah Menengah Atas

NO	PROVINSI	SMA		
		Tidak ada Akses (W5)	Akses Terbatas (W4)	Akses Dasar (W3)
1	DKI Jakarta	14.88	0.00	85.12
2	Jawa Barat	17.14	2.59	80.27
3	Banten	14.82	1.38	83.79
4	Jawa Tengah	12.95	0.82	86.23
5	DI Yogyakarta	9.32	0.00	90.68
6	Jawa Timur	19.58	2.22	78.20
7	Aceh	30.57	10.45	58.97
8	Sumatera Utara	26.08	3.18	70.74
9	Sumatera Barat	23.47	6.43	70.10
10	Riau	25.24	4.29	70.48
11	Kepulauan Riau	36.44	5.08	58.47
12	Jambi	27.15	4.98	67.87
13	Sumatera Selatan	28.30	3.77	67.92
14	Bangka Belitung	18.18	0.00	81.82
15	Bengkulu	19.40	2.24	78.36
16	Lampung	16.17	1.70	82.13
17	Kalimantan Barat	42.39	5.74	51.87
18	Kalimantan Tengah	37.07	3.02	59.91
19	Kalimantan Selatan	27.17	4.89	67.93
20	Kalimantan Timur	49.77	4.23	46.01
21	Kalimantan Utara	64.91	7.02	28.07
22	Sulawesi Utara	28.24	2.78	68.98
23	Gorontalo	12.28	8.77	78.95
24	Sulawesi Tengah	30.54	6.90	62.56
25	Sulawesi Selatan	19.08	4.42	76.50
26	Sulawesi Barat	22.50	3.75	73.75
27	Sulawesi Tenggara	40.49	5.63	53.87
28	Maluku	45.42	3.82	50.76
29	Maluku Utara	46.89	5.08	48.02
30	Bali	34.59	1.26	64.15
31	Nusa Tenggara Barat	24.10	5.21	70.68
32	Nusa Tenggara Timur	58.33	5.69	35.98
33	Papua	49.77	7.44	42.79
34	Papua Barat	44.83	4.31	50.86
	Indonesia	26.03	3.57	70.40

Tabel 4: Akses Air Pada Sekolah Menengah Kejuruan

NO	PROVINSI	SMK		
		Tidak ada Akses (W5)	Akses Terbatas (W4)	Akses Dasar (W3)
1	DKI Jakarta	16.41	0.51	83.08
2	Jawa Barat	17.23	3.11	79.67
3	Banten	20.25	4.05	75.70
4	Jawa Tengah	14.61	1.49	83.90
5	DI Yogyakarta	10.05	0.91	89.04
6	Jawa Timur	19.75	2.05	78.20
7	Aceh	28.79	9.60	61.62
8	Sumatera Utara	24.19	3.36	72.45
9	Sumatera Barat	25.63	4.52	69.85
10	R i a u	19.05	2.20	78.75
11	Kepulauan Riau	46.67	7.78	45.56
12	J a m b i	20.83	5.95	73.21
13	Sumatera Selatan	26.95	2.13	70.92
14	Bangka Belitung	14.81	3.70	81.48
15	Bengkulu	15.56	6.67	77.78
16	Lampung	12.01	2.31	85.68
17	Kalimantan Barat	37.97	2.67	59.36
18	Kalimantan Tengah	38.76	4.65	56.59
19	Kalimantan Selatan	27.27	4.96	67.77
20	Kalimantan Timur	45.79	1.87	52.34
21	Kalimantan Utara	67.86	3.57	28.57
22	Sulawesi Utara	25.28	2.81	71.91
23	Gorontalo	25.45	1.82	72.73
24	Sulawesi Tengah	28.32	5.20	66.47
25	Sulawesi Selatan	20.33	3.97	75.70
26	Sulawesi Barat	30.58	9.09	60.33
27	Sulawesi Tenggara	40.97	7.64	51.39
28	Maluku	45.71	4.76	49.52
29	Maluku Utara	47.75	4.50	47.75
30	B a l i	32.95	1.70	65.34
31	Nusa Tenggara Barat	24.83	4.48	70.69
32	Nusa Tenggara Timur	60.00	5.77	34.23
33	Papua	36.00	4.80	59.20
34	Papua Barat	31.37	9.80	58.82
	Indonesia	22.23	3.11	74.65

Tabel 5: Akses Air Dasar Pada Sekolah Luar Biasa

NO	PROVINSI	SLB		
		Tidak ada Akses (W5)	Akses Terbatas (W4)	Akses Dasar (W3)
1	DKI Jakarta	8.05	0.00	91.95
2	Jawa Barat	15.53	2.18	82.29
3	Banten	25.29	1.15	73.56
4	Jawa Tengah	18.97	0.57	80.46
5	DI Yogyakarta	9.21	0.00	90.79
6	Jawa Timur	20.59	0.23	79.18
7	Aceh	23.73	6.78	69.49
8	Sumatera Utara	22.92	4.17	72.92
9	Sumatera Barat	28.15	1.48	70.37
10	Riau	12.20	9.76	78.05
11	Kepulauan Riau	38.46	0.00	61.54
12	Jambi	43.75	0.00	56.25
13	Sumatera Selatan	26.67	0.00	73.33
14	Bangka Belitung	0.00	0.00	100.00
15	Bengkulu	20.00	6.67	73.33
16	Lampung	18.18	0.00	81.82
17	Kalimantan Barat	31.58	10.53	57.89
18	Kalimantan Tengah	18.18	4.55	77.27
19	Kalimantan Selatan	30.77	2.56	66.67
20	Kalimantan Timur	51.72	0.00	48.28
21	Kalimantan Utara	50.00	0.00	50.00
22	Sulawesi Utara	30.43	4.35	65.22
23	Gorontalo	50.00	0.00	50.00
24	Sulawesi Tengah	18.18	0.00	81.82
25	Sulawesi Selatan	17.72	1.27	81.01
26	Sulawesi Barat	27.27	0.00	72.73
27	Sulawesi Tenggara	38.18	0.00	61.82
28	Maluku	46.15	0.00	53.85
29	Maluku Utara	31.25	0.00	68.75
30	Bali	25.00	0.00	75.00
31	Nusa Tenggara Barat	33.33	2.78	63.89
32	Nusa Tenggara Timur	52.94	0.00	47.06
33	Papua	33.33	0.00	66.67
34	Papua Barat	20.00	0.00	80.00
	Indonesia	22.03	1.50	76.47

Tabel 6: Akses Air Dasar Pada Semua Jenjang Sekolah

NO	PROVINSI	SD, SMP, SMA, SMK, SLB		
		Tidak ada Akses (W5)	Akses Terbatas (W4)	Akses Dasar (W3)
1	DKI Jakarta	15.41	0.29	84.29
2	Jawa Barat	22.75	3.86	73.39
3	Banten	19.51	3.84	76.64
4	Jawa Tengah	18.85	1.49	79.65
5	DI Yogyakarta	14.80	0.92	84.29
6	Jawa Timur	23.70	2.09	74.21
7	Aceh	31.44	7.97	60.59
8	Sumatera Utara	35.60	4.36	60.03
9	Sumatera Barat	31.67	6.13	62.20
10	R i a u	28.47	4.90	66.62
11	Kepulauan Riau	40.73	4.33	54.95
12	J a m b i	34.21	4.67	61.12
13	Sumatera Selatan	32.28	3.02	64.70
14	Bangka Belitung	16.81	4.05	79.14
15	Bengkulu	25.92	5.35	68.73
16	Lampung	22.01	3.27	74.72
17	Kalimantan Barat	53.69	5.41	40.90
18	Kalimantan Tengah	48.75	3.41	47.85
19	Kalimantan Selatan	39.13	2.77	58.10
20	Kalimantan Timur	53.97	3.66	42.38
21	Kalimantan Utara	66.06	3.52	30.42
22	Sulawesi Utara	27.93	3.65	68.41
23	Gorontalo	27.49	5.45	67.05
24	Sulawesi Tengah	37.61	5.10	57.29
25	Sulawesi Selatan	26.95	5.30	67.75
26	Sulawesi Barat	44.02	6.04	49.95
27	Sulawesi Tenggara	46.34	5.92	47.74
28	Maluku	47.30	3.81	48.89
29	Maluku Utara	44.58	5.12	50.30
30	B a l i	39.59	1.94	58.47
31	Nusa Tenggara Barat	27.23	5.98	66.79
32	Nusa Tenggara Timur	64.47	7.02	28.51
33	Papua	60.74	6.28	32.98
34	Papua Barat	55.15	5.92	38.93
	Indonesia	30.52	3.79	65.69

LAMPIRAN 4

INDIKATOR AKSES JAMBAN

Tabel 7: Akses Jamban Pada Sekolah Dasar

NO	PROVINSI	SD		
		Tidak ada Akses (S12)	Akses Terbatas (S14)	Akses Dasar (S7)
1	DKI Jakarta	5.27	43.54	51.19
2	Jawa Barat	8.35	60.19	31.46
3	Banten	10.36	55.88	33.76
4	Jawa Tengah	5.63	52.83	41.54
5	DI Yogyakarta	2.28	32.36	65.36
6	Jawa Timur	9.96	59.10	30.93
7	Aceh	16.01	60.52	23.47
8	Sumatera Utara	20.56	50.36	29.08
9	Sumatera Barat	12.32	54.02	33.66
10	Riau	10.57	51.43	38.00
11	Kepulauan Riau	11.28	38.38	50.33
12	Jambi	13.39	61.83	24.77
13	Sumatera Selatan	11.73	53.34	34.93
14	Bangka Belitung	9.85	26.81	63.34
15	Bengkulu	11.95	61.36	26.69
16	Lampung	8.25	63.18	28.57
17	Kalimantan Barat	14.74	52.40	32.86
18	Kalimantan Tengah	13.78	63.81	22.41
19	Kalimantan Selatan	9.07	60.39	30.54
20	Kalimantan Timur	10.66	47.28	42.06
21	Kalimantan Utara	15.43	55.43	29.13
22	Sulawesi Utara	8.52	65.98	25.51
23	Gorontalo	10.53	59.61	29.86
24	Sulawesi Tengah	18.89	64.66	16.45
25	Sulawesi Selatan	11.69	61.26	27.05
26	Sulawesi Barat	26.70	62.78	10.53
27	Sulawesi Tenggara	18.45	64.27	17.28
28	Maluku	28.81	57.62	13.57
29	Maluku Utara	23.61	66.67	9.72
30	Bali	10.44	46.52	43.04
31	Nusa Tenggara Barat	18.38	56.69	24.94
32	Nusa Tenggara Timur	18.11	62.87	19.03
33	Papua	44.41	44.14	11.45
34	Papua Barat	29.40	53.31	17.29
	Indonesia	12.19	56.41	31.40

Tabel 8: Akses Jamban Pada Sekolah Menengah Pertama

NO	PROVINSI	SMP		
		Tidak ada Akses (S12)	Akses Terbatas (S14)	Akses Dasar (S7)
1	DKI Jakarta	5.13	39.60	55.27
2	Jawa Barat	7.03	48.40	44.57
3	Banten	8.44	46.66	44.90
4	Jawa Tengah	5.98	39.28	54.73
5	DI Yogyakarta	1.85	29.63	68.52
6	Jawa Timur	10.09	46.92	42.99
7	Aceh	14.90	55.40	29.70
8	Sumatera Utara	16.48	40.96	42.55
9	Sumatera Barat	11.84	45.82	42.34
10	R i a u	9.14	44.80	46.06
11	Kepulauan Riau	9.97	32.02	58.01
12	J a m b i	12.29	51.79	35.93
13	Sumatera Selatan	8.46	51.21	40.33
14	Bangka Belitung	12.68	19.02	68.29
15	Bengkulu	9.88	52.77	37.35
16	Lampung	6.32	56.93	36.76
17	Kalimantan Barat	10.24	43.68	46.08
18	Kalimantan Tengah	11.43	49.87	38.69
19	Kalimantan Selatan	8.50	46.77	44.73
20	Kalimantan Timur	8.58	38.94	52.48
21	Kalimantan Utara	12.42	45.96	41.61
22	Sulawesi Utara	7.10	61.65	31.25
23	Gorontalo	6.48	48.77	44.75
24	Sulawesi Tengah	12.56	55.79	31.65
25	Sulawesi Selatan	10.02	48.36	41.62
26	Sulawesi Barat	19.23	53.25	27.51
27	Sulawesi Tenggara	15.21	55.62	29.18
28	Maluku	27.05	52.59	20.37
29	Maluku Utara	23.25	58.47	18.28
30	B a l i	8.71	35.32	55.97
31	Nusa Tenggara Barat	19.37	48.77	31.86
32	Nusa Tenggara Timur	17.65	53.95	28.40
33	Papua	28.02	46.98	25.00
34	Papua Barat	17.86	53.57	28.57
	Indonesia	10.88	47.24	41.88

Tabel 9. Akses Jamban Pada Sekolah Menengah Atas

NO	PROVINSI	SMA		
		Tidak ada Akses (S12)	Akses Terbatas (S14)	Akses Dasar (S7)
1	DKI Jakarta	5.24	52.41	42.35
2	Jawa Barat	10.56	55.28	34.15
3	Banten	9.49	50.40	40.12
4	Jawa Tengah	6.77	52.63	40.61
5	DI Yogyakarta	3.11	53.42	43.48
6	Jawa Timur	11.98	53.50	34.52
7	Aceh	14.00	55.62	30.37
8	Sumatera Utara	15.40	50.72	33.88
9	Sumatera Barat	12.22	50.16	37.62
10	Riau	10.24	51.19	38.57
11	Kepulauan Riau	11.02	43.22	45.76
12	Jambi	11.76	45.70	42.53
13	Sumatera Selatan	12.18	47.86	39.97
14	Bangka Belitung	6.06	27.27	66.67
15	Bengkulu	4.48	53.73	41.79
16	Lampung	9.57	52.77	37.66
17	Kalimantan Barat	15.46	42.39	42.14
18	Kalimantan Tengah	17.24	48.71	34.05
19	Kalimantan Selatan	8.15	45.65	46.20
20	Kalimantan Timur	17.37	46.95	35.68
21	Kalimantan Utara	15.79	38.60	45.61
22	Sulawesi Utara	10.19	53.24	36.57
23	Gorontalo	7.02	38.60	54.39
24	Sulawesi Tengah	15.27	51.72	33.00
25	Sulawesi Selatan	13.96	48.94	37.10
26	Sulawesi Barat	21.25	46.25	32.50
27	Sulawesi Tenggara	19.01	60.92	20.07
28	Maluku	29.39	51.53	19.08
29	Maluku Utara	31.07	48.59	20.34
30	Bali	8.81	48.43	42.77
31	Nusa Tenggara Barat	21.50	48.53	29.97
32	Nusa Tenggara Timur	24.59	47.36	28.05
33	Papua	21.40	49.30	29.30
34	Papua Barat	25.00	39.66	35.34
	Indonesia	13.21	50.97	35.82

Tabel 10: Akses Jamban Pada Sekolah Menengah Kejuruan

NO	PROVINSI	SMK		
		Tidak ada Akses (S12)	Akses Terbatas (S14)	Akses Dasar (S7)
1	DKI Jakarta	11.11	41.71	47.18
2	Jawa Barat	13.05	46.91	40.04
3	Banten	14.64	40.97	44.39
4	Jawa Tengah	10.86	40.59	48.55
5	DI Yogyakarta	9.13	40.64	50.23
6	Jawa Timur	14.86	47.48	37.66
7	Aceh	16.16	45.45	38.38
8	Sumatera Utara	15.77	40.38	43.85
9	Sumatera Barat	15.08	39.70	45.23
10	R i a u	14.65	39.93	45.42
11	Kepulauan Riau	17.78	43.33	38.89
12	J a m b i	9.52	42.86	47.62
13	Sumatera Selatan	14.54	37.23	48.23
14	Bangka Belitung	5.56	27.78	66.67
15	Bengkulu	8.89	45.56	45.56
16	Lampung	8.08	48.04	43.88
17	Kalimantan Barat	14.97	34.76	50.27
18	Kalimantan Tengah	14.73	46.51	38.76
19	Kalimantan Selatan	14.05	33.88	52.07
20	Kalimantan Timur	11.68	39.72	48.60
21	Kalimantan Utara	17.86	32.14	50.00
22	Sulawesi Utara	12.36	48.31	39.33
23	Gorontalo	5.45	43.64	50.91
24	Sulawesi Tengah	9.25	60.69	30.06
25	Sulawesi Selatan	15.42	48.36	36.21
26	Sulawesi Barat	23.97	52.07	23.97
27	Sulawesi Tenggara	24.31	49.31	26.39
28	Maluku	28.57	48.57	22.86
29	Maluku Utara	26.13	56.76	17.12
30	B a l i	13.07	43.18	43.75
31	Nusa Tenggara Barat	23.45	50.34	26.21
32	Nusa Tenggara Timur	19.23	53.08	27.69
33	Papua	25.60	38.40	36.00
34	Papua Barat	25.49	41.18	33.33
	Indonesia	14.08	44.56	41.36

Tabel 11: Akses Jamban Pada Sekolah Luar Biasa

NO	PROVINSI	SLB		
		Tidak ada Akses (S12)	Akses Terbatas (S14)	Akses Dasar (S7)
1	DKI Jakarta	4.60	52.87	42.53
2	Jawa Barat	4.90	67.30	27.79
3	Banten	9.20	60.92	29.89
4	Jawa Tengah	3.45	65.52	31.03
5	DI Yogyakarta	1.32	44.74	53.95
6	Jawa Timur	7.09	70.02	22.88
7	Aceh	6.78	66.10	27.12
8	Sumatera Utara	10.42	43.75	45.83
9	Sumatera Barat	7.41	72.59	20.00
10	R i a u	9.76	53.66	36.59
11	Kepulauan Riau	15.38	30.77	53.85
12	J a m b i	18.75	37.50	43.75
13	Sumatera Selatan	6.67	46.67	46.67
14	Bangka Belitung	22.22	22.22	55.56
15	Bengkulu	6.67	46.67	46.67
16	Lampung	0.00	50.00	50.00
17	Kalimantan Barat	5.26	36.84	57.89
18	Kalimantan Tengah	13.64	36.36	50.00
19	Kalimantan Selatan	7.69	64.10	28.21
20	Kalimantan Timur	0.00	55.17	44.83
21	Kalimantan Utara	0.00	50.00	50.00
22	Sulawesi Utara	4.35	69.57	26.09
23	Gorontalo	37.50	25.00	37.50
24	Sulawesi Tengah	4.55	54.55	40.91
25	Sulawesi Selatan	12.66	70.89	16.46
26	Sulawesi Barat	0.00	86.36	13.64
27	Sulawesi Tenggara	7.27	76.36	16.36
28	Maluku	15.38	69.23	15.38
29	Maluku Utara	25.00	43.75	31.25
30	B a l i	0.00	37.50	62.50
31	Nusa Tenggara Barat	8.33	66.67	25.00
32	Nusa Tenggara Timur	14.71	52.94	32.35
33	Papua	0.00	91.67	8.33
34	Papua Barat	0.00	100.00	0.00
	Indonesia	6.81	63.24	29.95

Tabel 12: Akses Jamban Pada Semua Jenjang Sekolah

NO	PROVINSI	SD, SMP, SMA, SMK, SLB		
		Tidak ada Akses (S12)	Akses Terbatas (S14)	Akses Dasar (S7)
1	DKI Jakarta	5.94	43.47	50.59
2	Jawa Barat	8.63	56.83	34.53
3	Banten	10.30	52.45	37.25
4	Jawa Tengah	6.03	50.38	43.59
5	DI Yogyakarta	2.78	34.18	63.04
6	Jawa Timur	10.38	56.20	33.42
7	Aceh	15.49	58.50	26.01
8	Sumatera Utara	19.11	48.05	32.84
9	Sumatera Barat	12.23	52.60	35.17
10	R i a u	10.45	49.50	40.04
11	Kepulauan Riau	11.40	37.57	51.03
12	J a m b i	12.92	57.94	29.14
13	Sumatera Selatan	11.25	51.77	36.98
14	Bangka Belitung	10.04	25.44	64.52
15	Bengkulu	10.85	58.28	30.87
16	Lampung	7.94	60.28	31.79
17	Kalimantan Barat	13.86	49.42	36.72
18	Kalimantan Tengah	13.53	59.21	27.27
19	Kalimantan Selatan	9.08	56.80	34.12
20	Kalimantan Timur	10.69	45.03	44.28
21	Kalimantan Utara	14.79	50.99	34.23
22	Sulawesi Utara	8.50	63.32	28.17
23	Gorontalo	9.38	55.35	35.27
24	Sulawesi Tengah	16.96	62.03	21.01
25	Sulawesi Selatan	11.71	57.67	30.61
26	Sulawesi Barat	24.63	59.94	15.44
27	Sulawesi Tenggara	17.89	61.78	20.34
28	Maluku	28.40	55.62	15.98
29	Maluku Utara	24.35	62.50	13.15
30	B a l i	10.23	44.98	44.79
31	Nusa Tenggara Barat	19.01	54.37	26.63
32	Nusa Tenggara Timur	18.47	59.52	22.01
33	Papua	38.88	44.97	16.14
34	Papua Barat	26.52	51.97	21.51
	Indonesia	12.09	53.79	34.12

LAMPIRAN 5

INDIKATOR AKSES CUCI TANGAN

Tabel 13: Akses Sarana Cuci Tangan Pada Sekolah Dasar

NO	PROVINSI	SD	
		Tidak ada Akses (H3)	Ada Akses (H1)
1	DKI Jakarta	10.47	89.53
2	Jawa Barat	42.28	57.72
3	Banten	36.27	63.73
4	Jawa Tengah	15.06	84.94
5	DI Yogyakarta	6.46	93.54
6	Jawa Timur	26.01	73.99
7	Aceh	54.32	45.68
8	Sumatera Utara	59.64	40.36
9	Sumatera Barat	47.84	52.16
10	Riau	38.17	61.83
11	Kepulauan Riau	16.70	83.30
12	Jambi	40.79	59.21
13	Sumatera Selatan	38.68	61.32
14	Bangka Belitung	16.83	83.17
15	Bengkulu	46.92	53.08
16	Lampung	29.15	70.85
17	Kalimantan Barat	50.20	49.80
18	Kalimantan Tengah	45.59	54.41
19	Kalimantan Selatan	22.16	77.84
20	Kalimantan Timur	28.94	71.06
21	Kalimantan Utara	52.17	47.83
22	Sulawesi Utara	39.57	60.43
23	Gorontalo	21.80	78.20
24	Sulawesi Tengah	49.01	50.99
25	Sulawesi Selatan	30.76	69.24
26	Sulawesi Barat	46.83	53.17
27	Sulawesi Tenggara	55.53	44.47
28	Maluku	31.01	68.99
29	Maluku Utara	34.22	65.78
30	Bali	13.51	86.49
31	Nusa Tenggara Barat	31.05	68.95
32	Nusa Tenggara Timur	34.19	65.81
33	Papua	68.65	31.35
34	Papua Barat	58.90	41.10
	Indonesia	34.90	65.10

Tabel 14: Akses Sarana Cuci Tangan Pada Sekolah Menengah Pertama

NO	PROVINSI	SMP	
		Tidak ada Akses (H3)	Ada Akses (H1)
1	DKI Jakarta	15.22	84.78
2	Jawa Barat	35.49	64.51
3	Banten	34.56	65.44
4	Jawa Tengah	26.36	73.64
5	DI Yogyakarta	18.52	81.48
6	Jawa Timur	33.06	66.94
7	Aceh	58.57	41.43
8	Sumatera Utara	58.71	41.29
9	Sumatera Barat	55.73	44.27
10	R i a u	47.69	52.31
11	Kepulauan Riau	26.59	73.41
12	J a m b i	45.41	54.59
13	Sumatera Selatan	45.42	54.58
14	Bangka Belitung	27.80	72.20
15	Bengkulu	50.12	49.88
16	Lampung	34.40	65.60
17	Kalimantan Barat	46.00	54.00
18	Kalimantan Tengah	47.36	52.64
19	Kalimantan Selatan	23.81	76.19
20	Kalimantan Timur	33.99	66.01
21	Kalimantan Utara	44.72	55.28
22	Sulawesi Utara	41.90	58.10
23	Gorontalo	39.81	60.19
24	Sulawesi Tengah	52.96	47.04
25	Sulawesi Selatan	37.85	62.15
26	Sulawesi Barat	47.34	52.66
27	Sulawesi Tenggara	52.33	47.67
28	Maluku	40.23	59.77
29	Maluku Utara	43.79	56.21
30	B a l i	19.65	80.35
31	Nusa Tenggara Barat	38.27	61.73
32	Nusa Tenggara Timur	49.34	50.66
33	Papua	64.77	35.23
34	Papua Barat	57.14	42.86
	Indonesia	39.81	60.19

Tabel 15: Akses Sarana Cuci Tangan Pada Sekolah Menengah Atas

NO	PROVINSI	SMA	
		Tidak ada Akses (H3)	Ada Akses (H1)
1	DKI Jakarta	5.24	94.76
2	Jawa Barat	25.78	74.22
3	Banten	20.16	79.84
4	Jawa Tengah	17.04	82.96
5	DI Yogyakarta	11.80	88.20
6	Jawa Timur	22.54	77.46
7	Aceh	49.31	50.69
8	Sumatera Utara	44.47	55.53
9	Sumatera Barat	41.80	58.20
10	Riau	35.71	64.29
11	Kepulauan Riau	21.19	78.81
12	Jambi	31.67	68.33
13	Sumatera Selatan	34.48	65.52
14	Bangka Belitung	24.24	75.76
15	Bengkulu	35.07	64.93
16	Lampung	25.96	74.04
17	Kalimantan Barat	38.40	61.60
18	Kalimantan Tengah	43.10	56.90
19	Kalimantan Selatan	17.93	82.07
20	Kalimantan Timur	27.70	72.30
21	Kalimantan Utara	52.63	47.37
22	Sulawesi Utara	29.63	70.37
23	Gorontalo	31.58	68.42
24	Sulawesi Tengah	46.31	53.69
25	Sulawesi Selatan	35.16	64.84
26	Sulawesi Barat	37.50	62.50
27	Sulawesi Tenggara	51.76	48.24
28	Maluku	39.31	60.69
29	Maluku Utara	42.37	57.63
30	Bali	12.58	87.42
31	Nusa Tenggara Barat	21.82	78.18
32	Nusa Tenggara Timur	50.00	50.00
33	Papua	51.63	48.37
34	Papua Barat	46.55	53.45
	Indonesia	31.28	68.72

Tabel 16: Akses Sarana Cuci Tangan Pada Sekolah Menengah Kejuruan

NO	PROVINSI	SMK	
		Tidak ada Akses (H3)	Ada Akses (H1)
1	DKI Jakarta	14.36	85.64
2	Jawa Barat	28.02	71.98
3	Banten	27.10	72.90
4	Jawa Tengah	21.85	78.15
5	DI Yogyakarta	13.24	86.76
6	Jawa Timur	29.41	70.59
7	Aceh	54.04	45.96
8	Sumatera Utara	46.06	53.94
9	Sumatera Barat	49.75	50.25
10	R i a u	39.93	60.07
11	Kepulauan Riau	27.78	72.22
12	J a m b i	35.12	64.88
13	Sumatera Selatan	31.91	68.09
14	Bangka Belitung	20.37	79.63
15	Bengkulu	44.44	55.56
16	Lampung	28.18	71.82
17	Kalimantan Barat	41.18	58.82
18	Kalimantan Tengah	41.86	58.14
19	Kalimantan Selatan	20.66	79.34
20	Kalimantan Timur	27.10	72.90
21	Kalimantan Utara	35.71	64.29
22	Sulawesi Utara	34.27	65.73
23	Gorontalo	40.00	60.00
24	Sulawesi Tengah	47.98	52.02
25	Sulawesi Selatan	32.94	67.06
26	Sulawesi Barat	50.41	49.59
27	Sulawesi Tenggara	47.22	52.78
28	Maluku	39.05	60.95
29	Maluku Utara	50.45	49.55
30	B a l i	13.64	86.36
31	Nusa Tenggara Barat	32.76	67.24
32	Nusa Tenggara Timur	46.92	53.08
33	Papua	45.60	54.40
34	Papua Barat	47.06	52.94
	Indonesia	31.14	68.86

Tabel 17: Akses Sarana Cuci Tangan Pada Sekolah Luar Biasa

NO	PROVINSI	SLB	
		Tidak ada Akses (H3)	Ada Akses (H1)
1	DKI Jakarta	5.75	94.25
2	Jawa Barat	21.53	78.47
3	Banten	20.69	79.31
4	Jawa Tengah	17.24	82.76
5	DI Yogyakarta	3.95	96.05
6	Jawa Timur	14.65	85.35
7	Aceh	61.02	38.98
8	Sumatera Utara	35.42	64.58
9	Sumatera Barat	38.52	61.48
10	R i a u	36.59	63.41
11	Kepulauan Riau	15.38	84.62
12	J a m b i	37.50	62.50
13	Sumatera Selatan	33.33	66.67
14	Bangka Belitung	22.22	77.78
15	Bengkulu	40.00	60.00
16	Lampung	13.64	86.36
17	Kalimantan Barat	15.79	84.21
18	Kalimantan Tengah	13.64	86.36
19	Kalimantan Selatan	12.82	87.18
20	Kalimantan Timur	17.24	82.76
21	Kalimantan Utara	0.00	100.00
22	Sulawesi Utara	8.70	91.30
23	Gorontalo	25.00	75.00
24	Sulawesi Tengah	9.09	90.91
25	Sulawesi Selatan	27.85	72.15
26	Sulawesi Barat	45.45	54.55
27	Sulawesi Tenggara	36.36	63.64
28	Maluku	30.77	69.23
29	Maluku Utara	12.50	87.50
30	B a l i	6.25	93.75
31	Nusa Tenggara Barat	38.89	61.11
32	Nusa Tenggara Timur	20.59	79.41
33	Papua	66.67	33.33
34	Papua Barat	20.00	80.00
	Indonesia	22.17	77.83

Tabel 18: Akses Sarana Cuci Tangan Pada Semua Jenjang Sekolah

NO	PROVINSI	SD, SMP, SMA, SMK, SLB	
		Tidak ada Akses (H3)	Ada Akses (H1)
1	DKI Jakarta	11.42	88.58
2	Jawa Barat	38.72	61.28
3	Banten	33.79	66.21
4	Jawa Tengah	17.04	82.96
5	DI Yogyakarta	9.16	90.84
6	Jawa Timur	27.02	72.98
7	Aceh	54.77	45.23
8	Sumatera Utara	57.35	42.65
9	Sumatera Barat	48.44	51.56
10	R i a u	39.99	60.01
11	Kepulauan Riau	19.99	80.01
12	J a m b i	40.77	59.23
13	Sumatera Selatan	39.28	60.72
14	Bangka Belitung	19.45	80.55
15	Bengkulu	46.63	53.37
16	Lampung	29.83	70.17
17	Kalimantan Barat	48.21	51.79
18	Kalimantan Tengah	45.50	54.50
19	Kalimantan Selatan	22.07	77.93
20	Kalimantan Timur	29.66	70.34
21	Kalimantan Utara	49.58	50.42
22	Sulawesi Utara	38.92	61.08
23	Gorontalo	27.20	72.80
24	Sulawesi Tengah	49.40	50.60
25	Sulawesi Selatan	32.38	67.62
26	Sulawesi Barat	46.74	53.26
27	Sulawesi Tenggara	53.92	46.08
28	Maluku	34.17	65.83
29	Maluku Utara	37.80	62.20
30	B a l i	14.21	85.79
31	Nusa Tenggara Barat	31.94	68.06
32	Nusa Tenggara Timur	38.89	61.11
33	Papua	65.86	34.14
34	Papua Barat	56.98	43.02
	Indonesia	35.19	64.81

